



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



Disusun Oleh :

## **Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam yang merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menerangkan tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Tahun 2025 merupakan perkembangan capaian kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan sistem dan strategi melalui koordinasi secara terus menerus dengan berbagai pihak untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Dengan adanya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja Laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Batam, 19 Januari 2026

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Batam



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Semuel Sandi Rundupadang**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari rencana pada tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai dengan Renstra 2025-2029. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran.

Seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dari masing-masing sasaran strategis Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena semua kegiatan yang akan dilakukan telah disusun dan direncanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan pada periode berjalan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Selain itu adanya koordinasi dengan berbagai instansi dan serta pendampingan dari tim Direktorat serta sekretariat Ditjen. PSDKP turut mendukung tercapainya target kinerja Pangkalan PSDKP Batam.

Pada tahun 2025 kegiatan terlaksana dengan baik. Namun ada potensi kendala kegiatan penyidikan terkait dengan berlakunya KUHAP yang baru. Untuk mengantisipasi potensi permasalahan tersebut, seluruh PPNS agar mengikuti sosialisasi atau seminar KUHAP yang baru.

Keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian Sasaran Strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 sebesar **103,00** predikat **Baik**. Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025 sebesar Rp. 35.007.807.000,- termasuk blokir dan PNPB sebesar Rp. 1.057.307.000,-. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen dengan total realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. **33.488.956.289,- atau 95,66%**.

**CAPAIAN KINERJA PANGKALAN PSDKP BATAM 2025**

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>%</b>
1 Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas Secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas ( Indeks)	82	82	100
2 Terselenggaranya operasi armada pengawas SDKP Secara Efektif	2. Indeks operasi kapal Pengawas (indeks)	92	97,1	105,54
	3. Indeks Kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	92	94,36	102,57
3 Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan parasaran Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4. Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	80	100	100
4 Terselenggara intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	5. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100	100	100
	6. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100	100	100
5 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	7. Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82	75	100
6 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	8. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82	100	100
7 Terselenggaranya Penanganan	9. Indeks penerapan sanksi administratif	81	81	100

	Pelanggaran admonistasi bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	bidang kelautan dan perikanan (Indeks)			
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81	81	100
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tidak Pidana Kelautan dan Perikanan ( Indeks)	81	100	106,38
9	Tata kelola Pemerintahan yang efektif,lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSKP Batam	71.5	88,26	120
		13. Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP batam ( Nilai)	92	94,16	102,35
		14. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Batam ( Indeks)	81	83,33	102,88
		15. Penilaian Mandiri SAKIP atker Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	86	90	104,65
		16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko Pangkalan PSDKP Batam (%)	100	100	100
		17. Peresentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	100	120
		18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80	92,99	105,07
		19. Nilai minimal yang dipesyaratkan untuk unit kerja berpredikat Menuju wilayah Bebas Korupsi ( WBK) Unit kerja Lingkup Pangkalan PSDKP batam ( Nilai)	80	82,36	102,95
		20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP batam ( Nilai)	75	88,7	110,63

	21. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam ( Inovasi)	77	82	106,49
	22. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	78,70	112,43

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP .....	2
1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam.....	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Rencana Strategis 2024-2029 Pangkalan PSDKP Batam .....	12
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Batam.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam 2025.....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>19</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam.....	19
3.2 Evaluasi dan Analisa Kinerja .....	21
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	171
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	172
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>174</b>
5.1 Kesimpulan .....	174
5.2 Rekomendasi.....	175
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025.....	15
2. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan SDKP Batam Tahun 2025...	19
3. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 .....	173

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam.....	6
2. Wilayah Administrasi Pangkalan PSDKP Batam.....	11
3. Grafik nilai Kualitas operasi intelijen perikanan. ....	106
4. Grafik nilai Kualiatas operasi Intelijen perikanan.....	106

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP), susunan organisasi KKP salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam (Pangkalan PSDKP Batam) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2025-2029.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, pengelolaan kinerja secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan Pengukuran kinerja secara berkala dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan pada tahun 2025 dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan pencapaian yang diharapkan atau masih di bawah dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu sebagai laporan capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam Tahun 2025.

## **1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan**

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
  - a. Masih adanya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA);
  - b. Masih adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melakukan operasi penangkapan pada wilayah yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha;

- c. Adanya kegiatan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri melalui Palembang dan Jambi kemudian diseberangkan ke Singapura melalui laut disekitar Pulau Batam;
  - d. Adanya ikan hasil importasi yang masih belum sesuai dengan peruntukannya;
  - e. Masih terdapat pelaku usaha yg tidak taat peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan ikan dilindungi;
  - f. Adanya masyarakat yang membudidayakan ikan invasif;
  - g. Kegiatan usaha perikanan belum mempunyai perizinan berusaha;
  - h. Kegiatan usaha perikanan yang belum memenuhi perizinan berusaha.
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
- a. Adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha;
  - b. Adanya pemanfaatan ruang laut yang belum berizin;
  - c. Adanya pemanfaatan pulau2 kecil yang tidak memiliki perizinan;
  - d. Masih adanya pelaku usaha sub sektor Kelautan yg belum taat dalam perizinan;
  - e. Pemanfaatan kawasan konservasi yang belum sesuai ketentuan.

#### **1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Kemudian terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut, terdapat beberapa sasaran kegiatan di Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2025, yaitu:

1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif yaitu:
  - a. Operasi Kapal Pengawas HIU 03 dan HIU 017;
  - b. Operasional 13 *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat/Unit Reaksi Cepat*;
3. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
4. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif;

5. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan yaitu:
  - a. Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya;
  - b. Pengawasan Pencegahan Pencemaran/pengelolaan limbah.
6. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan yaitu Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya;
7. Tindak lanjut hasil pengawasan yang terindikasi melakukan TPKP;
8. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan, yaitu:
  - a. terselesaikannya pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan;
  - b. terselesaikannya pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.
8. Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
9. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pangkalan PSDKP Batam di pimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum yang merangkap sebagai Ketua Tim Dukungan Manajemen, Ketua Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ketua Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ketua Tim Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan total sumber daya manusia yang ada sejumlah 152 pegawai yang terdiri dari 69 PNS, 56 PPPK, dan 27 PJLP kemudian jabatan pengawas kelautan berjumlah 11, pengawas perikanan berjumlah

49, dan PPNS Perikanan berjumlah 14 sebagaimana gambar 1 berikut.



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Tim Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam diuraikan sebagai berikut:

### 1. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Tugas :

Melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan,

dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan BMN dan perlengkapan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- b. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- c. Penyiapan kordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang milik negara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

**2. Tim Kerja Sarana, Prasarana dan Ops. Kapal Pengawas**

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pemantauan dan operasi armada lingkup Pangkalan PSDKP  
Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
- c. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasn, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan.

**3. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan**

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan.

**4. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan**

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan.

**5. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran**

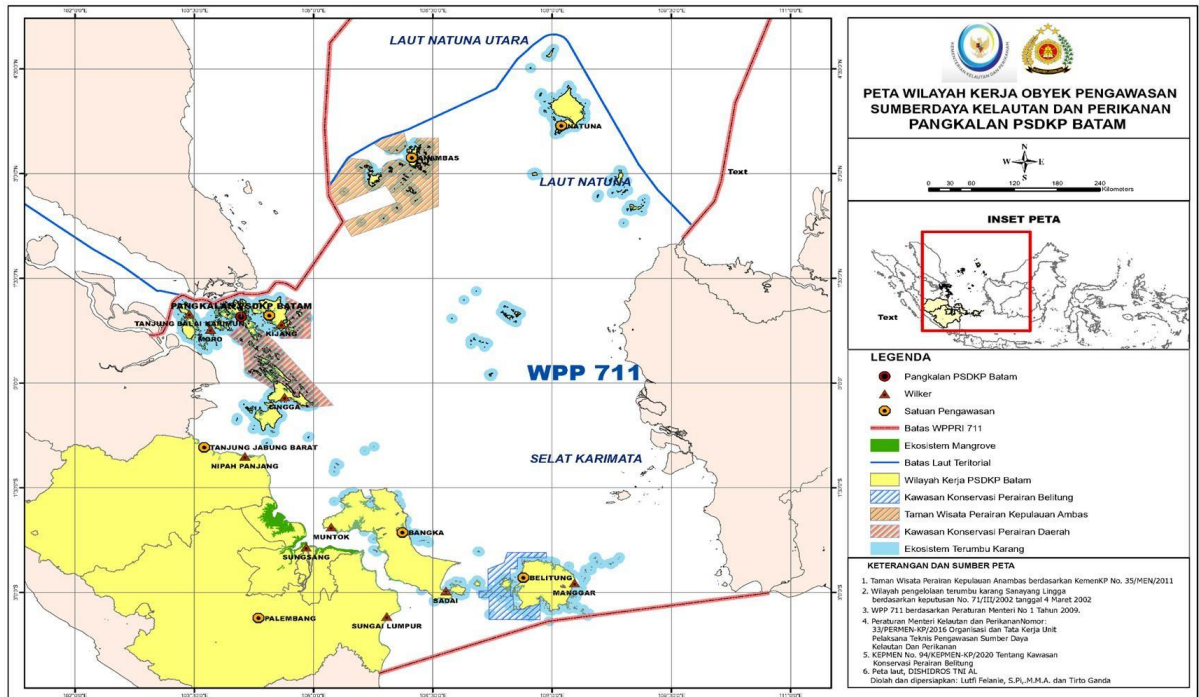
Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Penanganan Pelanggaran, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung Sumatera Selatan dan Jambi membawahi 7 (tujuh) Satuan Pengawasan (Satwas) yaitu Satwas SDKP Tanjung Pinang, Satwas SDKP Natuna, Satwas SDKP Anambas, Satwas SDKP Bangka, Satwas SDKP Belitung, Satwas SDKP Palembang dan Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat. Wilayah administratif Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Wilayah Adminstratif Pangkalan PSDKP Batam

## 1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP

Batam tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

### a) **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Batam.

### b) **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2025.

### c) **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dan keuangan, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025.

d) **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis 2025-2029 Ditjen. PSDKP**

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor 86 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

### **2.2 Visi, Misi dan Tujuan**

#### **1. Visi dan Misi**

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

**“Indonesia bebas pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Dengan misi:

**1**

Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh dan sinergis

**2**

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP

## 2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

**“Meningkatnya Ketangguhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing.” dan**

**“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas lingkup Ditjen PSDKP”**

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 sebagaimana berikut:

- a. SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut;
- b. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional;
- d. SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan;
- e. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.

Dari sasaran KKP di atas, Ditjen PSDKP mempunyai sasaran strategis:

- a. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi KKP.

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; <sup>(3)</sup> Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; <sup>(4)</sup> Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Anggaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 semula sebesar Rp. 39.350.325.000,- kemudian diadakan revisi karena efisiensi menjadi sebesar Rp. 35.007.807.000,- atau Rp. 33.500.500.000,- diluar blokir dan PNBPN. Untuk Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 (Awal)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas Secara efektif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas ( Indeks)	82
2	Terselenggaranya operasi armada pengawas SDKP Secara Efektif	2. Indeks operasi kapal Pengawas (indeks)	92
		3. Indeks Kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	92
3	Terselenggaranya Pembangunan serta	4. Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	80

	perawatan sarana dan parasaran Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan		
4	Terselenggara intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	5. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		6. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
5	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	7. Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	8. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		10. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan ( Indeks)	81
9	Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSKP Batam	71.5
		13. Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran ( IKPA) satker linkup Pangkalan PSDKP batam ( Nilai)	92
		14. Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Batam ( Indeks)	81

	15. Penilaian Mandiri SAKIP atker Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	86
	16. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
	17. Peresentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
	18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80
	19. Nilai minimal yang dipesyaratkan untuk unit kerja berpredikat Menuju wilayah Bebas Korupsi ( WBK) Unit kerja Lingkup Pangkalan PSDKP batam ( Nilai)	80
	20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP batam ( Nilai)	75
	21. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam ( Inovasi)	77
	22. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Perjanjian kinerja tersebut merupakan revisi dari perjanjian kinerja sebelumnya dikarenakan adanya perubahan target indikator dengan rincian sebagaimana tabel 2 berikut.

**Tabel 2.** Revisi Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025

SEMULA		MENJADI	
INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4. Persentase sarana Pengawas SDKP yang di selesaikan (%)	100	4. Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	80
5. Persentase prasarana dan perawatan prasarana dan sarana yang selesaikan (%)	100		
6. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100		
20. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	88,5	18. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna Layanan Publik unit kerja lingkup pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80
23. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1	21. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	77


Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKM) dilakukan dengan berpedoman pada formulasi penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama/Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja yang didukung Aplikasi “**Kinerjaku**” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PANGKALAN PSDKP BATAM

Berdasarkan pengelolaan kinerja tahun 2025, Capaian Indikator Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Batam mencapai **103,00** predikat **Baik** yang meliputi 9 Sasaran Kegiatan dengan 11 IKU dan 11 IKM. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 ditabulasikan dibawah ini.

**Tabel 3.** Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025


e-Kinerja Home
Selasa, 10 Februari 2026

NKO Desember - 2025									
Unit Kerja : PANGKALAN PSDKP BATAM									
Skor Kinerja : <b>103.00</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓</li> <li>• Jika masih terdapat tanda ✘, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 📄</li> <li>• Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+</li> </ul>									
Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Desember	Capaian Desember	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif						100,00		
1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas Tambah Data Dukung+ Data Dukung1 📄	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	82,00	82,00	100,00	13-Jan-2026 15:02
S.02	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif						104,06		
2	Indeks operasi kapal pengawas Data Dukung1 ✓ 📄   Data Dukung2 ✓ 📄   Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	92,00	97,10	105,54	13-Jan-2026 15:02
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas Data Dukung1 ✓ 📄   Data Dukung2 ✓ 📄   Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	92,00	94,36	102,57	13-Jan-2026 15:02
S.03	Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						99,89		
4	Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP Data Dukung1 ✓ 📄   Tambah Data Dukung+ Data Dukung2 📄	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	100,00	100,00	100,00	13-Jan-2026 15:02
5	Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Data Dukung1 ✓ 📄   Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	13-Jan-2026 15:02
6	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP Data Dukung1 ✓ 📄   Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	13-Jan-2026 15:02
S.04	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif						110,00		
7	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan Data Dukung1 ✓ 📄   Tambah Data Dukung+ Data Dukung2 📄	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	75,00	100,00	120,00	13-Jan-2026 15:02
8	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan Data Dukung1 ✓ 📄   Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	75,00	75,00	100,00	13-Jan-2026 15:02

9	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan Data Dukung1 ✓   Data Dukung2 ✓   Data Dukung3 ✓ Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	100,00	100,00	100,00	13-Jan-2026 15:02
S.06	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan							100,00	
10	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Data Dukung1 ✓   Data Dukung2 ✓   Data Dukung3 ✓ Tambah Data Dukung+ Data Dukung4	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	100,00	100,00	100,00	13-Jan-2026 15:02
S.07	Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan							100,00	
11	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+ Data Dukung2	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	81,00	81,00	100,00	13-Jan-2026 15:02
12	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+ Data Dukung2	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	81,00	81,00	100,00	13-Jan-2026 15:02
S.08	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan							106,38	
13	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓   Data Dukung2 ✓   Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	94,00	100,00	106,38	13-Jan-2026 15:02
14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	71,50	88,28	120,00	13-Jan-2026 15:02
15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	92,00	94,18	102,35	13-Jan-2026 15:02
16	Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	81,00	83,33	102,88	13-Jan-2026 15:02
17	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Batam (Nilai) Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	90,00	104,65	13-Jan-2026 15:02
18	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	13-Jan-2026 15:02
19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	100,00	105,26	13-Jan-2026 15:02
20	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	88,50	92,99	105,07	13-Jan-2026 15:02
21	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+ Data Dukung2	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	82,36	102,95	13-Jan-2026 15:02
22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Batam Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	80,00	88,50	110,63	13-Jan-2026 15:02
23	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi) Data Dukung1 ✓   Tambah Data Dukung+	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,00	77,00	82,00	106,49	13-Jan-2026 15:02
24	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Data Dukung1 ✓   Data Dukung2 ✓   Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	78,70	112,43	13-Jan-2026 15:02

Analisa dan monitoring yang digunakan pada pencapaian kinerja tahun 2025 adalah membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang di tetapkan dalam Rencana Aksi Tahun 2025.

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sampai dengan akhir Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis pada **IKU1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas** diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 1** (*Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas Secara efektif*) yaitu:

#### 1) INDEKS KUALITAS PEMBINAAN POKMASWAS

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80	100	120,00
		2024	81	100	120,00
		<b>2025</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>100,00</b>

Target Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar 82 dan ditetapkan sebagai target Tahunan dan tercapai 82 atau capainnya 100%. Pada tahun 2025 ini, tidak dilaksanakan pembinaan pokmaswas karena adanya efisiensi anggaran berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang mana anggaran pembinaan pokmaswas sampai dengan Triwulan IV menjadi Rp. 0,- yang awalnya Rp. 200.000,000,-. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif.

Evaluasi dan analisis pada **IKU2 Indeks operasi kapal Pengawas (indeks)** diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 2 (Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif)** yaitu:

## 2) INDEKS OPERASI KAPAL PENGAWAS

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU2	Indeks operasi kapal Pengawas (indeks)	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	85	94,38	111,04
		2023	87,6	100	114,16
		2024	91	96,61	106,16
		<b>2025</b>	<b>92</b>	<b>97,10</b>	<b>105,54</b>

Target indeks Kinerja Operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2025 adalah 92 dan tercapai sebesar 97,10. Tercapaiannya Indikator ini dikarenakan kapal pengawas melakukan kegiatan operasi sebanyak total 152 hari operasi dengan jumlah total kapal yang diperiksa yaitu 631 unit kapal perikanan dan 73 objek pengelolaan sumber daya kelautan. Jadi rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak lebih dari 2 unit per hari operasi dengan rincian sebagai berikut.

NO	Nama Kapal	Hari Operasi	DIPERIKSA			DITANGKAP			OBJEK KELAUTAN
			KII	KIA	KIP	KII	KIA	JML	
1	Hiu 03	73	334	0	1	7	0	7	54
2	Hiu 17	79	297	2	0	7	0	7	19
Total		152	631	2	1	14	0	14	73

Selain itu, tercapainya indikator ini dikarenakan cakupan wilayah pengawasan yang tinggi dilakukan oleh Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam melalui operasi pengawasan di laut. Selain mengawasi pelaku usaha sumber daya perikanan, Kapal pengawas juga melakukan pengawasan terhadap pelaku

usaha kelautan. Jika di bandingkan dengan tahun 2024 berdasarkan hasil pelaksanaan operasi pengawasan laut pada tahun 2024 dan 2025, terdapat beberapa perbedaan capaian kinerja baik dari aspek hari operasi, jumlah pemeriksaan kapal, penindakan, maupun objek sumber daya kelautan yang diawasi.

Dari sisi hari operasi, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 154 hari operasi, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 152 hari operasi. Hal ini menunjukkan adanya penurunan intensitas kehadiran unsur pengawasan di laut, yang mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perairan.

Namun demikian, dari sisi jumlah kapal yang diperiksa, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 441 kapal, sedangkan pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 631 kapal. Kenaikan ini juga berdampak pada jumlah objek kelautan dan SDK yang diperiksa, dari 35 objek pada tahun 2024 menjadi 73 objek pada tahun 2025.

Selanjutnya, pada aspek penindakan, pada tahun 2024 tercatat 7 kapal dilakukan penangkapan, sedangkan pada tahun 2025 tidak terdapat penangkapan kapal. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran fokus operasi dari penindakan menuju pencegahan serta peningkatan kepatuhan pengguna laut.

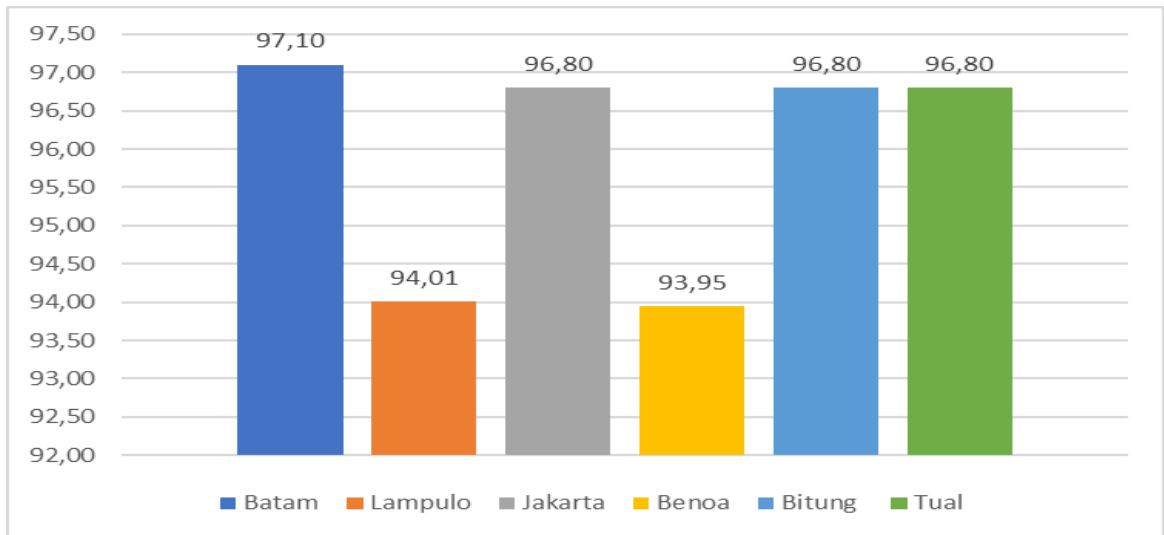
#### Analisis dan Alasan Perubahan Capaian

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab perbedaan capaian kinerja antara tahun 2024 dan 2025 antara lain:

1. Peningkatan Efek Deterrence (Daya Cegah) Intensitas operasi yang konsisten pada tahun-tahun sebelumnya telah menimbulkan efek jera, sehingga tingkat pelanggaran di wilayah perairan cenderung menurun pada tahun 2025.
2. Perubahan Pola Operasi Pengawasan Pada tahun 2025, pelaksanaan operasi lebih difokuskan pada patroli pencegahan, pengawasan wilayah rawan, dan kehadiran unsur di laut, bukan semata-mata pada pemeriksaan kapal dalam jumlah besar.
3. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Nelayan Sosialisasi, pembinaan, dan penegakan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan pada tahun sebelumnya berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan pelaku kegiatan kelautan dan perikanan.
4. Faktor Kondisi Operasional dan Lingkungan Faktor cuaca, kondisi laut, serta keterbatasan dukungan unsur dan logistik pada periode tertentu turut memengaruhi jumlah kapal dan objek yang dapat diperiksa secara optimal.
5. Optimalisasi Kualitas Pengawasan Pada tahun 2025, pengawasan lebih diarahkan pada kualitas pemeriksaan dan validitas data, bukan hanya kuantitas, sehingga jumlah pemeriksaan menurun namun tetap terukur dan terfokus.

Selain itu tercapainya indikator ini dikarenakan cakupan wilayah pengawasan yang tinggi dilakukan oleh Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam melalui operasi pengawasan di laut. Selain mengawasi pelaku usaha sumber daya perikanan, kapal pengawas juga melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan. Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 11.245.267.000 dimana hingga Triwulan IV Tahun 2025 tercatat telah terealisasi sebesar **10,938,378,329 (87.88 %)** dari nilai anggaran. Pagu anggaran ini

kemudian dikurangi blokir sebanyak Rp. 330.075.000 sehingga pagu efektif Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp. 10.915.912.000 dengan nilai realisasi RP. **10,938,378,329 (99,79 %)** Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari pada Pangkalan PSDKP Jakarta, lampulo, benoa, bitung, dan Tual. Hal tersebut dikarenakan jumlah kapal pengawas yang dioperasikan di Pangkalan PSDKP Batam lebih banyak sehingga cakupan serta jumlah kapal yang diperiksa lebih banyak. Selain itu kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan penangkapan pada kapal perikanan asing maupun Indonesia yang telah melakukan pelanggaran lebih banyak dibandingkan dengan kapal pengawas di Pangkalan PSDKP lainnya.

Evaluasi dan analisis pada **IKU3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)** diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 2 (Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif)**, yaitu:

### 3) INDEKS KINERJA OPERASI SPEEDBOAT PENGAWAS

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	85	99,93	117,56
		2023	87,6	95,54	109,06
		2024	91	95,69	105,15
		<b>2025</b>	<b>92</b>	<b>94,36</b>	<b>102,57</b>

Target Indeks Kinerja Operasi speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada Tahun 2025 adalah sebesar 92 dan dihitung periode tahunan atau penghitungan pada akhir tahun karena adanya efisiensi anggaran di awal tahun 2025. Pada Triwulan IV Tahun 2025, analisa sama dengan kapal pengawas indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan operasional Speedboat/RIB/Rubberboat/Unit Reaksi Cepat dalam rangka mewujudkan pengendalian dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang profesional dan partisipatif. Target indikator baru dilaksanakan yaitu operasi pengawasan selama total 199 hari menggunakan Speedboat/RIB/Unit Reaksi Cepat di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 164 unit kapal perikanan Indonesia tangkap 4, objek kelautan 18 dengan wilayah pengawasan perairan sekitar Natuna, Anambas, Batam, dan sekitarnya. Ada kendala dalam pencapaian target operasi speed boat, yaitu didalam anggaran 2025 targetnya 22 hari operasi untuk 15 speed boat, namun karena adanya efisiensi anggaran hanya tersedia 11 hari operasi untuk 15 speed boat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi capaian Indeks kinerja operasi speedboat pengawas tahun 2025.

NO	NAMA KAPAL	HARI OPS	DIPERIKSA			DITANGKAP			OBJEK KELAUTAN
			KII	KIA	JML	KII	KIA	JML	

1	RIB/Sea Rider X-8	17	24	0	24	0	0	0	5
2	Hiru Biru 01	48	5	0	5	2	0	2	0
3	Hiru Biru 02	58	5	0	5	1	0	1	8
4	Napoleon 16	10	25	0	25	0	0	0	0
5	Napoleon 27	4	2	0	2	0	0	0	0
6	Napoleon 35	8	16	0	16	1	0	1	0
7	Napoleon 15	8	18	0	18	0	0	0	0
8	Dolphin 23	13	7	0	7	0	0	0	0
9	Dolphin 08	11	18	0	18	0	0	0	3
10	Dolphin 15	11	22	0	22	0	0	0	1
11	Dolphin 18	11	22	0	22	0	0	0	1
<b>Total</b>		<b>199</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>18</b>

## Analisis strategis perbandingan tahun 2024 dan 2025

### 1. Eskalasi Intensitas Patroli (Hari Operasi)

- a. Temuan: Terjadi lonjakan drastis pada total hari operasi dari 199 hari (2024) menjadi 472 hari (2025).
- b. Analisis: Kenaikan sebesar 137% ini mengindikasikan adanya peningkatan anggaran operasional atau kebijakan baru untuk memperketat pengawasan wilayah perairan secara berkelanjutan (pola patroli sepanjang tahun).

### 2. Pergeseran Fokus Pemeriksaan (Output)

- a. Temuan: Jumlah pemeriksaan/Riska naik dari 164 kali ke 459 kali.
- b. Analisis: Tahun 2024 memiliki rasio tangkapan yang tercatat (4 kapal ditangkap dari 164 pemeriksaan).
- c. Tahun 2025 fokus pada volume pemeriksaan (preventif). Meskipun hari operasi naik 2x lipat, jumlah pemeriksaan naik hampir 3x lipat, menunjukkan bahwa personil di lapangan jauh lebih aktif melakukan interaksi/pemeriksaan fisik di laut pada tahun 2025.

### 3. Analisis Kelompok Armada (Tipologi Kapal)

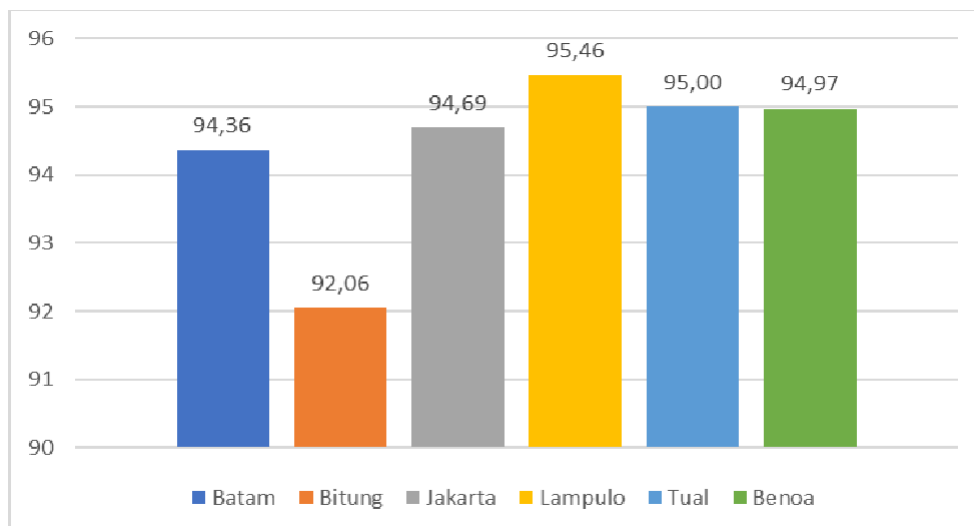
a. Kelompok Speedboat (Dolphin & Napoleon):

- Pada 2024, operasionalnya sangat sporadis (pendek-pendek, misal Napoleon 27 hanya 4 hari).
- Pada 2025, terjadi Standardisasi Durasi. Hampir semua speedboat beroperasi minimal 30 hari. Ini menunjukkan manajemen penjadwalan yang lebih tertib.

b. Kelompok Kapal Pengawas (Hiu Biru):

- Di tahun 2025, Hiu Biru 01 dan 02 dimaksimalkan hingga 60 hari operasi. Ini menandakan kapal besar difungsikan sebagai "benteng" atau pengawas jarak jauh yang tetap siaga di laut dalam waktu lama.

Pagu anggaran untuk operasi Speedboat Pengawas pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 915.354.000 dan mengalami pengurangan nilai dari blokir anggaran sebesar Rp. 481.635.000 sehingga pagu efektif operasi Speedboat Pengawas Tahun 2025 menjadi Rp. 433.719.000. Realisasi anggaran operasi speedboat pengawas sampai dengan Triwulan IV 2025 realisasi anggaran sebesar **Rp. 433,575,995 (99.97 %)** dengan sisa anggaran sebesar Rp. 143,005 dari pagu yang tersedia. Anggaran yang sudah terealisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi pengawasan menggunakan Speedboat dalam rangka pengendalian dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara profesional dan partisipatif. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Seluruh UPT Pangkalan PSDKP telah mencapai target pada indikator Indeks Kinerja Operasi Speedboat. Hal ini dikarenakan hari operasi Speedboat pada setiap UPT telah sesuai dan telah melakukan pemeriksaan terhadap minimal 1 kapal perikanan per hari. Selain itu terdapat Unit Reaksi Cepat (URC) di Pangkalan PSDKP Batam dan Jakarta yang telah melakukan kegiatan pengawasan dengan target penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL).

Evaluasi dan analisis pada **IKU4 Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP** diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 3 (Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan parasaran Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan)**, yaitu:

#### 4) INDEKS KESIAPAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU4	Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100
		2024	100	100	100
		<b>2025</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Target Indeks kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup Pangkalan PSDKP Batam merupakan penggabungan dengan Persentase prasarana dan perawatan prasarana dan sarana yang selsaikan serta persentase pemeliharaan dan perawatan prasaran dan sarana pengawasan SDKP. Target Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP tahun 2025 sebesar 80 dan tercapai 100.

Penghitungan kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang merupakan salah satu faktor pendukung utama keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk memastikan kapal pengawas dapat beroperasi sesuai rencana patroli tanpa hambatan berarti. Adapun aspek-aspek penting pemenuhan kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan kapal pengawas meliputi, BBM, pelumas, air bersih, serta ongkos angkut BBM. Pada tahun 2025 anggaran dukungan logistik kapal pengawas sebesar Rp. 7.258.754.000. Pagu anggaran ini mengalami penambahan nilai dari dibukanya blokir anggaran sebesar Rp. 551.361.000 sehingga nilai anggaran yang menjadi pagu efektif menjadi Rp. 7.810.115.000. untuk realisasi anggaran dukungan logistik kapal pengawas pada tahun 2025 sebesar Rp. **8,198,601,852 (84.47 %)**. Selain itu terdapat anggaran penyediaan logistik lainnya bagi awak kapal pengawas yang mencakup belanja penambahan daya tahan tubuh, biaya delegasi, biaya jaga sandar, dan natura dimana nilai pada anggaran ini sebesar Rp. 1.335.347.000. Pada Tahun 2025 anggaran ini mengalami pengurangan nilai blokir anggaran sebesar Rp. 141.072.000 sehingga pagu efektif yang tersedia sebesar Rp. 1.194.275.000. dan terdapat penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 5.340.000 sehingga pagu efektif pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.199.615.000.

Pada pertengahan bulan terdapat penambahan anggaran kembali sebesar Rp. 62.914.000 sehinga pagu efektif akhir di tahun 2025 sebesar Rp.1,262.529.000 di

mana realisasi akhir sebesar **Rp. 1,262,525,826 (100.00%)**. Hal ini karena kebutuhan logistik pada Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP seluruhnya telah terpenuhi, baik BBM, Pelumas, Air, ATK, senjata dan amunisi. Kemudian atas pemenuhan tersebut telah disusunnya dokumen-dokumen laporan atas pemenuhan logistik tersebut oleh kapal pengawas sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Jumlah armada yang dirawat 15 unit yang terdiri dari 2 unit kapal pengawas dan 11 unit speedboat 2 unit reaksi cepat 1 raberboot. Perawatan sarana terdiri dari perawatan pencegahan (preventive maintenance), perawatan prediktif (predictive maintenance) dan perawatan darurat (breakdown maintenance) untuk sarana yang telah melakukan perawatan dapat di lihat pada table di bawah. Perawatan Pencegahan di bulan Oktoberi 2025 yang terlaksana dengan 13 unit Armada 2 Kapal Pengawas dan 11 Speedboat (Batam, Palembang, bangka, anambas, natuna, karimun, moro, dan tanjung pinang).

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
1.	Hiu 03	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan Darurat
2.	Hiu 17	Melakuan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
3.	Hiu Biru 01	Melakuan Perawatan Pencegahan	Melakukan Perawatan darurat	Melakukan Perawatan darurat

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
4.	Hiu Biru 02	Melakukan Perawatan Pencegahan	Melakukan Perawatan darurat	Melakukan Perawatan darurat
5.	Napoleon 15	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
6.	Napoleon 35	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
7.	Napoleon 16	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Belum Melaksanakan Kegiatan
8	Dolphin 18	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
9	Dolphin 15	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
10	Dolphin 24	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
11	Dolphin 08	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
12	Rigid Inflatable Boat (RIB) Anambas	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
13	Rubber Boat Sadai Bangka	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat

Perawatan Pencegahan di bulan November 2025 yang terlaksana 13 unit Armada dengan 2 Kapal Pengawas, 9 Speedboat dan 2 Unit Reaksi Cepat 1 RIB 1 Rubber (Batam, Palembang, Bangka, Natuna, Moro, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Jabung, Tanjung Pinang, Belitung, dan Anambas ).

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
1.	Hiu 03	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
2.	Hiu 17	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
3.	Hiu Biru 01	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
4.	Hiu Biru 02	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
5.	Napoleon 27	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
6.	Napoleon 35	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
7.	Napoleon 15	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
8	Napoleon 16	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
9	Dolphin 18	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
10	Dolphin 15	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
11	Dolphin 24	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
12	Dolphin 23	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
13	Dolphin 08	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
14	Rigid Inflatable Boat (RIB) Anambas	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
13	Rubber Boat Sadai Bangka	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat

Perawatan Pencegahan di bulan Desember 2025 yang terlaksana 13 unit Armada dengan 2 Kapal Pengawas, 9 Speedboat dan 2 Unit Reaksi Cepat 1 RIB 1 Rubber (Batam, Palembang, Bangka, natuna, moro, tanjung balai karimun, tanjung jabung, tanjung pinang, belitung, dan anambas).

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
1.	Hiu 03	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
2.	Hiu 17	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
3.	Hiu Biru 01	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
4.	Hiu Biru 02	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
5.	Napoleon 27	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
6.	Napoleon 35	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
7.	Napoleon 15	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
8	Napoleon 16	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
9	Dolphin 18	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
10	Dolphin 15	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
11	Dolphin 24	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
12	Dolphin 23	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
13	Dolphin 08	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat
14	Rigid Inflatable Boat (RIB) Anambas	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
13	Rubber Boat Sadai Bangka	Melakukan Perawatan Pencegahan	Belum Melaksanakan Kegiatan	Melakukan Perawatan darurat

Jumlah pagu anggaran perawatan Rp. 1.966.520.000 namun dikarenakan blokir anggaran sebesar Rp. 333.701.000 sehingga pagu efektif pada anggaran ini menjadi Rp.1.632.819.000. Realisasi anggaran sampai dengan pada tahun 2025 sebesar **Rp.1,632,755,891 (100.00%)**. Penggunaan anggaran dipakai untuk belanja barang kebutuhan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas karena perawatan sarana dan prasarana dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu untuk perawatan kapal dan speedboat pengawas pasti dilakukan sebab ada perawatan rutin yang harus dilakukan agar unit-unit tersebut siap beroperasi.

Evaluasi dan analisis pada **IKU5 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan** diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 4 (Terselenggara intelijen kelautan dan perikanan secara efektif)** yaitu:

#### 5) NILAI KUALITAS OPERASI INTELIJEN KELAUTAN

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU5	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	100	100	100,00
		<b>2025</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>120,00</b>

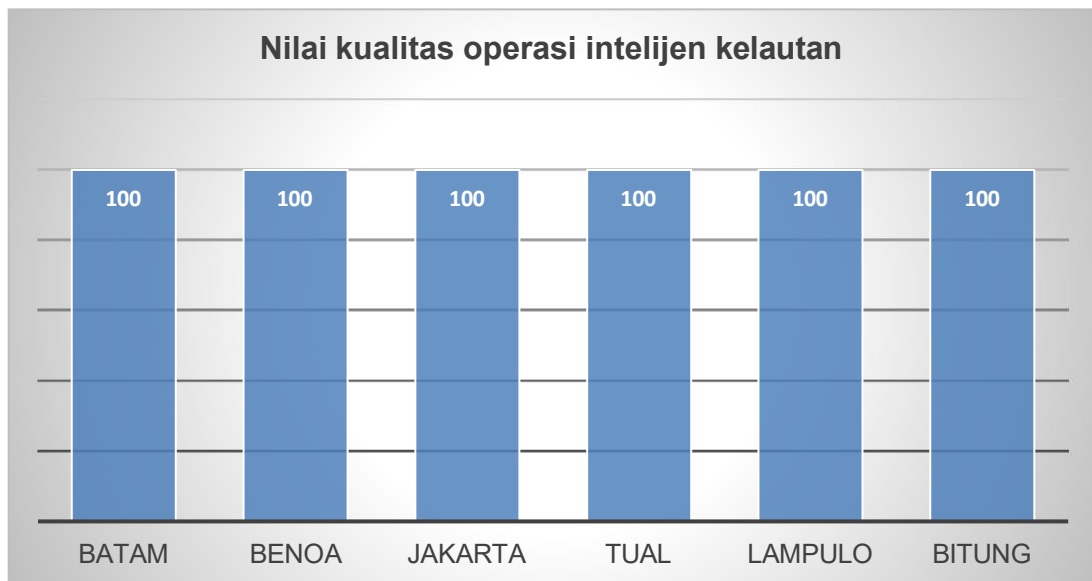
Pada tahun 2025, ada perubahan IKU yang awalnya persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan menjadi Nilai kualitas operasi intelijen kelautan. Target nilai kualitas operasi intelijen kelautan 100% dan tercapai 100%. Kegiatan pada indikator ini merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Sumber dalam kegiatan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Dalam penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan harus sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Tercapainya target ini dikarenakan seluruh informasi maupun aduan yang disampaikan kepada Pangkalan PSDKP Batam dalam bidang pengelolaan sumber daya kelautan telah selesai ditindaklanjuti yaitu adanya pelanggaran berupa pemanfaatan ruang laut dan reklamasi. Kegiatan intelijen pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
1	16-19 September 2025	PT. Growa Indonesia dan PT. Sinar Singkep Sejahtera	Kabupaten Lingga	Terindikasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tidak memiliki	Telah ditindaklanjuti oleh Polsus PWP3K dan telah dalam tahap pengenaan sanksi

				Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang ditetapkan	administratif berupa denda (sudah dibayar)
2	2-4 Oktober 2025	PT Mitra Dok Perkasa	Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Dura, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau	Terindikasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tidak memiliki Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang ditetapkan	Telah ditindaklanjuti oleh Polsus PWP3K dan telah dalam tahap pengenaan sanksi administratif berupa denda (sudah dibayar)

Perusahaan diatas terbukti belum memiliki perizinan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPR. Sebagai penunjang kegiatan ini pada triwulan II sebagian anggaran belanja dipergunakan untuk pembelian *Arcgis Online* untuk menunjang kegiatan intelijen kelautan. Adanya pengaduan yang harus ditindaklanjuti yang membutuhkan informasi yang akurat, sehingga kegiatan intelijen dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Pagu anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp20.505.000,- dan telah terealisasi sebesar **Rp 20.500.250,- atau 99,98%**. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2025 sama dengan Pangkalan Lampulo, Jakarta, Bitung, Bena, dan Tual yaitu 100%. Karena terselesaikannya kegiatan tindak lanjut atas hasil aduan, informasi dan data bidang kelautan sehingga dilakukannya kegiatan pengawasan sampai dengan peneraan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

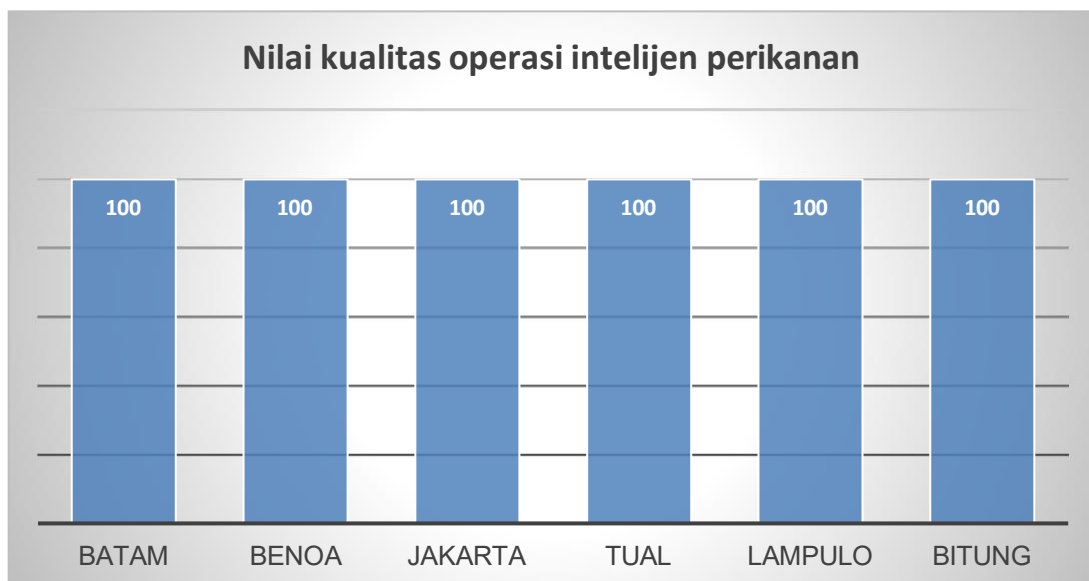
Evaluasi dan analisis pada **IKU6 Nilai kualitas operasi intelijen perikanan** diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 4 (Terselenggara intelijen kelautan dan perikanan secara efektif)** yaitu:

## 6) NILAI KUALITAS OPERASI INTELIJEN PERIKANAN

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU6	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100	100	100,00
		<b>2025</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>100,00</b>

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Batam mendapatkan target Nilai kualitas operasi intelijen perikanan sebesar 100. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan ditentukan berdasarkan nilai rata – rata kualitas tahapan operasi intelijen perikanan dan nilai respon operasi intelijen perikanan.

Pagu anggaran untuk intelijen perikanan pada tahun 2025 awalnya sebesar Rp. 61.790.000,- namun pasca efisiensi menjadi 0, sehingga sampai saat ini belum ada realisasi anggaran. Sesuai deskripsi indikator kinerja pengawasan sumber daya perikanan tahun 2025 poin 10, dalam hal pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas operasi intelijen perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan, sehingga capaian Nilai kualitas operasi intelijen perikanan pada tahun 2025 adalah sebesar 100, sama dengan capaian pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Diharapkan pada tahun berikutnya, Pangkalan PSDKP Batam bisa mendapatkan anggaran untuk kegiatan intelijen perikanan sehingga lebih banyak informasi yang bisa diperoleh dalam rangka kegiatan pengawasan sumber daya perikanan.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2025 sama dengan Pangkalan Lampulo, Jakarta, Bitung, Benoa, dan Tual yaitu 100%. Hal tersebut mendandakan semua UPT mempunyai komitmen dalam pengumpulan data yang akurat untuk kegiatan pengawasan SDKP.

Evaluasi dan analisis pada IKU7 **Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan** diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 5 (Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan)** yaitu:

#### 7) NILAI KUALITAS PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU7	Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100	100	100,00
		<b>2025</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>

Pada tahun 2025 ada perubahan IKU yang awalnya nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan me Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan. Capaian Nilai Kualitas pengawasan sumber

daya perikanan tahun 2025 sebesar 100 dan tercapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan personil Polsus WP3K sehingga memaksimalkan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan. Selain itu adanya kegiatan pengawasan dengan instansi terkait juga mendukung pencapaian ini. Pengawasan dilakukan terhadap 16 Pelaku usaha Pulau-Pulau Kecil, 169 Pelaku usaha ruang laut, 2 Pelaku usaha wilayah pesisir, 5 Pelaku usaha pencemaran sumber daya kelautan, 10 Pelaku usaha wisata tirta lainnya, 1 Pelaku usaha pemanfaatan wilayah konservasi, 2 Pelaku usaha ikan dilindungi, 1 Pelaku Usaha BMKT, dan 2 pelaku usaha ALSE. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan sudah melebihi target. Hal ini disebabkan banyaknya pengaduan dan pengawasan yang dilakukan.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan tahun 2025 terbentuk dari beberapa komponen, antara lain:

**a) Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPRL)**

Pengawasan pemanfaatan Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan memiliki dokumen PPKPRL dan kesesuaian terhadap kegiatan pemanfaatannya. Terhadap perbandingan capaian indikator kinerja utama dilaksanakan pengawasan dengan realisasi per triwulan. Berikut data pengawasan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut pada tahun 2025:

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
1	6 Februari 2025	PT. Vesinter Indonesia	Jl. Raya Telaga Punggur No. 8 Punggur Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam	Sudah memiliki perizinan berusaha lengkap	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
2	11 Maret 2025	PT. Batamas Puri Permai (40,91 Ha)	Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Patuh
3	11 Maret 2025	PT. Batamas Puri Permai (4,56 Ha)	Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Patuh
4	11 Maret 2025	PT. Kelong Wisata Senggarang	Senggarang Besar, Desa/Kelurahan Senggarang, Kec. Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Berdasarkan hasil pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang laut di PT. Kelong Wisata Senggarang di atas bahwa tidak ada indikasi pelanggaran, namun diberikan rekomendasi untuk dapat berkoordinasi kepada pihak BPSPL Padang Wilker Tanjungpinang untuk konsultasi terhadap pengelolaan pemanfaatan ruang laut.	Patuh
5	18 Februari 2025	PT Belitung Permai Lestari	Jl. Patimura RT.09 RW.05 Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kab. Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
6	19 Februari 2025	PT Resor Pantai Belitung	Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kab. Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
7	13 Maret 2025	PT. Indoprisma Karisma Jaya	Des. Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut,	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Kab. Natuna, Prov. Kepri.		
8	13 Maret 2025	PT Multi Mineral Indonesia	Kelarik, Des. Air Mali, Kec. Bunguran Utara, Kab.Natuna	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
9	13 Maret 2025	PT. Mineral Bumi Khatulistiwa	Des. Kelarik, Kec. Bunguran Utara, Kab.Natuna	Belum ada kegiatan atau belum di bangun	Patuh
10	11 Maret 2025	PT. Megah Bangun Sejahtera	Kel. Bengkong Laut, Kec. Bengkong, Kota Batam	Terindikasi melaksanakan reklamasi tanpa dilengkapi dengan izin	Denda
11	29 April 2025	PT Andalan Intiagro Indonesia	Desa Dukong, Kec. Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
12	30 April 2025	CV Surya Tambak Lestari	Desa Dukong, Kec. Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
13	14 Mei 2025	PT Leebong Octa Samasta	Pulau Klebong, Desa Lasar, Kec. Membalong, Kab. Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
14	27 Mei 2025	PT. BSSTEC	Pulau Nipah Jembatan II, Barelang, Kel. Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam	Telah melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan perizinan yang dimiliki	Patuh
15	5 Juni 2025	PT. Tritunas Sinar Benua (Pulau Nirup)	Pulau Nirup, Kel. Sekanak Raya, Kec. Belakang	Telah melakukan kegiatan berusaha sesuai perizinan dan	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Padang, Kota Batam	perizinan berusaha sudah lengkap	
16	15 April 2025	Suriadi	Pulau Nguan, Kel. Galang Baru, Kec. Galang, Kota Batam	Tidak ditemukan dugaan perusakan atau pelanggaran di bidang pemanfaatan ruang laut	Patuh
17	21 Mei 2025	PT. Cipta Persada Mulia	Perairan Kepulauan Riau	Tidak ditemukan dugaan perusakan atau pelanggaran di bidang pemanfaatan ruang laut	Patuh
18	17 Juni 2025	PT. Horizon Bandar Bahru	Batam View Beach Resort, Jl. Hang Lekir, RT.000 RW.000,Desa/Kelurahan Sambau, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan perizinan yang tertera pada PKKPR	Patuh
19	18 Juni 2025	PT. Teguh Cipta Pratama (Montigo Resort)	Jl. Hang Lekir, Nongsa - Batam	Dipersiapkan untuk membuat laporan tahunan dan direkomendasikan untuk mengurus perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	Patuh
20	16 Juni 2025	PT. Merah Putih Petro Gas	Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang Kota Batam	Segera membuat laporan tahunan PKKPR, jika sudah membuat laporan harap konfirmasi ke Pangkalan PSDKP aBatam	Patuh
21	16 Juni 2025	PT. Multi Auto Protect	Pulau Nipah, Kel. Setokok,	Belum Ada Kegiatan	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Kec. Bulang Kota Batam		
22	16 Juni 2025	PT. Multi Auto Protect	Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang Kota Batam	Belum Ada Kegiatan	Patuh
23	30 Mei 2025	Wisma Miranti	Kampung Tengah, Letung, Kec. Jemaja, Kab. Kep. Anambas	Belum membuat dan menyampaikan laporan tahunan	Teguran tertulis
24	2 Juni 2025	PT. Jaya Laut Siantan	Desa Air Sena, Kec. Siantan Tengah, Kab. Anambas	Belum membuat dan menyampaikan laporan tahunan	Teguran tertulis
25	2 Juni 2025	PT. Jaya Laut Siantan	Desa Air Sena, Kec. Siantan Tengah, Kab. Anambas	Belum membuat dan menyampaikan laporan tahunan	Teguran tertulis
26	2 Juni 2025	Dodo	Desa Tarempa Barat	Belum membuat dan menyampaikan laporan tahunan	Teguran tertulis
27	2 Juni 2025	Dodo	Desa Air Sena, Kec. Siantan Tengah, Kab. Anambas	Belum membuat dan menyampaikan laporan tahunan	Teguran tertulis
28	2 Juni 2025	Dodo	Desa Air Sena, Kec. Siantan Tengah, Kab. Anambas	Belum membuat dan menyampaikan laporan tahunan	Teguran tertulis
29	24 Juni 2025	PT Sumber Alam Antarnusa	Desa Limbongan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Pelaku usaha belum membuat laporan tahunan, tidak ada indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Teguran tertulis

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
30	25 Juni 2025	PT Prima Bundiarta Nusa	Desa Limbongan, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	Pelaku usaha terlambat dan belum membuat laporan tahunan, tidak ada indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Teguran tertulis
31	17 Juni 2025	PT Multi Ocean Shipyard	Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab.Tanjung Balai Karimun Prov. Kepri	Agar Menyampaikan Laporan Tahunan 2023	Teguran tertulis
32	19 Juni 2025	PT Karimun Marine Shipyard	Jl. PT_Mutiara RT. 002 RW.002 Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab.Tanjung Balai Karimun Prov. Kepri	Agar Menyampaikan Laporan Tahunan 2024 Sebelum 18 Desember 2025	Teguran tertulis
33	23 Juni 2025	PT. Karimun Granit	Pasir Panjang Kecamatan Meral Kab.Tanjung Balai Karimun Prov. Kepri	Agar Menyampaikan Laporan Tahunan 2022	Teguran tertulis
34	25 Juni 2025	PT. Surya Freshindo Intimas	Jl.Nusantara Kel Tanjung Balai Kota Kec.Karimun Kab.Karimun Prov. Kepri	Agar Menyampaikan Tanda Terima Laporan Tahunan 2023	Teguran tertulis
35	25 Juni 2025	PT. Lautan Fishery Natuna	Tanjung Kumbik Utara, Desa. Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Kab. Natuna, Prov.	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Kepulauan Riau.		
36	25 Juni 2025	PT. Neptuna Dwindo Matrina	Selat Lampa, Desa. Sabang Mawang Barat, Kec. Pulau Tiga, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
37	5 Mei 2025	PT. Kreasi Prima Sejati (Insidental)	Desa Air Bili, Kuala Maras, Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas	Pemanfaatan ruang laut berupa dermaga bongkar muat pendukung usaha AMP tanpa PKKPR dan izin reklamasi	Denda
38	19 Mei 2025	PT. Karya Teknik Utama (Insidental)	Perairan Sagulung, Kota Batam	Terdapat indikasi pelaksanaan reklamasi seluas 2.775,81 m2 dan dokumen PKKPR sedang dalam proses pengurusan	Denda
39	26 Mei 2025	PT. Citra Shipyard (Insidental)	Kabil, Batu Besar dan Sagulung, Batu Aji	Belum memiliki PKKPR dan direkomendasikan untuk segera mengurus dokumen PKKPR	Denda
40	19 Mei 2025	PT. Citra Semarak Sejati (Insidental)	Desa Tanjung Irat, Dusun Cukas, Singkep Barat, Kab. Lingga	PT. CSS telah melaksanakan penilaian teknis PKKPR pada tahun 2024. Rekomendasi dipanggil untuk dimintai keterangan terkait reklamasi jetty	Denda
41	27 Mei 2025	PT. House Seafood Indonesia (Insidental)	Perairan Pulau Nipah, Jembatan II,	PT. House Seafood Indonesia melakukan usaha tanpa dilengkapi dengan	Teguran tertulis

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Kel Setokok, Kota Batam	PKKPRL dan saat ini sudah diajukan (Submit) menunggu proses verifikasi	
42	5 Juni 2025	PT. MCCS International Indonesia (Insidental)	Teluk Lengkung, Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam	Terdapat lahan reklamasi tanpa dilengkapi dengan PKKPRL dan tanpa izin Pelaksanaan reklamasi	Denda
43	8 Juli 2025	PT. Cipta Rezeki Kita Bersama	Desa/Kelurahan Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Kegiatan usaha belum berjalan	Patuh
44	11 Juli 2025	PT. Batamraya Sukses Perkasa	Pulau Tanjung Sauh, Kec. Ngenang, Nongsa, Kota Batam	Tidak ditemukan dugaan perusakan atau pelanggaran di bidang pemanfaatan ruang laut	Patuh
45	11 Juli 2025	PT. Pasifik Estatindo Perkasa	Kec. Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau	Perusahaan belum melakukan aktivitas usaha dan dalam proses persiapan serta pemenuhan perizinan. Telah dikenakan SP 1 Terkait laporan tahunan PKKPRL	Teguran tertulis
46	16 Juli 2025	PT. Bakota Selat Mutiara	Tanjung Pinggir, Kota Batam, Kepulauan Riau	Kegiatan usaha belum berjalan	Patuh
47	18 Juli 2025	PT. Bukit Pantai Abadi	Pantai Dangas, Sekupang	Kegiatan usaha belum berjalan. Telah dikenakan SP 1 Terkait laporan tahunan PKKPRL	Teguran tertulis

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
48	22 Juli 2025	PT. Samudra Inti Persada	Tanjung Pinggir, Sekupang Kota Batam, Kepulauan Riau	Pelaku usaha taat terhadap peraturan terkait hak dan kewajiban. Direkomendasikan untuk dapat mengurus perizinan berusaha lainnya terkait kegiatan berusaha. Telah dikenakan SP 1 Terkait laporan tahunan PKKPR	Teguran tertulis
49	31 Juli 2025	PT. SMOE Indonesia	Desa/Kelurahan Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Kegiatan usaha belum berjalan	Patuh
50	10 September 2025	PT. Wasco Resources Indonesia	Pulau Tanjung Sauh, Kec. Ngenang, Nongsa, Kota Batam	Tidak ditemukan dugaan perusakan atau pelanggaran di bidang pemanfaatan ruang laut	Patuh
51	25 September 2025	PT. Gahara Samudera Berlian	Pantai Panau, Kota Batam	Telah dikenakan SP 1 dan SP 2 terkait laporan tahunan PKKPR	Teguran tertulis
52	29 Juli 2025	CV Beltim Sukses Mandiri	Desa Dukong, Kec. Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
53	29 Juli 2025	CV Belitong Jaya Vaname	Desa Tanjung Kelumpang, Kec. Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
54	30 Juli 2025	PT Dipon Putra Jaya	Desa Tanjung Kelumpang, Kec. Simpang	Tidak ada indikasi Pelanggaran	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Pesak, Kab. Belitung Timur	pemanfaatan ruang laut	
55	3 September 2025	PT Island Connections Belitung	Pulau Kalimambang, Desa Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
56	11 September 2025	PLTU Suge (PT PLN Persero)	Dusun Suge, Desa Pegantungan, Kec. Badau Kabupaten Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
57	1 Juli 2025	Dodi (Bintan Dive 1 dan Bintan Dive 2)	Jl. Pantai Trikora Kp. Bopeng, Desa/Kelurahan Teluk Bakau, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan	Tidak ditemukan pelanggaran dalam kegiatan usaha	Patuh
58	1 Juli 2025	Heng Ho Min	Desa/Kelurahan Desa Teluk Bakau, Kec. Gunung Kijang, Kabupten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	Tidak ditemukan pelanggaran dalam kegiatan usaha	Patuh
59	1 Juli 2025	PT. Diwa Indonesia Jaya (Black Coral)	Desa/Kelurahan Desa Teluk Bakau, Kec. Gunung Kijang, Kabupten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	Tidak ditemukan pelanggaran dalam kegiatan usaha	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
60	16 Juli 2025	PT. Harmoni Samudra Perkasa	Selat Riau, Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	Realisasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan izin PKKPR yang dimiliki. Rekomendasi dilakukan pengawasan rutin minimal sekali dalam setahun	Patuh
61	16 Juli 2025	PT. Bintang Permata Beach Resort	Jalan Pantai Impian, Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat	Tidak ditemukan kerusakan dan pelanggaran. Kegiatan berusaha telah sesuai dengan izin PKKPR	Patuh
62	16 Juli 2025	PT. Bumi Citra Patra	Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	Tidak ditemukan kerusakan dan pelanggaran. Kegiatan berusaha telah sesuai dengan izin PKKPR	Patuh
63	16 Juli 2025	PT. Mina Laguna Indah	Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau	PT Mina Laguna Indah belum menyampaikan laporan tertulis secara berkala tentang pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.	Teguran tertulis
64	1 Juli 2025	PT. Kampong Teripang Indonesia	Jl. Pantai Trikora Kp. Bopeng, Desa/Kelurahan Teluk Bakau, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan	Belum mengurus ijin lokasi di KKPD Bintan Timur	Patuh
65	25 Juli 2025	PT. Apnal Makmur Jaya	Barek Motor, Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Sudah mengupload laporan tahunan	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
66	25 Juli 2025	Salikin	Barek Motor, Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Sudah mengupload laporan tahunan	Patuh
67	25 Juli 2025	Sudirman 1	Gg. Murni Barek Motor, Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Belum memiliki TUKS	Patuh
68	25 Juli 2025	Agus	Perumnas Tekojo, Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Sudah mengupload laporan tahunan	Patuh
69	25 Juli 2025	Nicky Chandra	Barek Motor, Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Belum memiliki TUKS	Patuh
70	25 Juli 2025	Suratman	Kp. Sidodadi Selatan, Desa/Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan	Belum memiliki ijin TUKS	Patuh
71	28 Juli 2025	Hendro	Barek Motor, Desa/Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan,	Sudah mengupload laporan tahunan	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Provinsi Kepulauan Riau		
72	28 Juli 2025	Sudirman 2	Gg. Murni Barek Motor, Desa/Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Lokasi belum di fungsikan	Patuh
73	28 Juli 2025	Candra	Kp. Melayu Keke RT. 004/011, Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Sudah Mengupload Laporan Tahunan, Lokasi Belum Ada Aktivitas	Patuh
74	28 Juli 2025	Lay Huat	Kp. Jati, Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Sudah Membuat Laporan Tahunan	Patuh
75	28 Juli 2025	Herman	Kp. Baru Keke, Desa/Kelurahan Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Sudah Membuat Laporan Tahunan	Patuh
76	1 Juli 2025	Bintan Nemo	Jl. Wisata Bahari Desa/Kelurahan Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Sudah Melaporkan Laporan Tahunan	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
77	5 Agustus 2025	PT. Pulau Cempedak	Desa Kelong Kecamat Bintang Pesisir Kabupaten Bintan	Sudah Melaporkan Laporan Tahunan	Patuh
78	5 Agustus 2025	PT. Pulau Nikoi	Desa Teluk Bakau Kecamat Gunung Kijang Kabupaten	Sudah Melaporkan Laporan Tahunan	Patuh
79	4 Agustus 2025	PT. Pertamina Patra Niaga	Jl.Sei Walang Km.25. Kijang, Kecamatan Bintan Timur	Sudah Melaporkan Laporan Tahunan	Patuh
80	4 Agustus 2025	PT. Solid Petro Indonesia	Jl.Bukit Piatu, Kp.Galang Batang, Desa Gunung Kijang	Sudah Melaporkan Laporan Tahunan	Patuh
81	4 Agustus 2025	PT. Bintang Mahkota Sukses	Jl.Bukit piatu Kp.Galang Batang,Desa Gunung Kijang Kec.Gunung Kijang	sudah melaporkan laporan tahunan	Patuh
82	17 September 2025	PT.Spavilla Wisata Bahari	Jl.Pantai Trikora Km.38 Gunung Kijang,Bintan	Selama kegiatan pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan kerusakan	Patuh
83	2 September 2025	Bintan Hua Lian	Jl.Pantai Trkora km.38 Desa Teluk bakau Kec Gunung kijang Kab.Bintan	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Patuh
84	10 September 2025	PT.Tri Kora Beach Resort	Rt.03/02 Desa Teluk bakau Kec.Gunung Kijang Kab.Bintan,	Tidak ada bangunan di atas air Segera mengurus izin lingkungan AMDAL	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
85	29 Juli 2025	CV Tunas Budidaya Prima	Jalan Raya Pesaren Raya, Dusun Pesaren, Desa/Kelurahan Bintet, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
86	29 Juli 2025	PT Indah Makmur Mandiri	Jalan Raya Pesaren Raya, Dusun Pesaren, Desa/Kelurahan Bintet, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
87	29 Juli 2025	CV Beting Tambak Belijong	Jalan Raya Pesaren Raya, Dusun Pesaren, Desa/Kelurahan Bintet, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
88	29 Juli 2025	CV Nicom Inti Prima	Jalan Raya Pesaren Raya, Dusun Pesaren, Desa/Kelurahan Bintet, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
89	29 Juli 2025	PT Mulia Era Nusa	Jalan Raya Pesaren Raya, Dusun Pesaren, Desa/Kelurahan Bintet, Kec. Belinyu, Kab.	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
90	29 Juli 2025	PT Gilang Bahari Unggul	Jl. Romodong, Desa/Kelurahan Remodong Indah, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
91	29 Juli 2025	CV Karunia Makmur Lestari	Jalan Raya Pesaren Raya, Dusun Pesaren, Desa/Kelurahan Bintet, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
92	30 Juli 2025	CV Mavindo Karya Lestari	Dusun Bintet, Desa/Kelurahan Bintet, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
93	30 Juli 2025	PT Budidaya Tropis Indopersada	Desa Bintet dan Desa Gunung Pelawan, Desa/Kelurahan Bintet, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
94	30 Juli 2025	PT Sumber Alam Segara	Jl. Dusun Pejem, Desa/Kelurahan Gunung Pelawan, Kec.	Tidak ada indikasi Pelanggaran	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	pemanfaatan ruang laut	
95	30 Juli 2025	CV Jaya Makmur Sjahtra	Lingkungan Bantam, Desa/Kelurahan Bukit Ketok, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
96	30 Juli 2025	PT Laut Pesaren Berkah	Dusun Pesaren Pantai, Desa/Kelurahan Bintet, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
97	30 Juli 2025	UD Tambak Udang Haris Susanto	Jl. Lingkungan Romodong, Desa/Kelurahan Romodong Indah, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
98	31 Juli 2025	PT Belinyu Lancar Bersama	Lingkungan Bantam, Desa/Kelurahan Bukit Ketok, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
99	31 Juli 2025	PT Pelangi Agro Sentosa	Dusun Bantam, Desa/Kelurahan Bukit Ketok, Kec. Belinyu, Kab.	Tidak ada indikasi Pelanggaran	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	pemanfaatan ruang laut	
100	31 Juli 2025	PT Garaya Mandiri Sentosa	Jl. Romodong, Desa/Kelurahan Remodong Indah, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
101	31 Juli 2025	CV Sumber Hatchery Bangka	Dusun Tuing, Desa/Kelurahan Mapur, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
102	31 Juli 2025	PT Sumber Alam Mapur Mandiri	Dusun Mapur, Desa/Kel. Mapur, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
103	31 Juli 2025	PT Tambak Mitra Sekawan	Jalan Raya Dusun Mengkubung, Desa/Kel. Riding Panjang, Kec. Belinyu, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
104	1 Agustus 2025	CV Tempilang Unggul Sejahtera Abadi	Dusun Batu Tunggul, Desa/Kel. Riding Panjang, Kec. Merawang, Kab. Bangka, Provinsi	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Kepulauan Bangka Belitung		
105	1 Agustus 2025	Budidaya Tambak Udang	Dusun Rebo, Desa/Kelurahan Rebo, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
106	4 Agustus 2025	PT Bulan Bahari Digdaya	Jalan Tanjung Pura, Dusun Aik Biat, Desa/Kel. Penagan, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
107	4 Agustus 2025	Hendri	Jalan Tanjung Pura, Dusun Aik Biat, Desa/Kel. Penagan, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
108	4 Agustus 2025	CV Mahligai Putri Uno	Jalan Tanjung Pura Penagan, Desa/Kel. Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
109	4 Agustus 2025	Bunyamin	Desa Penagan, Desa/Kelurahan Penagan, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka,	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
110	5 Agustus 2025	PT Putra Bangka Tambak	Desa Penagan, Desa/Kelurahan Penagan, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
111	5 Agustus 2025	PT Nusantara Veritas Trinitas	Jalan Pon Pasir, Desa/Kelurahan Penagan, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
112	5 Agustus 2025	PT Putra Bangka Tambak	Desa Penagan, Desa/Kelurahan Penagan, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
113	26 Agustus 2025	CV.Gabion Indah	Jl. Nusantara Nomor 45, Kelurahan Tanjungbalai Kota, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Provinsi Kepri	Tidak Terdapat Indikasi Pelanggaran Subjek Hukum KKPRL Sesuai dan Terpenuhi	Patuh
114	26 Agustus 2025	Jono	Baran Satu Meral, Desa Baran Timur, Kec. Meral, Kab.	Tidak Terdapat Indikasi Pelanggaran Subjek Hukum KKPRL Sesuai dan Terpenuhi	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Karimun, Provinsi Kepri		
115	28 Agustus 2025	PT. Karimun Karya Mandiri	Jl.Pelabuhan Roro Parit Rampak, Kel. Parit Benut, Kec. Meral, Kab. Karimun, Provinsi Kepri	Terdapat Indikasi Area Pemanfaatan Ruang laut untuk Pembangunan Dermaga/Jety berada diluar Area PKKPR L terbit yang dimiliki oleh PT.Karimun Karya Mandiri	Patuh
116	16 September 2025	PT. Abe Lapan Lapan	Jalan Kampung Baru Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau	Tidak Terdapat Indikasi Pelanggaran Subjek Hukum KKPRL Sesuai dan Terpenuhi	Patuh
117	16 September 2025	PT. Bukit Alam Persada	Bukit Jambang, Desa Pangke Barat Kec. Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau	Terdapat Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan Loading dan Area sandar Tongkang di Luar Area PKKPR L Terbit yang dimiliki PT.BUKIT ALAM PERSADA	Patuh
118	23 Juli 2025	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang	Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel	- Pembangunan pelabuhan Palembang baru masih berproses - Tidak menimbulkan konflik terhadap masyarakat - Tidak ditemukan pelanggaran	Patuh
119	3 Juli 2025	PT. Island Connection International	Telunas, Dusun Mentangun, Kab. Karimun	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran Kegiatan usaha sudah berjalan sesuai dengan perizinan	Patuh
120	4 Agustus 2025	Laluna Resto (Ruben)	Jl. Hang Tuah, Kel. Tarempa,	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anambas	laut sudah sesuai dengan dokumen PKKPR	
121	4 Agustus 2025	PT. Malaka Abadi	Jl. Imam Bonjol, Desa Tarempa	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut sudah sesuai dengan dokumen PKKPR	Patuh
122	5 Agustus 2025	Gudang Toko Mulia (Oliver Quesirin)	Jl. Hang Tuah, Kel. Tarempa, Kec. Siantan, Kab. Kepulauan Anambas	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut sudah sesuai dengan dokumen PKKPR	Patuh
123	5 Agustus 2025	Kim Fung	Jl. A. Yani Laut, Desa Tarempa Barat	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut sudah sesuai dengan dokumen PKKPR	Patuh
124	5 Agustus 2025	Steven	Teluk Buluh, Tarempa	Pelaku usaha dihimbau segera membuat laporan tahunan kegiatan pemanfaatan ruang laut	Teguran Tertulis
125	23 Juli 2025	PT. Asa Tata Mardivka (Insidental)	Pulau Citlim, Desa Buluh Patah, Kecamatan Sugi Besar, Kabupaten Karimun	Terindikasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa rekomendasi dan pemanfaatan ruang laut tanpa PKKPR	Tidak Patuh
126	1 Oktober 2025	Nina Marlina	Nongkat island, kepulauan anambas	Tidak ada indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut	Patuh
127	1 Oktober 2025	Nina Marlina	Nongkat island, kepulauan anambas	Tidak ada indikasi Pelanggaran	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
				Pemanfaatan Ruang Laut	
128	17 Oktober 2025	PT. Air Sene Jaya	Desa Air Sena, Palmatak, Air Asuk, Siantan, Anambas	Tidak ada indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut	Patuh
129	17 Oktober 2025	PT. Air Sene Jaya	Desa Air Sena, Palmatak, Air Asuk, Siantan, Anambas	Tidak ada indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut	Patuh
130	17 Oktober 2025	Maria Mui	Desa Air Sena, Kec. Siantan Tengah, Kab. Anambas	Tidak ada indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut	Patuh
131	13 November 2025	Dodo	Desa Air Sena, Kec. Siantan Tengah, Kab. Anambas	Tidak ada indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut	Patuh
132	13 November 2025	Dodo	Desa Air Sena, Kec. Siantan Tengah, Kab. Anambas	Tidak ada indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut	Patuh
133	17 November 2025	Ahmad	JL.Batu Berapit,Tarempa Barat. Anambas	Tidak ada indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut	Patuh
134	17 November 2025	Diana Herlina	JL. Takari Atas, Tarempa Barat.Anambas	Tidak ada indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut	Patuh
135	6 Oktober 2025	RM Natuna Food	Desa/Kelurahan Sepempang, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna	Tidak terdapat indikasi pelanggaran pada lokasi usaha	Patuh
136	21 Oktober 2025	PT Berkah Akuakultur Bahari	Jln. Gusong Cine Dusun Lidun RT.29,	Tidak ada indikasi Pelanggaran	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Desa Batu Peny, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur	pemanfaatan ruang laut	
137	21 Oktober 2025	PT Tiga Kuda Sakti	Dusun Tanjung Belantu, Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
138	14 November 2025	CV Caltera Nusantara	Desa Tanjung Batu Itam, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
139	28 Oktober 2025	PT. Bintang Inti Industrial Estate	Jl.Jend Sudirman Kav 70-71 Kec Setiabudi Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Selama kegiatan pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan kerusakan	Patuh
140	3 November 2025	Nelly	jl lembah purnama no 1 kel tanjung ayun sakti, tanjung pinang, Kepri	Selama kegiatan pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan kerusakan	Patuh
141	4 November 2025	PT.Bintang Sejahtera Selalu	jl. pantai trikora km 47-km48 kec gunung kijang bintang, Kepri	Selama kegiatan pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan kerusakan	Patuh
142	5 November 2025	PT.Alam Indah Bintang	Ruko Anggrek Mas 2 Blok A2 No. 23, Desa/Kelurahan Taman	Selama kegiatan pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan kerusakan	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
143	5 November 2025	PT. Sarana Transportir Nusantara	Baloi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,	Selama kegiatan pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan kerusakan	Patuh
144	11 November 2025	PT.Majesty Sarana Energi	Kp. Tanjung Kruing, Kp. Tanjung Talok, Desa/Kelurahan Teluk Sasah, Kec. Seri	Selama kegiatan pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan kerusakan	Patuh
145	6 November 2025	PT.Buana Mega Wisata	Jl jendral Sudirman Kav 70-71 Wisma indocement Lt.11 Jakarta Selatan	Selama kegiatan pengawasan tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan kerusakan	Patuh
146	1 Oktober 2025	CV Anugrah Kencana Mandiri	Jalan Air Pumpung, Desa/Kelurahan Kulur Ilir, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut (Belum Melakukan Kegiatan Usaha)	Patuh
147	1 Oktober 2025	CV Tambak Indo Harmonis	Desa Benteng Kota, Desa/Kelurahan Tempilang, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut (Belum Melakukan Kegiatan Usaha)	Patuh
148	1 Oktober 2025	FA Terus Jaya	Desa Benteng Kota, Desa/Kelurahan Tempilang, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat,	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
149	1 Oktober 2025	PT Hokindo Cipta Harmonis	Dusun Jebu Laut, Desa/Kelurahan Kelabat, Kec. Parit Tiga, Kab. Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut (Belum Melakukan Kegiatan Usaha)	Patuh
150	2 Oktober 2025	PT Lestari Alam Selindung	Dusun Selindung, Desa/Kelurahan Air Putih, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
151	1 Oktober 2025	PT Arghani Boga Sejahtera	Desa Tanjung Kerasak, Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kec. Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
152	1 Oktober 2025	PT Chandra Anugerah Aquavindo	Dusun Sungai Gusung, Desa/Kelurahan Rias, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
153	2 Oktober 2025	PT Marian Anugrah Akua	Dusun Permis, Desa/Kelurahan Permis, Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut (Belum Melakukan Kegiatan Usaha)	Patuh
154	2 Oktober 2025	PT Sabang Mitrajaya Abadi	Tanjung Kemirai, Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kec. Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut (Kegiatan Usaha Sudah Pindah Tangan)	Patuh
155	2 Oktober 2025	PT Sumber Berkat Multiartha	Dusun Sungai Gusung, Desa/Kelurahan Rias, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
156	2 Oktober 2025	PT Tommino Inti Bahari	Dusun Merbau, Desa/Kelurahan Tanjung Ketapang, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
157	2 Oktober 2025	PT Kasih Karunia Graha	Dusun Air Tiram, Desa/Kelurahan Tiram, Kec. Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut (Belum Melakukan Kegiatan Usaha)	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Kepulauan Bangka Belitung		
158	1 Desember 2025	PT Billiton Energi Sejahtera	Desa Penutuk, Pulau Lepar, Desa/Kelurahan Penutuk, Kec. Lepar Pongok, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut (Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG))	Patuh
159	4 Desember 2025	PT Alam Lepar Sejahtera	Desa Penutuk, Pulau Lepar, Desa/Kelurahan Penutuk, Kec. Lepar Pongok, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
160	4 Desember 2025	PT Alam Lepar Sejahtera	Desa Penutuk, Pulau Lepar, Desa/Kelurahan Penutuk, Kec. Lepar Pongok, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
161	4 Desember 2025	PT Alam Lepar Sejahtera	Desa Sadai, Desa/Kelurahan Sadai, Kec. Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
162	5 Desember 2025	PT Bukit Lepar Sejahtera	Desa Tanjung Labu, Pulau Lepar, Desa/Kelurahan	Tidak ada indikasi Pelanggaran	Patuh

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Tanjung Labu, Kec. Lepar Pongok, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	pemanfaatan ruang laut	
163	16 Desember 2025	PT Central Proteina Prima	Jalan Komplek Desa/Kelurahan Lubuk Besar, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
164	17 Desember 2025	PT Tambang Jaya Indah	Desa Lubuk Besar, Desa/Kelurahan Lubuk Besar, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
165	17 Desember 2025	PT Walie Tampas Citratama	Desa Perlang, Desa/Kelurahan Perlang, Kec. Lubuk Besar, Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tidak ada indikasi Pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Patuh
166	2-4 Oktober 2025	PT. Mitra Dok Perkasa (Insidental)	Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Dura, Kabupaten Tanjung Balai Karimun,	Terindikasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tidak memiliki Kesesuaian pelaksanaan kegiatan	Denda

No	Tanggal Pengawasan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi Usaha	Hasil Pengawasan	Ket.
			Provinsi Kepulauan Riau	dengan ketentuan yang ditetapkan	
167	16 Oktober 2025	Juliwanto (Insidental)	Jalan Pantai Pak Imam, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.	Terindikasi melakukan pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi dengan perizinan KKPRL dan reklamasi	Tahap BAP
168	22 November 2025	PT. Bintang Lagoon Resort (Insidental)	Jl. Indera Segara Site A12, Sebong Lagoi, Desa/Kel. Sebong Lagoi, Kec. Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Terindikasi melakukan pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi dengan perizinan KKPRL dan reklamasi	Supervisi
169	19 Desember 2025	PT. Pelabuhan Julia Logistik (Insidental)	Jl. Haji Arab, Kel. Sungailakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau	Terindikasi melakukan pemanfaatan ruang laut tanpa dilengkapi dengan perizinan KKPRL dan reklamasi	Tahap BAP

b) **Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan *Pengawasan ikan dilindungi***

Mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, dan

pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES sesuai ketentuan perlindungannya pada taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae dan biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. Data pengawasan jenis ikan dilindungi pada tahun 2025 sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
1	17 Februari 2025	PT. Apnal Makmur Jaya	Jl. Berek Motor RT 002 RW 008, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Kepulauan Riau	Jumlah produk yang dijual ke dalam negeri perkiraan jumlah barang kurang lebih 30,32 kg dengan jenis barang yaitu sirip hiu Macan ( <i>Galeocardo cuvier</i> ), sirip hiu Kacang ( <i>Hemigaleus</i> ), dan sirip hiu Monas ( <i>Hemipristis elongate</i> ).	Patuh
2	6 Maret 2025	UD. Wang-Wang	Jl. Bakar Batu Nomor 21D, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpina	Pari kupu-kupu ( <i>Rhina anchylostoma</i> ) 20 kg (sirip), Pari kemejan ( <i>Rhynchobatus australiae</i> ) 143,21 kg	Patuh

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
			ng, Provinsi Kepulauan Riau	(Sirip) dan 300 kg (daging), dan Pari kikir ( <i>Glaucostegus typus</i> ) 20 kg (sirip).	

c) **Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan Pengawasan Wisata Tirta Lainnya.**

Pengawasan wisata tirta lainnya merupakan sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan wisata berbasis perairan, terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Pengawasan ini mencakup aspek kelayakan sarana dan prasarana, keselamatan wisatawan, izin pemanfaatan ruang laut, serta kepatuhan terhadap pengelolaan limbah dan perlindungan ekosistem perairan. Melalui kegiatan pengawasan yang rutin dan terukur, diharapkan pengelolaan wisata tirta dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan laut dan pesisir. Data pengawasan wisata tirta lainnya pada tahun 2025 sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
1	15 Mei 2025	Leebong Octa Samasta	Pulau Klebong, Desa Lasar, Kec. Membalong,	Tidak ada indikasi pelanggaran	Patuh

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
			Kab. Belitung		
2	5 Juni 2025	PT. Tritunas Sinar Benua	Pulau Nirup, Kel. Sekanak Raya, Kec. Belakang Padang, Kota Batam	Tidak ada indikasi pelanggaran	Patuh
3	17 Juni 2025	PT. Horizon Bandar Bahru (Insidental)	Batam View Beach Resort, Jl. Hang Lekir, RT.000 RW.000, Desa/Kelurahan Sambau, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Menambahkan KBLI Wisata Tirta Lainnya	Patuh
4	18 Juni 2025	PT. Teguh Cipta Pratama (Montigo Resort) (Insidental)	Jl. Hang Lekir, Nongsa - Batam	Pelaku usaha taat terhadap perizinan dan direkomendasikan untuk mengurus rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil	Patuh
5	3 September 2025	Island Connections Belitung	Pulau Kalimambang, Desa Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan, Kab.	Tidak ada indikasi pelanggaran	Patuh

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
			Belitung		
6	1 Juli 2025	Sukarno	JL. WISATA BAHARI , Desa/Kelurahan Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Tidak ada dampak kerusakan lingkungan	Patuh
7	5 Agustus 2025	PT. Pulau Cempedak	Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kab.Bintan	Tidak ada dampak kerusakan lingkungan	Patuh
8	10 September 2025	PT. Bintan Hua Lian	Jl.Pantai Trikora,KM.3 6,Desa/Kel Teluk Bakau Kec.Gunung Kijang	Tidak ada dampak kerusakan lingkungan	Patuh
9	17 September 2025	CV.Madu Tiga	Jl.Wisata Bahari Rt.003/Rw.0 2 Desa Malang Rapat Kec Gunung Kijang	Tidak ada dampak kerusakan lingkungan	Patuh
10	6 November 2025	PT. Alam Indah Bintan	Jl. Panglima Pantar, Lot A1-2-3, Kawasan Wisata Lagoi, Kel. Sebong Lagoi, Kec. Telok	Tidak ada dampak kerusakan lingkungan	Patuh

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
			Sebung, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau		

**d) Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan (Reklamasi)**

Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir fokus pada aktivitas reklamasi dengan kepemilikan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Data pengawasan pengelolaan wilayah pesisir (reklamasi) tahun 2025 sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
1	6 Februari 2025	PT. Vesinter Indonesia	Jl. Raya Telaga Punggur No. 8 Punggur Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota Batam	Dilakukan pendalaman aspek teknis pelaksanaan /operasional reklamasi dengan tim BBSPL Padang yang ada di Batam.	Patuh
2	27 Mei 2025	PT Batam Slop & Sludge Treatment Centre (Insidental)	Pulau Nipah Jembatan II, Barelang, Kel. Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam	Telah dilengkapi surat izin pematangan lahan dari BP Batam	Segera melanjutkan membuat izin reklamasi

e) **Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan Pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil**

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Data pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil tahun 2025 sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
1	15 Mei 2025	Pulau Klebong (PT Leebong Octa Samasta)	Pulau Klebong, Desa Lasar, Kec. Membalong, Kab. Belitung	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Patuh
2	5 Juni 2025	PT. Tritunas Sinar Benua (Pulau Nirup)	Pulau Nirup, Kel. Sekanak Raya, Kec. Belakang Padang, Kota Batam	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Patuh
3	27 Mei 2025	PT Batam Slop & Sludge Treatment Centre (Insidental)	Pulau Nipah Jembatan II, Barelang, Kel. Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam	Belum memiliki perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	Segera mengajukan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil
4	17 Juni 2025	PT. Horizon Bandar Bahru (Insidental)	Batam View Beach Resort, Jl. Hang Lekir, RT.000 RW.000, Desa/Kelura	Belum memiliki perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	Direkomendasikan untuk mengajukan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
			han Sambau, Kec. Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau		
5	18 Juni 2025	PT. Teguh Cipta Pratama (Montigo Resort) (Insidental)	Jl. Hang Lekir, Nongsa - Batam	Belum memiliki perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	Direkomendasikan untuk mengajukan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil
6	20 Agustus 2025	PT Island Connections Belitung (Pulau Kalimantan)	Pulau Kalimantan, Desa Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Patuh
7	3 Juli 2025	Riady A (Pulau Poto)	Galang Batang, Kab. Bintan	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Patuh
8	5 Agustus 2025	Mansud (Pulau Cempedak)	Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan.	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Patuh
9	5 Agustus 2025	Mansud (Pulau Nikoi)	Desa Teluk Bakau Kab, Bintan	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Patuh
10	23 September 2025	Anton (Pulau)	Jl. Bukit Kijang, Galan	Tidak ditemukan	Patuh

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
		Pangkil)	g Batang Gn.Kijang Desa Kelong Kec Bintan Pesisir Kab Bintan	indikasi pelanggaran	
11	3 Juli 2025	Berman Siregar (Pulau Telunas)	Telunas, Dusun Mentangun, Kab. Karimun	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Patuh
12	7 Juli 2025	PT. Dewi Citra Kencana (Pulau Kapal Besar) (Insidental)	Kec. Sekanak Raya, Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Terindikasi melakukan pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa izin	Tidak Patuh, sudah ditetapkan denda
13	7 Juli 2025	PT. Dewi Citra Kencana (Pulau Kapal Kecil) (Insidental)	Kec. Sekanak Raya, Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Terindikasi melakukan pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa izin	Tidak Patuh, sudah ditetapkan denda
14	13 Juli 2025	PT. Jeni Prima Sukses (Pulau Citlim) (Insidental)	Pulau Citlim, Desa Buluh Patah, Kec. Moro, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau	Terindikasi melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa izin	Tahap supervise

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
15	23 Juli 2025	PT. Asa Tata Mardivka (Pulau Citlim) (Insidental)	Pulau Citlim, Desa Buluh Patah, Kec. Moro, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau	Terindikasi melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa izin	Tahap supervise
16	23 September 2025	Pulau Joyo	Jl. Bukit Kijang, Galang Batang Gn. Kijang Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir Kab. Bintan	Direkomendasikan untuk mengajukan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil	Patuh

**f) Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan**

Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan yaitu setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan (yang wajib memiliki izin) di dalam kawasan konservasi perairan. Data pengawasan kawasan konservasi pada tahun 2025 sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
1	13 November 2025	Dodo	Desa Air Sena, Kec. Siantan Tengah, Kab. Anambas	Kegiatan Budidaya di Zona Pemanfaatan Terbatas Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	Zona Pemanfaatan Terbatas

**g) Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)**

Pengelolaan BMKT meliputi pengangkatan dan/atau pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang bukan Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Data pengawasan BMKT pada tahun 2025 sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan
1	15-22 Desember 2025	PT Cosmix Asia	1.Perairan Batu Belobang, Lingga 2.Perairan Kijang	Hasil pengangkatan pada tahun 2015 dan 2017. Jumlah barang yang telah dilakukan penghitungan bersama instansi terkait berjumlah 10.172 keping. Bagian yang dititipkan ke pemerintah sebanyak 5.086 keping, disimpan di 79 container plastik, untuk bongkahan keramik disimpan di 7 container kayu, ditempatkan di Gudang PT Pos Indonesia KCU Batam untuk dilakukan proses pengiriman melalui transportasi laut dengan rute Pelabuhan Punggur Batam – Kuala Tungkal – Merak Bakaheuni – dan Ciulengsi Jawa Barat

**h) Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi**

Usaha yang meliputi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku atau Aktifitas penunjang treatment air.

Data pengawasan pemanfaatan Air Laut Selain Energi tahun 2025 sebagai berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
1	11 September 2025	PLTU Suge (PT PLN Persero)	Dusun Suge, Desa Pegantungan, Kec. Badau Kabupaten Belitung	Penambahan KBLI ALSE melalui OSS PT. PLN (Persero)	Patuh
2	17 September 2025	PT. Bintan Inti Industrial Estate Lobam	Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	Tidak ada pemanfaatan air laut, pendinginan memanfaatkan air danau	Patuh

i) **Pelaku usaha sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya**

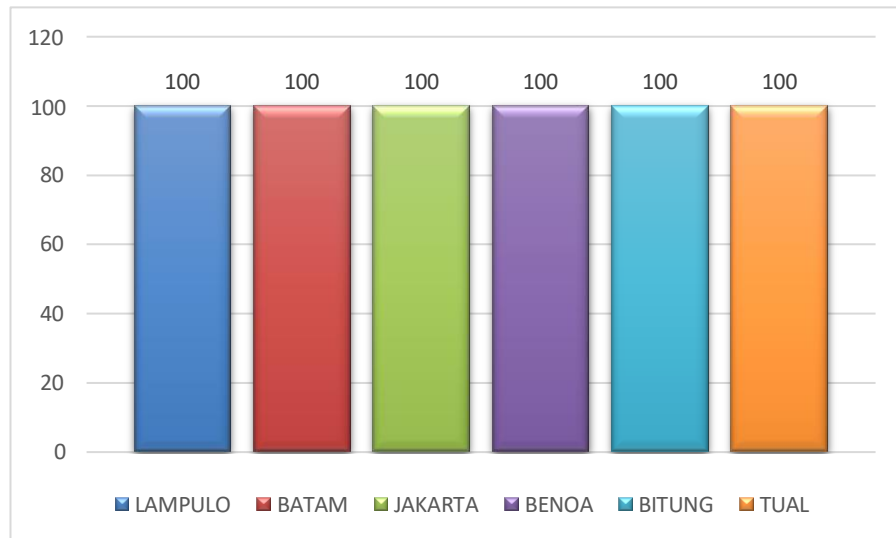
Pelaku usaha adalah perorangan/badan yang melakukan usaha di bidang sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya. Patuh dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya.

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
1	13 Maret 2025	PT Harmoni Samudera Perkasa	Jalan Daeng Salili nomor 17A Kelurahan Kampung bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota	Usaha/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan/kewajiban dan ketentuan lainnya yang	Patuh

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
			Tanjungpinang 0.936986,10 4.449354	tercantum dalam perizinan, pada Lokasi usaha dan lingkungan usaha tidak ditemukan adanya pencemaran.	
2	27 Mei 2025	PT Batam Slop & Sludge Treatment Centre	Pulau Nipah Jembatan II, Barelang, Kel. Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam	Berdasarkan hasil pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya tersebut di atas, maka diberikan rekomendasi untuk tetap menjaga lingkungan dan pengelolaan limbah dengan baik dan tidak menimbulkan pencemaran	Patuh
3	5 Juni 2025	PT. Tritunas Sinar Benua (Pulau Nirup)	Pulau Nirup, Kel. Sekanak Raya, Kec. Belakang Padang, Kota Batam	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran karena air limbah rumah tangga diolah dengan baik	Patuh
4	16 Juni 2025	PT. Merah Putih Petro Gas	Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang Kota Batam	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran pencemaran karena air	Patuh

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	Ket.
				limbah rumah tangga diolah dengan baik	
5	3 September 2025	PT Island Connections Belitung	Pulau Kalimambang, Desa Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Koordinat lokasi 107° 32' 6,407" BT - 2° 46' 44,324" LS	Belum ada aktivitas pembangunan sampai menunggu terbit perizinan lingkungan	Patuh

Capaian indikator ini pada tahun 2024 dan 2025 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra sama yaitu 100. Capaian tersebut dikarenakan seluruh target *output* pengawasan sumber daya kelautan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang dipedomani. Alokasi anggaran untuk pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2025 sebesar Rp. 120.615.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 320.615.000,- dan telah terealisasi sebesar sebesar **Rp. 318.720.706,- atau 99,41%**. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut:



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2025 sama yaitu 100. Karena terselesaikannya kegiatan pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan petunjuk teknis mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan serta tercapainya target output pada indikator ini. Tahapan-tahapan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi ketika pengawas kelautan dan/atau polys PWP3K melakukan kegiatan pengawasan.

Evaluasi dan analisis pada **IKU8 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan** diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 6 (Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan)** yaitu:

#### 8) NILAI KUALITAS PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU08	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100
		2024	100	100	100
		<b>2025</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Batam memiliki target Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan dengan nilai 82 yang dihitung kinerjanya per triwulan. Terdapat pengurangan target dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini menyesuaikan pada renstra KKP dan PSDKP tahun 2025-2029, dimana terdapat penyesuaian formula perhitungan IKU pengawasan sumber daya perikanan, yang sebelumnya hanya memperhitungkan penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan, sementara pada tahun 2025 turut memperhitungkan nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan.

Secara keseluruhan, nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan sejak tahun 2025 terdiri dari nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur dalam hal persiapan sebelum melakukan kegiatan pengawasan, kelengkapan dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan kelengkapan dalam hal pelaporan hasil kegiatan pengawasan, serta nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan bilamana berdasarkan hasil pengawasan ditemukan indikasi pelanggaran yang perlu untuk ditindaklanjuti.

Pengawasan pelaku usaha perikanan terdiri dari Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), Pengawasan Importasi Ikan, Pengawasan Destructive Fishing, Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan berupa pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi (JIL), dan Jenis Ikan Membahayakan dan Merugikan (JIMM), serta pengawasan terhadap objek yang menjadi atensi pimpinan berupa pengawasan hasil aduan masyarakat, pengawasan pelaku usaha illegal, dan pengawasan pada kampung perikanan budidaya.

Selama tahun 2025, total 122 kegiatan usaha perikanan telah diawasi, yang terdiri dari 10 kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (PBBR), 13 kegiatan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi (JIL), 3 kegiatan pengawasan

jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan (JIMM), 29 kegiatan pengawasan aduan masyarakat subsektor pembudidayaan ikan, 2 kegiatan pengawasan tindak lanjut atensi pimpinan, 25 kegiatan pengawasan kampung pembudidayaan ikan, 35 kegiatan pengawasan usaha perikanan illegal, 1 kegiatan pengawasan importansi hasil perikanan, dan 4 kegiatan pengawasan penangkapan ikan yang merusak / *destructive fishing* (DF). Rincian kegiatan pengawasan pada tahun 2025 termuat dalam tabel berikut.

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/ Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
1	19 Maret 2025	Was PBBR Pembudidayaan Ikan	Pt Bintang Sejahtera Selalu	Jalan Pantai Trikora Km.47 -48 Kelurahan Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau	Secara Teknis kepatuhan, tambak BSS sudah memenuhi kriteria kepatuhan baik, ALSE menunggu pengajuan dan dibukanya PNBPN oleh PRL	Telah Memenuhi Syarat
2	19 Maret 2025	Was PBBR Pengolahan Ikan	Pt Ethic Food	Cammo Industrial Park Blok G No. 13a	Sudah memenuhi Dokumen Perizinan Berusaha dan sudah menerapkan penerapan manajemen mutu yang baik.	Telah Memenuhi Syarat
3	20 Maret 2025	Was PBBR Pengolahan Ikan	Pt Natuna Fish Building	Jl.Duyung pergudangan kartika blok b.no, Sungai Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau	Unit usaha telah memiliki NIB, SERTIFIKAT STANDAR SKP, dan HACCP	Telah Memenuhi Syarat
4	04/29/2025	Was PBBR Pembudidayaan Ikan	PT CENTRAL PROTEINA PRIMA	Treasury Tower 8th Floor District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, SCBD	Telah Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha Dan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha	Telah Memenuhi Syarat
5	5/22/2025	Was PBBR Pembudidayaan Ikan	LAUTAN SEJAHTERA MANDIRI	Pulau Bulan, PO BOX 502/Batam Center45qt	Telah memiliki perizinan berusaha, telah dilengkapi CBIB, memiliki IPAL (Kolam pengendapan)	Telah Memenuhi Syarat
6	6/12/2025	Was PBBR Pengolahan Hasil Perikanan	PT LESTARI MAGRIS	JL. MUARA KARANG RAYA NO. 117-119, KEL. PLUIT	Dokumen lengkap sesuai OSS dan KBLI	Telah Memenuhi Syarat
7	07/28/2025	Was PBBR Pembudidayaan Ikan	PT SUN GUAN AQUATIC	KAWASAN BINTANG INDUSTRIAL PARK II LOT G NO.15	Perizinan Berusaha belum lengkap : a. Sertifikat Standar belum melengkapi persyaratan; dan	Sanksi

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
					b. belum memenuhi kewajiban penyampaian LKU setiap 6 bulan	
8	09/23/2025	Was PBBR Pemasaran Hasil Perikanan	VALAMPURI INDONESIA GROUP	Jl.Martadinata RT.003/RW.001, Sedanau, Bunguran Barat, Kab. Natuna, Kepulauan Riau	Tidak ditemukan perusahaan di lokasi	Direkomendasikan untuk Pencabutan Usaha
9	11-12-2025	Was PBBR Subsektor Penangkapan Ikan	PT HASIL LAUT SEJATI	PP. Barelang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau	ABK belum memiliki sertifikat yang persyaratkan dan belum memiliki sertifikat CPIB.	Telah Memenuhi Syarat
10	11-13-2025	Was PBBR Subsektor Penangkapan Ikan	HERMAWAN	PP. Telaga Punggur, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau	Belum memiliki CPIB di atas kapal.	Telah Memenuhi Syarat
<b>REKAP PENGAWASAN IMPORTASI HASIL PERIKANAN</b>						
11	12/24/2025	Was Pemasaran	PT. Aneka Tata Niaga	Komp. Graha Permata Indah Blok A No.7, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Telah Memenuhi Syarat
<b>REKAP PENGAWASAN DESTRUCTIVE FISHING</b>						
12	12/22/2025	Was Penangkapan Ikan (Destructive Fishing)	Asfar	Desa Cemaca, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Telah Memenuhi Syarat
13	12/22/2025	Was Penangkapan Ikan (Destructive Fishing)	La Andi	Desa Sepempang, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Telah Memenuhi Syarat
14	12/22/2025	Was Penangkapan Ikan (Destructive Fishing)	Azwi	Desa Kelanga, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Telah Memenuhi Syarat
15	12/22/2025	Was Penangkapan Ikan (Destructive Fishing)	Haidir	Desa Kelanga, Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	Tidak ditemukan indikasi pelanggaran	Telah Memenuhi Syarat
<b>REKAP PENGAWASAN PEMANFAAT SUMBER DAYA PERIKANAN</b>						
16	5/14/2025	Jenis Ikan Membahayakan dan Merugikan (JIMM)	PALEMBANG BIRD PARK	Jl. Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Kawasan OPI Mall, Kel. Sungai Kedukan, Kec. Rambutan	Terdapat pemanfaatan ikan alligatgar ( <i>Lepisosteus spp.</i> )	Penyerahan secara sukarela dan penanganan barang hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
17	6/3/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	Hoki Arwana	Batam	Sesuai dengan perizinan	Telah Memenuhi Syarat
18	6/2/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	BANGUN JAYA REFANO	Bangka	Pelaku usaha sudah patuh dalam melaksanakan kegiatan	Telah Memenuhi Syarat
19	6/2/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	CV. EKA MULYA ABADI	Bangka	CV. Eka Mulya Abadi di tahun 2025 belum melakukan kegiatan pengiriman jenis ikan yang dilindungi dikarenakan tidak mendapatkan izin pengambilan dan kuota jenis ikan yang dilindungi, sehingga CV. Eka Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan/pengiriman pengelolaan jenis ikan yang dilindungi.	Tidak melakukan aktivitas pemanfaatan jenis ikan dilindungi
20	6/3/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	CV. PRATAMA JAYA	Pangkal Pinang	Dari hasil pemeriksaan yang ditemukan bahwa pelaku usaha tidak menjual jenis ikan yang dilindungi	Tidak melakukan aktivitas pemanfaatan jenis ikan dilindungi
21	6/3/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	MULIWATI	Pangkal Pinang	Muliwati sudah memiliki SIPJI, pelaku usaha menjual jenis ikan air tawar tujuan lokal	Telah Memenuhi Syarat
22	6/3/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	HERYANTO KURNIAWAN TANUJAYA	Pangkal Pinang	Pelaku Usaha sudah patuh	Telah Memenuhi Syarat
23	6/18/2025	Jenis Ikan Membahayakan dan Merugikan (JIMM)	Toko Ikan Hias Trimax	Jl. DI. Panjaitan KM.8 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur	Terdapat pemanfaatan ikan sapu-sapu ( <i>Pterygoplichthys spp.</i> )	Penyerahan secara sukarela dan penanganan barang hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24	6/3/2025	Jenis Ikan yang Dilindungi	Aponk Red	Batam	Sesuai dengan perizinan	Telah Memenuhi Syarat
25	9/11/2025	Jenis Ikan Membahayakan dan Merugikan (JIMM)	PT SAFARI LAGOI BINTAN	Jl. Panglima Patar Lagoi, Kel. Seborg Lagoi	Terdapat jenis ikan alligator sebanyak 19 ekor yang berasal dari serah terima dari karantina kemudian berkembang biak	Sanksi
26	10/14/2025	Was Jenis Ikan yang Dilindungi (JIL)	PT Budidaya Maju Bersama	Kab. Belitung Timur, Prov. Bangka Belitung	Unit usaha sudah memiliki perizinan berusaha, kegiatan usaha belum berjalan/operasional	Telah Memenuhi Syarat

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
27	10/14/2025	Was Jenis Ikan yang Dilindungi (JIL)	PT Laut Triputra Perkasa	Kab. Belitung Timur, Prov. Bangka Belitung	Unit usaha sudah memiliki perizinan berusaha, kegiatan usaha belum berjalan/operasional	Telah Memenuhi Syarat
28	10/15/2025	Was Jenis Ikan yang Dilindungi (JIL)	PT Tiga Kuda Sakti	Kab. Belitung Timur, Prov. Bangka Belitung	Unit usaha sudah memiliki perizinan berusaha, kegiatan usaha belum berjalan/operasional, tahap pembangunan sarana prasarana	Telah Memenuhi Syarat
29	10/22/2025	Was Jenis Ikan yang Dilindungi (JIL)	Mahyuddin (Arwana Perak Lestari)	Kota Jambi, Prov. Jambi	Unit Usaha telah dilengkapi dokumen perizinan NIB, Sertifikat Standar dan SIPJI, Skala Usaha Mikro dengan KBLI 03271 (Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES)	Telah Memenuhi Syarat
30	11/26/2025	Was Jenis Ikan yang Dilindungi (JIL)	Sui Keng	Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau	Sesuai dengan SIPJI dan SAPJI	Telah Memenuhi Syarat
31	12/12/2025	Was Jenis Ikan yang Dilindungi (JIL)	CV. Eka Bina Pratama	Kab. Natuna, Prov. Kepulauan Riau	Perizinan sudah sesuai dan lengkap	Telah Memenuhi Syarat
<b>PENGAWASAN ATENSI PIMPINAN</b>						
32	5/9/2025	KPB	Kelompok Bahari Mandiri	Jalan Trans Barelang Jembatan 6 Kota Batam	Nilai kepatuhan sebesar 77,8% dengan katagori baik sekali	Telah Memenuhi Syarat
33	6/19/2025	KPB	CV. Marine Fish	Lrg Karang Anyar RT.22 RW.07 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang	usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya namun belum memiliki perizinan berusaha, Kepatuhan Teknis 80%.	Pembinaan dan Perbaikan
34	6/19/2025	KPB	CV. Marine Fish	Lrg Karang Anyar RT.22 RW.07 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang	usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya namun belum memiliki perizinan berusaha, Kepatuhan Teknis 81%.	Pembinaan dan Perbaikan
35	6/19/2025	KPB	Kelompok Kerapu Lumpur	Jl. Sijuk Desa Air Seruk Kec. Sijuk Kab. Belitung	unit usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya / menerapkan cara budidaya	Pembinaan dan Perbaikan

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/ Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
					ikan yang baik namun belum memiliki perizinan berusaha	
36	6/13/2025	KPB	KELOMPOK RUMPUT LAUT KARIMUN (ahmad)	Selat Los, Senggarang, Tanjung Pinang	Belum memiliki NIB, KKPR, CBIB. Unit usaha skala mikro	Pembinaan dan Perbaikan
37	6/19/2025	KPB	KPB Rumput Laut Karimun (Bujang)	Selat Los, Senggarang Kota Tanjung Pinang	Belum memiliki KKPR, Belum memiliki CBIB. Unit usaha skala mikro	Pembinaan dan Perbaikan
38	6/19/2025	KPB	KPB Rumput Laut Karimun (Jefri)	Selat Los, Senggarang, Tanjung Pinang	Belum memiliki NIB, Belum memiliki KKPR, Belum memiliki CBIB. Unit usaha skala mikro	Pembinaan dan Perbaikan
39	4/20/2025	Insidental Lainnya Pengolahan Ikan	Amzah Toni	Ranai Kota, Kab. Natuna	Pelaku usaha belum memiliki perizinan dan merupakan skala mikro	Pembinaan dan Perbaikan
40	6/19/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Budi	Selat 2 Bintang	Sudah memiliki KKPR, belum mengajukan CPIB. Unit usaha skala mikro	Pembinaan dan Perbaikan
41	5/22/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Herry	Madong Tanjung Pinang	Belum memiliki NIB, belum memiliki KKPR. Unit usaha skala mikro	Pembinaan dan Perbaikan
42	6/13/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ika	PT. DAEHA SUSAN BATAM	Jl. Trans Barelang Jembatan II Kel. Setokok Kec. Bulang Kota Batam	Pengelolaal limbah belum dilakukan secara optimal	Penerapan sanksi
43	6/19/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Alias	Jl. Sijuk Desa Air Seruk Kec. Sijuk Kab. Belitung	unit usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya / menerapkan cara budidaya ikan yang baik namun belum memiliki perizinan berusaha	Pembinaan dan Perbaikan
44	6/19/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Arip	Selat Bintang 2	Belum memiliki KKPR, mau mengajukan hanya perlu didampingi karena ini merupakan KPB	Pembinaan dan Perbaikan
45	6/19/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Aseng	Selat 2 Bintang	sudah memiliki CBIB dan KKPR	Telah Memenuhi Syarat

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/ Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
46	4/29/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Eryanto	Selat 2 Bintang	Belum memiliki KKPRL dan CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
47	5/22/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Nazaruddin	Madong, Tanjung Pinang	belum memiliki NIB, KKPRD, dan NPWP	Pembinaan dan Perbaikan
48	5/8/2018	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	PT. MEGAH HALIM NISHIKIGOI	Jalan Trans Bareleng Jembatan 6 Kota Batam	Nilai kepatuhan sebesar 77,8% dengan katagori baik sekali	Telah Memenuhi Syarat
49	5/26/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Farm Yoga	Lrg Karang Anyar RT.22 RW.07 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang	usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya namun belum memiliki perizinan berusaha, Kepatuhan Teknis 80%.	Pembinaan dan Perbaikan
50	5/26/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Farm Yoga	Lrg Karang Anyar RT.22 RW.07 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang	usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya namun belum memiliki perizinan berusaha, Kepatuhan Teknis 81%.	Pembinaan dan Perbaikan
51	6/5/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Hendi	Jl. Sijuk Desa Air Seruk Kec. Sijuk Kab. Belitung	unit usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya / menerapkan cara budidaya ikan yang baik namun belum memiliki perizinan berusaha	Pembinaan dan Perbaikan
52	6/5/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Hendi	Jl. Sijuk Desa Air Seruk Kec. Sijuk Kab. Belitung	unit usaha berskala mikro dengan pengelolaan tradisional, secara umum telah memenuhi persyaratan usaha budidaya / menerapkan cara budidaya ikan yang baik namun belum memiliki perizinan berusaha	Pembinaan dan Perbaikan
53	6/19/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Adi Sopian	Desa Pulau Tiga, Kec. Pulau Tiga Barat, Kab. Natuna, Prov. Kepri	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha, usaha yang dilakukan masih mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan
54	6/19/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Erlang Teguh Saputra	Desa Pulau Tiga, Kec. Pulau Tiga Barat, Kab. Natuna, Prov. Kepri	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha, usaha yang dilakukan masih mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/ Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
55	6/19/2025	Insidental Lainnya Pembudidayaan Ikan	Rodial Huda	Desa Pulau Tiga, Kec. Pulau Tiga Barat, Kab. Natuna, Prov. Kepri	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha, usaha yang dilakukan masih mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan
56	7/25/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Riduan	Desa/Kelurahan Sungai Harapan, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI dan belum memiliki sertifikat CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
57	7/25/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	A HUAT	PLT MUTIARA NO 54, Desa/Kelurahan Kemboja, Kec. Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI dan belum memiliki sertifikat CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
58	7/25/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Abdul Munawir	Tinjul., RT 002 RW 03, Desa/Kelurahan Tinjul, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI dan belum memiliki sertifikat CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
59	7/25/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Asrul	JL. KAMPUNG PENGAMBIL, Desa/Kelurahan Sungai Harapan, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI dan belum memiliki sertifikat CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
60	7/25/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	DADANG SYAHPUTRA	Kampung Pengambil, Desa Sungai Harapan-Singkep Barat, Desa/Kelurahan Sungai Harapan, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau	Kegiatan usaha tidak sesuai dengan KBLI dan belum memiliki sertifikat CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
61	7/25/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Hidayat	KAMPUNG PENGAMBIL, Desa/Kelurahan Sungai Harapan, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI dan belum memiliki sertifikat CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
62	7/25/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	HIDAYUT	JL. KAMPUNG PENGAMBIL, Desa/Kelurahan Sungai Harapan, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI dan belum memiliki sertifikat CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
63	7/24/2025	Aduan Masyarakat	KOPERASI KONSUMEN MITRA	DESA KOTE, Desa/Kelurahan Kote, Kec. Singkep Pesisir,	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI dan belum memiliki sertifikat CBIB	Pembinaan dan Perbaikan

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
		Pembudidayaan Ikan	GIB SINGKEP	Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau		
64	7/24/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	PEBRIYANTO	Jl.sedamai, Desa/Kelurahan Sedamai, Kec. Singkep Pesisir, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI dan belum memiliki sertifikat CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
65	7/24/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Ridwan	Jl. Neraca, Desa/Kelurahan Sedamai, Kec. Singkep Pesisir, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau,	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI dan sudah memiliki CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
66	7/25/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	ROMINTO	TINJUL, RT 001/ RW 003, Desa/Kelurahan Tinjul, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau,	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI dan tidak memiliki CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
67	7/24/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	RONI PARLAGUTAN DONGORAN	CUKAS, Desa/Kelurahan Tanjung Irat, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau,	Kegiatan usaha sesuai KBLI serta sedang pengajuan CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
68	7/24/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	SADI	CUKAS, Desa/Kelurahan Tanjung Irat, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau	Kegiatan usaha sesuai KBLI serta belum memiliki sertifikat CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
69	7/25/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	SYAHNIZAM	JL. SUNGAI HARAPAN, Desa/Kelurahan Sungai Harapan, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau,	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI serta tidak memiliki CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
70	7/25/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	TIO MAU	TINJUL RT.001/RW002, Desa/Kelurahan Tinjul, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau,	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI serta tidak memiliki CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
71	7/25/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	Abdul Munawir	Desa Tinjul Kec. Singkep Barat Kab. Lingga	Kegiatan usaha sesuai dengan KBLI dan tidak memiliki sertifikat CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
72	8/10/2025	Insidentil lainnya	Muhammad Saparudin	Jl. Paya manggis Kabupaten Karimun	Unit Usaha Belum Memiliki Perizinan Berusaha, Nilai	Pembinaan dan Perbaikan

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/ Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
		Pembudidayaan Ikan			Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Adalah 36 %	
73	8/27/2025	Insidental lainnya Pembudidayaan Ikan	Johan	Jl. Paya manggis Kabupaten Karimun	Unit Usaha Belum Memiliki Perizinan Berusaha, Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Adalah 34 %	Pembinaan dan Perbaikan
74	8/29/2025	Insidental lainnya Pembudidayaan Ikan	Makruf	Jl. Bukit Cincin Kabupaten Karimun	Unit Usaha Belum Memiliki Perizinan Berusaha, Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Adalah 44 %	Pembinaan dan Perbaikan
75	9/12/2025	Insidental lainnya Pembudidayaan Ikan	Basarudin	Kabupaten Natuna	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha	Pembinaan dan Perbaikan
76	7/23/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	PT. SINGKEP PUTRA PERKASA	Tanjung Sawang RT 001, RW. 001 Kab. Lingga Kepulauan Riau	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
77	29/07/2025	Insidental lainnya Pengolahan Hasil Perikanan	Ariyandi Anggara	Komplek PP. Sungsang Desa Sungsang IV	-Kegiatan adalah pengolahan hasil perikanan (Pengupasan Udang) skala mikro (Sederhana) - Dokumen seperti NIB belum memiliki	Pembinaan dan Perbaikan
78	02/09/2025	Insidental lainnya Pengolahan Hasil Perikanan	Belly Boy	Kabupaten Natuna	Pengawas Perikanan mengarahkan pelaku usaha agar segera melengkapi perizinan berusaha yang dilakukan	Pembinaan dan Perbaikan
79	03/09/2025	Insidental lainnya Pengolahan Hasil Perikanan	Juliadi	Kabupaten Natuna	Pengawas Perikanan mengarahkan agar pelaku usaha segera melengkapi perizinan berusaha yang dilakukan	Pembinaan dan Perbaikan
80	04/09/2025	Insidental lainnya Pengolahan Hasil Perikanan	Tommysyar	Kabupaten Natuna	Pelaku usaha di arahkan untuk melengkapi perizinan PKKPR	Pembinaan dan Perbaikan
81	10/09/2025	Insidental lainnya Pengolahan Hasil Perikanan	Hanafi	Kabupaten Natuna	Pelaku usaha segera melengkapi perizinan berusaha yang belum ada	Pembinaan dan Perbaikan
82	9/15/2025	Insidental lainnya	POKDAKAN ARWANA JAYA PENANGG	JALAN PAYA MANGGIS	Unit Usaha Belum Memiliki Perizinan Berusaha, Nilai	Pembinaan dan Perbaikan

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/ Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
		Pembudidayaan Ikan	UNG JAWAB BAPAK AL-GAZANDI PUTRA PRATAMA		Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Adalah 36 %	
83	9/17/2025	Insidental lainnya Pembudidayaan Ikan	MASRUDE	Jl. Paya manggis Kabupaten Karimun	Unit Usaha Belum Memiliki Perizinan Berusaha, Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Adalah 43%	Pembinaan dan Perbaikan
84	9/25/2025	Insidental lainnya Pembudidayaan Ikan	Zainudin	Jl. Paya manggis Kabupaten Karimun	Unit Usaha Belum Memiliki Perizinan Berusaha, Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Adalah 43 %	Pembinaan dan Perbaikan
85	9/25/2025	Insidental lainnya Pembudidayaan Ikan	Nopendra Paya Manggis	Jl. Paya manggis Kabupaten Karimun	Unit Usaha Belum Memiliki Perizinan Berusaha, Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Adalah 43 %	Pembinaan dan Perbaikan
86	9/25/2025	Insidental lainnya Pembudidayaan Ikan	Dedi Suhendar	Jl. Paya manggis Kabupaten Karimun	Unit Usaha Belum Memiliki Perizinan Berusaha, Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Adalah 43 %	Pembinaan dan Perbaikan
87	9/26/2025	Insidental lainnya Pembudidayaan Ikan	Riski	Jl. Paya manggis Kabupaten Karimun	Unit Usaha Belum Memiliki Perizinan Berusaha, Nilai Kepatuhan Teknis Pelaku Usaha Adalah 43 %	Pembinaan dan Perbaikan
88	8/27/2025	Aduan Masyarakat Pembudidayaan Ikan	PT. SUMBER TAMBAK ABADI	JLN. TRANS II RT. 14 DUSUN IV Kelurahan: Kurau (Timur) Kab. Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. STA merupakan penyewa dari CV. Panorama Tambak Abadi</li> <li>2. Menggunakan tenaga kerja asing sebanyak 2 orang sebagai teknisi dan pembantu teknisi</li> <li>3. Sudah menggunakan pakan dan obat yang teregister di KKP</li> <li>4. Menggunakan tambak udang milik PT. LSS di Kec. Koba dituangkan dalam PKS no. 2 tanggal 5-12-2024 sehingga perlu penambahan kode proyek</li> </ol>	Penerapan sanksi
89	10/21/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	Ernawati (Pokdakan Harapan Maju)	Teluk Ketapang, RT 004 RW 002, Desa/Kel.Teluk Ketapang, Kec.Pemayang, Kab.Batanghari	Pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan dokumen perizinan. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dokumen perizinan yaitu NIB, Sertifikat Standar, Surat Pernyataan Prinsip-prinsip CBIB dan Sertifikat CBIB. Unit usaha masih dalam skala mikro. Pakan yang digunakan hasil buatan sendiri (Pokdakan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/ Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
					Harapan Maju) dan dilengkapi Sertifikat CPPIB. Probiotik Merk EM4 dengan No.Register KKP RI No. D 2109179-P1 PbBC dan Merk Booster (premix aquavita) dengan No.Register KKP RI No.D 1205197 PBS	
90	10/21/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	Yahmin (Pokdakan Harapan Maju)	Teluk Ketapang, RT 04, RW 02, Desa/Kel.Teluk Ketapang, Kec.Pemayung	Pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan dokumen perizinan. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dokumen perizinan yaitu Sertifikat Standar dan Sertifikat CBIB. Unit usaha masih dalam skala mikro. Pakan yang digunakan hasil buatan sendiri (Pokdakan Harapan Maju) dan dilengkapi Sertifikat CPPIB. Probiotik Merk EM4 dengan No.Register KKP RI No. D 2109179-P1 PbBC dan Merk Booster (premix aquavita) dengan No.Register KKP RI No.D 1205197 PBS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
91	10/21/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	Siti Mutmainah (Pokdakan Harapan Maju)	Desa/Kel. Teluk Ketapang, Kec.Pemayung	Pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan dokumen perizinan. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dokumen perizinan antara lain NIB, IUMK, Surat Pernyataan Prinsip-prinsip CBIB dan Sertifikat CBIB. Unit usaha masih dalam skala mikro. Pakan yang digunakan hasil buatan sendiri (Pokdakan Harapan Maju) dan dilengkapi Sertifikat CPPIB. Probiotik Merk EM4 dengan No.Register KKP RI No. D 2109179-P1 PbBC dan Merk Booster (premix aquavita) dengan No.Register KKP RI No.D 1205197 PBS .	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
92	10/21/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	Andre Irawan (Pokdakan Harapan Maju)	Desa/Kel. Teluk Ketapang, Kec.Pemayung	Pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan dokumen perizinan. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dokumen perizinan yaitu NIB dan Sertifikat CBIB. Unit usaha masih dalam skala mikro. Pakan yang digunakan hasil	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/ Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
					buatan sendiri (Pokdakan Harapan Maju) dan dilengkapi Sertifikat CPPIB. Probiotik Merk EM4 dengan No.Register KKP RI No. D 2109179-P1 PbBC dan Merk Booster (premix aquavita) dengan No.Register KKP RI No.D 1205197 PBS	
93	10/21/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	Kasiyah (Pokdakan Harapan Maju)	Desa/Kel. Teluk Ketapang, Kec.Pemayung	Pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan dokumen perizinan. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dokumen perizinan yaitu NIB dan Sertifikat CBIB. Unit usaha masih dalam skala mikro. Pakan yang digunakan hasil buatan sendiri (Pokdakan Harapan Maju) dan dilengkapi Sertifikat CPPIB. Probiotik Merk EM4 dengan No.Register KKP RI No. D 2109179-P1 PbBC dan Merk Booster (premix aquavita) dengan No.Register KKP RI No.D 1205197 PBS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
94	10/23/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	PESANTREN NU AL-MA'ARIF	Desa Muara Sungai Kec. Cambai, Kota Prabumulih	Usaha Budidaya belum memiliki perizinan berusaha, Usaha Budidaya termasuk usaha mikro kecil, perlu pemenuhan sarana sebagai Prasyarat CBIB, Nilai 51%	Pembinaan dan Perbaikan
95	10/23/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	Pokdakan Ponpes NU AI Maarif	Desa Muara Sungai Kec. Cambai	Usaha Budidaya belum memiliki perizinan berusaha, Usaha Budidaya termasuk usaha mikro kecil, perlu pemenuhan sarana sebagai Prasyarat CBIB, Nilai 66%	Pembinaan dan Perbaikan
96	10/23/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	Karman Edi	Kel. Sungai Medang Kec. Cambai	Usaha Budidaya untuk segera diselesaikan proses penerbitan CBIB, Nilai kepatuhan teknis 85	Pembinaan dan Perbaikan
97	10/24/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	Pokdakan Usaha Bersama	Kelurahan Sungai Medang, Kec. Cambai	Pelaku Usaha belum memiliki NIB (Perizinan Standar dan Teknis), Sarana pemenuhan CBIB belum terpenuhi	Pembinaan dan Perbaikan
98	10/24/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	Pokdakan Telaga Sari	Kelurahan Sungai Medang, Kec. Cambai	Usaha Budidaya belum memiliki perizinan berusaha, Sarana Pemenuhan CBIB belum tersedia (jaminan air sumber pengelolaan limbah	Pembinaan dan Perbaikan

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
					dan MCK), Obat dan Pakan terdaftar	
99	10/21/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	Ernawati (Pokdakan Harapan Maju)	Teluk Ketapang, RT 004 RW 002, Desa/Kel.Teluk Ketapang, Kec.Pemayung, Kab.Batanghari	Pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan dokumen perizinan. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dokumen perizinan yaitu NIB, Sertifikat Standar, Surat Pernyataan Prinsip-prinsip CBIB dan Sertifikat CBIB. Unit usaha masih dalam skala mikro. Pakan yang digunakan hasil buatan sendiri (Pokdakan Harapan Maju) dan dilengkapi Sertifikat CPPIB. Probiotik Merk EM4 dengan No.Register KKP RI No. D 2109179-P1 PbBC dan Merk Boster (premix aquavita) dengan No.Register KKP RI No.D 1205197 PBS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
100	10/21/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	Yahmin (Pokdakan Harapan Maju)	Teluk Ketapang, RT 04, RW 02, Desa/Kel.Teluk Ketapang, Kec.Pemayung	Pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan dokumen perizinan. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dokumen perizinan yaitu Sertifikat Standar dan Sertifikat CBIB. Unit usaha masih dalam skala mikro. Pakan yang digunakan hasil buatan sendiri (Pokdakan Harapan Maju) dan dilengkapi Sertifikat CPPIB. Probiotik Merk EM4 dengan No.Register KKP RI No. D 2109179-P1 PbBC dan Merk Boster (premix aquavita) dengan No.Register KKP RI No.D 1205197 PBS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
101	10/21/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	Siti Mutmainah (Pokdakan Harapan Maju)	Desa/Kel. Teluk Ketapang, Kec.Pemayung	Pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan dokumen perizinan. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dokumen perizinan antara lain NIB, IUMK, Surat Pernyataan Prinsip-prinsip CBIB dan Sertifikat CBIB. Unit usaha masih dalam skala mikro. Pakan yang digunakan hasil buatan sendiri (Pokdakan Harapan Maju) dan dilengkapi Sertifikat CPPIB. Probiotik Merk EM4 dengan	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/ Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
					No.Register KKP RI No. D 2109179-P1 PbBC dan Merk Boster (premix aquavita) dengan No.Register KKP RI No.D 1205197 PBS .	
102	10/21/2025	Atensi Pimpinan (Pembudayaan Ikan)	Andre Irawan (Pokdakan Harapan Maju)	Desa/Kel. Teluk Ketapang, Kec.Pemayung	Pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan dokumen perizinan. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dokumen perizinan yaitu NIB dan Sertifikat CBIB. Unit usaha masih dalam skala mikro. Pakan yang digunakan hasil buatan sendiri (Pokdakan Harapan Maju) dan dilengkapi Sertifikat CPPIB. Probiotik Merk EM4 dengan No.Register KKP RI No. D 2109179-P1 PbBC dan Merk Boster (premix aquavita) dengan No.Register KKP RI No.D 1205197 PBS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
103	10/21/2025	Atensi Pimpinan (Pembudayaan Ikan)	Kasiyah (Pokdakan Harapan Maju)	Desa/Kel. Teluk Ketapang, Kec.Pemayung	Pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan dokumen perizinan. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dokumen perizinan yaitu NIB dan Sertifikat CBIB. Unit usaha masih dalam skala mikro. Pakan yang digunakan hasil buatan sendiri (Pokdakan Harapan Maju) dan dilengkapi Sertifikat CPPIB. Probiotik Merk EM4 dengan No.Register KKP RI No. D 2109179-P1 PbBC dan Merk Boster (premix aquavita) dengan No.Register KKP RI No.D 1205197 PBS	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
104	11/25/2025	Atensi Pimpinan (Pembudayaan Ikan)	Umar	Pasir Panjang Desa kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	Pelaku usaha tidak berizin	Pembinaan dan Perbaikan
105	12/4/2025	Atensi Pimpinan (Pembudayaan Ikan)	PT. Alam Lepar Sejahtera	Pulau Lepar, Kelurahan Penutuk Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung	Pelaku usaha tidak memiliki CBIB	Pembinaan dan Perbaikan

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
106	12/5/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	PT. Bukit Lepas Sejahtera	Kelurahan Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelaku usaha tidak memiliki CBIB	Pembinaan dan Perbaikan
107	12/3/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	Saipul (Pokdakan Minna Barokah)	Jl. Suak Kandis, KM.8, Kel.Pudak,Kec.Kumpeh Ulu	- Bidang usaha pembesaran ikan lele dan patin; - Pakan ikan yang digunakan diproduksi PT. Newhope Aqua Feed Indonesia yang sudah teregistrasi KKP RI IL 1850102023 dan KKP RI IL 3199062025 dan PT. Matahari Sakti yang sudah teregistrasi KKP Nomor : KKP RI IL 792112022; - Obat/probiotik yang digunakan diproduksi oleh PT.Indosco Dwijaya Sakti (BOSTER) yang sudah teregistrasi KKP RI No.D 1811390 FKC; - Skala usaha Mikro dengan tingkat risiko menengah rendah; - Unit usaha telah dilengkapi dokumen perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat CBIB.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
108	12/3/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidayaan Ikan)	Muslimin (Pokdakan Tri Handayani Sejati)	Jl. Suak Kandis, Desa/Kel. Pudak, Kec. Kumpeh Ulu	- Bidang usaha Pembesaran Ikan Lele; - Pakan ikan yang digunakan diproduksi oleh PT. Newhope Aqua Feed Indonesia yang sudah teregistrasi KKP RI IL 1850102023 dan KKP RI IL 3199062025 dan PT. Matahari Sakti yang sudah teregistrasi KKP Nomor : KKP RI IL 792112022; - Obat/Probiotik yang digunakan diproduksi oleh PT.Indosco Dwijaya Sakti (BOSTER) yang sudah teregistrasi KKP RI No.D 1811390 FKC; - Skala usaha Mikro dengan tingkat risiko Menengah Rendah; - Unit usaha telah dilengkapi dokumen perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat CBIB.	Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
109	11/20/2025	Atensi Pimpinan	Lukmanul Hakim/Kelompok Pemuda	Dusun Bahagia. RT 07, Kec. Tungkal Ilir	- Unit usaha pembesaran kepiting bakau yang dilakukan oleh Kelompok Pemuda Pesisir (PASIR)	Pembinaan dan Perbaikan

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/ Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
		(Pembudidaya Ikan)	Pesisir (PASIR) Pangkal Babu		Pangkal Babu belum dilengkapi dokumen perizinan yaitu NIB maupun Sertifikat CBIB; - NIB sedang dalam proses pengurusan yang dibantu pendampingan dari Penyuluh Perikanan; - Asal benih tangkapan alam; - Pakan yang digunakan ikan rucah.	
110	12/9/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	AI-Aqsa	Desa Tanjung Kaumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha, usaha yang dilakukan masih mikro kecil	Pembinaan dan Perbaikan
111	12/9/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	Raja Jamal	Desa Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha, usaha yang dilakukan masih mikro kecil	Pembinaan dan Perbaikan
112	12/9/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	Wan Zainudin	Desa Tanjung Kaumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha, usaha yang dilakukan masih mikro kecil	Pembinaan dan Perbaikan
113	11/4/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	LAIHO	kabupaten kepulauan Anambas	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha. Usaha yang dilakukan skala usaha mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan
114	11/4/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	LIU KUONG	Kab. Anambas	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha. Usaha yang dilakukan skala usaha mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan
115	11/4/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	SYAMSUDDIN	Kab. Anambas	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha. Usaha yang dilakukan skala usaha mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan
116	11/4/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	SUSANTO	Kab. Anambas	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha. Usaha yang dilakukan skala usaha mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan
117	11/5/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	RAHARJO	Kab. Anambas	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha. Usaha yang dilakukan skala usaha mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan
118	11/5/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	ADIN	Kab. Anambas	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha. Usaha yang dilakukan skala usaha mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan
119	11/5/2025	Atensi Pimpinan	CAKI	Kab. Anambas	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha. Usaha	Pembinaan dan Perbaikan

No	Tanggal Pengawasan	Jenis Pengawasan	Nama Perusahaan/ Perorangan	Alamat Pelaku usaha	Analisa Hasil Monitoring/ Pengawasan	Rekomendasi Pemeriksaan
		(Pembudidaya Ikan)			yang dilakukan skala usaha mikro dan kecil	
120	11/5/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	ABDULLAH	Kab. Anambas	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha. Usaha yang dilakukan skala usaha mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan
121	11/5/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	ELEAS KALEANG	Kab. Anambas	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha. Usaha yang dilakukan skala usaha mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan
122	11/5/2025	Atensi Pimpinan (Pembudidaya Ikan)	HADI	KAB. ANAMBAS	Pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha. Usaha yang dilakukan skala usaha mikro dan kecil	Pembinaan dan Perbaikan
<b>CAPAIAN</b>						<b>122</b>

Dari 122 kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, capaian indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan pada tahun 2025 adalah 100. Hal ini dikarenakan kapabilitas pengawas perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam meningkat melalui bimtek atau pelatihan serta adanya kemudahan pengawasan melalui modul wasrisk khusus pada pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang telah mencakup keseluruhan komponen untuk capaian IKU, mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan pelaporan. Meskipun pada tahun 2025 belum terdapat bimtek ataupun pelatihan di masing-masing bidang, namun pada triwulan IV tahun 2024 telah dilaksanakan *in-house training* di lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam untuk kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko di masing-masing bidang dengan menggunakan modul wasrisk yang disediakan oleh Direktorat PSDP.

Penggunaan modul wasrisk telah meningkatkan akuntabilitas pengawasan, karena sebelum kegiatan pengawasan dilaksanakan, terlebih dahulu harus terpenuhi seluruh kelengkapan persiapan pengawasan. Setelah seluruh kelengkapan persiapan pengawasan terpenuhi, kegiatan pengawasan baru dapat dilaksanakan pada hari

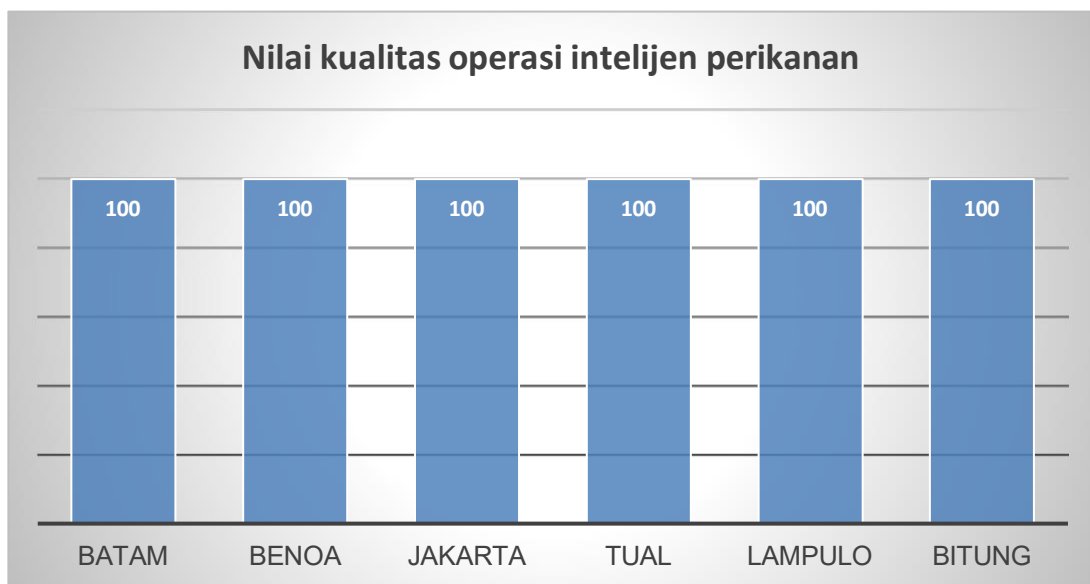
sesuai dengan penjadwalan. Pelaporan kemudian secara otomatis disampaikan melalui sistem wasrisk kepada Direktur PSDP. Keseluruhan tahapan ini telah membantu Pengawas Perikanan untuk tertib dalam memenuhi seluruh kelengkapan yang diperlukan, serta mempermudah pengarsipan dan pelaporan hasil kegiatan pengawasan.

Pada tahun 2025, pagu anggaran pengawasan sumber daya perikanan sebesar Rp. 1,019,000,000,- dan setelah efisiensi menjadi Rp. 109.735.000,-. Adapun setelah mendapatkan relaksasi, anggaran pengawasan sumber daya perikanan menjadi Rp. 418.735.000,- dengan realisasi sebesar **Rp. 416.835.262,- atau 99,55 %** dari pagu efektif.

Selama tahun 2025, dengan total pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi telah mencapai 122 kode proyek/ pelaku usaha dari 90 target pengawasan tahunan, capaian pengawasan sumber daya perikanan dapat dikatakan sangat baik mengingat jumlah pelaku usaha yang diawasi melebihi target berdasarkan anggaran. Selain itu, nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan sebesar 100 dari target 82, menunjukkan kinerja yang optimal dari pengawas perikanan dalam melengkapi administrasi di tiap tahapan pengawasan hingga tindak lanjutnya. Capaian ini juga mempertahankan capaian pengawasan sumber daya perikanan yang memperoleh nilai 100 pada tahun 2023 dan 2024 meskipun dengan adanya penurunan target dan dinamika efisiensi anggaran.

Kendala yang dihadapi selama tahun 2025 adalah keterbatasan objek pengawasan pada beberapa lokasi satuan pengawasan, mengingat pada tahun ini pengawasan sangat difokuskan pada pelaku usaha skala besar. Sementara itu, beberapa kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) seperti Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun, dimana pada

kawasan tersebut kewenangan yang biasanya berada pada kementerian kini telah beralih kepada Badan Pengusahaan (BP) sesuai dengan kewenangan penerbitan perizinannya. Hal ini semakin mempersempit cakupan objek pengawasan yang dapat diawasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pangkalan PSDKP Batam telah mengalihkan target pengawasan dari yang sebelumnya ditargetkan pada subsektor pengolahan dan distribusi menjadi subsektor penangkapan ikan.



Jika dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP lainnya, capaian tahun 2025 sama dengan Pangkalan Lampulo, Jakarta, Bitung, Bena, dan Tual yaitu 100%. Hal tersebut menandakan semua UPT dapat melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dengan optimal dan akuntabel.

Evaluasi dan analisis pada **IKU9 Indeks penerbitan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan** diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 7 (Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan)** yaitu:

**9) INDEKS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Indikator Kinerja Utama	Tahun	Target	Capaian	%
-------------------------	-------	--------	---------	---

Kode	Uraian				
IKU9	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80	86	108,49
		2024	80	80	100,00
		<b>2025</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>

Capaian indeks penganan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam 2025 sebesar 100 %, yang mana diperoleh indeks dari target 2025 adalah 81 (delapan puluh satu) dan tercapai 81 (delapan puluh satu). Hal ini merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Penganan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah penganan sanksi administratif bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan penetapan pertama dengan keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif terdiri atas gabungan antara anggaran penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan serta anggaran analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2025 telah melaksanakan penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sejumlah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) dari target 10 (sepuluh) perkara sehingga sudah melebihi target. Rincian penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
1	KM. Alviana Baru	SP 1	Pelanggaran daerah penangkapan ikan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
2	KM. Karya Pertama	SP 1	Pelanggaran daerah penangkapan ikan
3	KM. Arto Moro	SP 1	Pelanggaran daerah penangkapan ikan
4	KM. Rahmat Jaya Abadi	SP 1	Pelanggaran daerah penangkapan ikan
5	KM. Rosalina Indah	SP 1	Pelanggaran daerah penangkapan ikan
6	KM. Heng Jaya	SP 1	Pelanggaran Pelabuhan pangkalan
7	KM. Hasil Karimun - III	SP 1	Pelanggaran Pelabuhan pangkalan
8	KM. Dolphin Jaya	SP 1	Pelanggaran Jalur Penangkapan Ikan
9	KM. Abadi Jaya II	SP 1	Pelanggaran Jalur Penangkapan Ikan
10	PT Batam Nara Indonesia	SP 1	Tidak Memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha Berupa Sertifikat Standar Cara Berbudidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
11	PT. Bumi Tanjung Batang	Rp. 33.273.169,-	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
12	KM. TRISTAN MANDIRI IX	SP 1	Terpantau Berada di ZONA INTI Kawasan KONSERVASI
13	KM. TRISTAN MANDIRI III	SP 1	Terpantau Berada di ZONA INTI Kawasan KONSERVASI
14	KM. NISSAN LAUT	SP 1	JALUR PENANGKAPAN IKAN
15	KM. KARAOKE II	SP 1	Terpantau Berada di ZONA INTI Kawasan KONSERVASI
16	KM. MARGANA SAKTI II	SP 1	JALUR PENANGKAPAN IKAN
17	KM. OCEAN FISH	SP 1	JALUR PENANGKAPAN IKAN
18	KM. SUPER REJEKI	SP 1	JALUR PENANGKAPAN IKAN
19	KM. LAUTAN SUPRI CA	SP 1	Transshipment
20	KM. JAYA UTAMA	SP 1	Transshipment
21	KM. LEON MAKMUR	SP 1	Transshipment
22	KM. GURITA-2	SP 1	JALUR PENANGKAPAN IKAN
23	KM. OMEGA	SP 1	PELABUHAN PANGKALAN
24	PT. Amedco Jaya Maritim	Rp 21.190.920,-	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
25	PT. Telaga Bintang Jaya	Rp 17.284.560,-	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>
26	Jejaka Advenadus	SP 1	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>
27	PT. Batamas Puri Permai	Rp 276.531.480,-	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif</p>

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
			sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi
28	PT. Megah Bangun Sejahtera	Rp 308.881.560,-	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>
29	PT BATAM NARA INDONESIA	SP II	Melakukan kegiatan pembudidayaan/Pembesaran Udang Vannamei yang tidak memenuhi komitmen perizinan berusaha berupa sertifikat Standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Belum memiliki PB-UMKU (CBIB)
30	PT XL AXIATA TBK.	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
31	DODO	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
32	DODO	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
33	PT JAYA LAUT SIANTAN	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
34	CV NICOM INTI PRIMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
35	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
36	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
37	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
38	PT PASIFIK KARYASINDO PERKASA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
39	CV NICOM INTI PRIMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
40	CV SUMBER VANAME LESTARI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
41	UD TAMBAK UDANG HARIS SUSANTO	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
42	PT BANGKA BELITUNG MARITIM SEJAHTERA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
43	PT INDOMAKMUR ALAM RAYA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
44	PT TOMMINDO INTI BAHARI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
45	PT BUDIDAYA TROPIS INDOPERSADA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
46	PT SABANG MITRAJAYA ABADI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
47	CV MAVINDO KARYA LESTARI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
49	CV RAJAWALI TUKAK SADAI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

<b>NO</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>SANKSI</b>	<b>KETERANGAN</b>
50	PT SUMBER BAHARI ABADI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
51	PT OPTIC MARINE INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
52	CV TUNAS BUDIDAYA PRIMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
53	PT OPTIC MARINE INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
54	CV MITRA JAYA MANDIRI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
55	CV BETING TAMBAK BELIJONG	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
56	PT LAUTAN SAMUDRA SUKSES	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
57	PT KARIMUN GRANITE	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
58	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
59	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
60	CV TEMPILANG UNGGUL SEJAHTERA ABADI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
61	PT BILLITON ENERGI SEJAHTERA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
62	PT CHANDRA ANUGERAH AQUAVINDO	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
63	PT BATAMAS PURI PERMAI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
64	CV GELAM ABADI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
65	PT BANGKA PUTRA TAMBAK	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
66	BUT MEDCO E&P NATUNA LTD.	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
67	PT HAFIDAR SUKSES NUSANTARA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
68	PT BAKIT INDAH MANDIRI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
69	CV KARUNIA MAKMUR LESTARI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
70	CV SUMBER HATCHERY BANGKA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
71	PT LIMAS RAYA GRIYA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
72	PT UMA GRAHA BERKAH	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
73	PT BINTAN ALUMINA INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
74	PT NUSANTARA VERITAS TRINITAS	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
75	CV TEMPILANG UNGGUL SEJAHTERA ABADI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
76	PT LAUTAN BIRU PERKASA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
77	BUNYAMIN	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
78	PT KARYA EMAS MULTISANI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
79	PT MARIAN ANUGRAH AKUA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
80	KIM FUNG	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
81	PT MULTI AUTO PROTECT	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
82	MARIA MUI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
83	CV ANUGRAH KENCANA MANDIRI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
84	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
85	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
86	PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
87	PT BUANA MEGAWISATAMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
88	CV TAMBAK INDO HARMONIS	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
89	HERRY	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
90	HENDRI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
91	PT SUMBER BAHARI ABADI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
92	BUT MEDCO E&P NATUNA LTD.	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
93	PT SUMBER ALAM SEGARA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
	OLIVER QUESIRIN	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
94	PT GARAYA MANDIRI SENTOSA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
95	CV HOKI PUTRA SABANG	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
96	PT KASIH KARUNIA GRAHA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
97	PT ANTASENA KENCANA PRIMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
98	PT HARMONI SAMUDRA PERKASA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
99	PT SERVOTECH INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
100	PT INDOPRIMA KARISMA JAYA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
101	PT INDAH MAKMUR MANDIRI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
102	PT TAMBANG JAYA INDAH	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
103	PT BELINYU LANCAR BERSAMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
104	ALFIQRI ERWANDI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
105	AZMAN MOHD ZAM	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
106	PT AKU SAYANG UDANG	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
107	PT AIR SENE JAYA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
108	PT AIR SENE JAYA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
109	LAY HUAT	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
110	PT PASIFIK KARYASINDO PERKASA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
111	PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
112	PT MAJESTY SARANA ENERGY	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
113	PT SEAX INDONESIA PRATAMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
114	PT PULAU NIKOI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
115	PT BINTAN BATAM PRATAMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
116	PT GBKEK INDUSTRI PARK	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
117	PT GBKEK INDUSTRI PARK	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
118	PT TERMINAL BUDIDAYA BINTAN	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
119	AGUS	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
120	PT BINTAN SEJAHTERA SELALU	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
121	SALIKIN	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
122	RAMZI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
123	PT BUMI CITRA PATRA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
124	PT BINTAN PERMATA BEACH RESORT	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
125	PT MULTI AUTO PROTECT	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
126	SURIADI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
127	NESA JUSISA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
128	PT BINTAN INDO SEJAHTERA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
129	EVLINA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
130	PT PULAU BINTANG EMAS	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
131	CV PANORAMA LINTAS TIMUR	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
132	PT BANGKA AQUA CULTURE	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
133	FA TERUS JAYA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
134	PT FENCO PASIFIK INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
135	PT BANGKA BELITUNG MARITIM SEJAHTERA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
136	PT SEMERU TEKNIK	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
137	CV TAMBAK INDO HARMONIS	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
138	PT HOKINDO CIPTA HARMONIS	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
139	PT SABANG MITRA SUKSES	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
140	CV PUTRA PUTRI SANUSI SEJAHTERAH	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
141	PT SABANG MITRA SUKSES	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
142	PT BERSHAHAJA BERKAT SAHABAT JAYA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
143	PT PRIMA BUNDIARTA NUSA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
144	PT WIN WIN SHRIMP	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
145	PT SINAR MUTIARA SEJAHTERA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
146	PT HASIL ALAM SUKSES PRATAMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
147	CV JAYA MAKMUR SJAHTRA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
148	PT CENTRAL PROTEINA PRIMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
149	PT TIMAH	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
150	PT TIMAH	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
151	PT TIMAH	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
152	PT SAMUDRA BERHASIL BERSAMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
153	CV SURYA TAMBAK LESTARI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
154	BUT WEST NATUNA EXPLORATION LTD.	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
155	PT BULAN BAHARI DIGDAYA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
156	PT BABASEL MITRA ABADI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
157	CV MEGA TAMBAK SEJAHTERA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
158	CV BELITONG JAYA VANAME	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
159	PT TRISULA VANAME INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
160	PT TIMAH	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
161	PT TIMAH	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
162	PT TIMAH	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
163	PT MADANI SUKSES CEMERLANG	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
164	PT PUTERA SARANA SHAKTI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
165	PT KARYA KARIMUN MANDIRI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
166	PT ASIANFAST MARINE INDUSTRIES	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
167	PT LAUTAN FISHERY NATUNA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
168	PT WIJAYA MANDIRI TEKNIK KREASI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
169	PT DIAN BUMI MARITIM	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
170	PT TIMAH	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
171	PT HASIL LAUT SEJATI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
172	PT ASTA PREMIER OIL	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
173	PT SYNERGY MAJU BERSAMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
174	PT LESTARI ALAM SELINDUNG	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
175	PT PASIFIK ESTATINDO PERKASA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
176	PT SAMUDRA INTI PERSADA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
177	PT VESINTER INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
178	PT ARGHANI BOGA SEJAHTERA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
179	PT SIRTU ALAM PERSADA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
180	PT DIPON PUTRA JAYA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
181	PT WALIE TAMPAS CITRATAMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
182	PT SURYA FRESHINDO INTIMAS	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
183	PT SINAR PARIT UNGAR	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
184	PT SMOE INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
185	PT EUNINDO USAHA MANDIRI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
186	PT SATHIA UTAMA ADHINARENDRA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
187	PT SUMBER BERKAT MULTIARTHA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
188	PT JEBUS TEBAT LESTARI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
189	PT CIPTA PERSADA MULIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
190	CV MAHLIGAI PUTRI UNO	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
191	PT ARTHA CIPTA LANGGENG	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
192	PT BLUE STEEL INDUSTRIES	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
193	PT AEGA PRIMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
194	PT CIPTA PERSADA MULIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
195	PT BELITUNG NANYANG MITRA BERSAMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
196	PT TRI TUNAS UNGGUL	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
197	PT CIPTA REZEKI KITA BERSAMA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
198	PT PSR MUTIARA ABADI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
199	PT TAMBAK MITRA SEKAWAN	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
200	PT BANGKA PUTRA TAMBAK	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
201	PT TIMAH	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
202	PT LILANGAN BAHARI SEJAHTERA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
203	PT MINERAL BUMI KHATULISTIWA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
204	PT ALAM LEPAR SEJAHTERA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
205	PT MALAKA ABADI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
206	PT WIDA MULYA SEJAHTERA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
207	PT MCDERMOTT INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
208	PT SENTEK INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
209	PT CAHAYA TERANG SEJATI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
210	PT CAHAYA SAMUDERA BANGKA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
211	PT BANGKA AKUAKULTUR NUSANTARA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
212	PT KARIMUN MINING	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
213	PT MULTI OCEAN SHIPYARD	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
214	PT LADI KAWASAN INDUSTRI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
215	PT GAHARA SAMUDRA BERLIAN	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
216	PT TIANSHAN ALUMINA INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
217	PT TIANSHAN ALUMINA INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
218	PT DEGONG KARYA PERKASA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
219	BUDIDAYA TAMBAK UDANG	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
220	PT HOKI ALAM SEMESTA JAYA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
221	PT SUKSES BERSAMA AQUAFARM INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
222	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
223	PT GILANG BAHARI UNGGUL	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
224	PT BUMI BARELANG BESTARI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
225	PT BUKIT ALAM PERSADA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
226	PT MINERAL ALAM LINGGA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
227	NELLY	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
228	PT BELITUNG SAND MINING	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
229	PT ARGALAM PONGKAR	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
230	PT SHRIMPI DAYA LESTARI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
231	PT UTAMA RESORT BATAM	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
232	PT SUMBER ALAM ANTARNUSA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
233	PT BUMI NATURA INDONESIA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
234	PT BUKIT PANTAI ABADI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
235	PT SEJAHTERA MITRAJAYA MANDIRI	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
236	PT TIMAH	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
237	PT SYNERGY THARADA	SP 1	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
238	FA TERUS JAYA	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
239	CV TAMBAK INDO HARMONIS	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
240	PT HOKINDO CIPTA HARMONIS	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
241	PT TOMMINDO INTI BAHARI	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
242	PT SABANG MITRAJAYA ABADI	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
243	CV BETING TAMBAK BELIJONG	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
244	PT CHANDRA ANUGERAH AQUAVINDO	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
245	PT NUSANTARA VERITAS TRINITAS	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
246	PT KARYA EMAS MULTISANI	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
247	PT BERSHAJA BERKAT SAHABAT JAYA	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
248	PT MARIAN ANUGRAH AKUA	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
249	CV ANUGRAH KENCANA MANDIRI	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
250	PT KASIH KARUNIA GRAHA	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
251	PT ASTA PREMIER OIL	SP 2	Tidak Menyampaikan laporan tahunan
252	PT. Kreasi Prima Sejati Anambas	Rp 33.121.115	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif</p>

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
			<p>sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p> <p>3. Pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya (Terumbu Karang)</p> <p>4. Pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya (Populasi Ikan)</p>
253	PT. MCCS International Indonesia	Rp 52.014.360	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>
254	PT. Karya Teknik Utama	Rp 40.105.200,00	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p>

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
			2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi
255	PT. Citra Shipyard	Rp 636.731.440	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>
256	PT. Citra Semarak Sejati	Rp 122.509.520	<p>1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p>

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
257	PT. Dewi Citra Kencana	Rp 199 321 875	<p>1. Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi</p> <p>3. Pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya (ekosistem terumbu karang)</p> <p>4. Pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya (populasi ikan)</p>
258	PT Safari Lagoi Bintan	SP 1	Kepemilikan Jenis ikan yang membahayakan dan atau merugikan (JIMM)
259	PT. Galang Batang Indah	Rp 27.471.344	<p>1. Pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut.</p> <p>2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut (denda reklamasi)</p>
260	PT. Growa Indonesia	Rp 10.030.000	1. Pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
			KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut.  2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut (denda reklamasi)
261	PT. Mitra Dok Perkasa	Rp 38.580.000	1. Pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut.  2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut (denda reklamasi)
262	PT. Mutiara Anambas	Rp 21.256.792	1. Pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut.  2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut (denda reklamasi)
263	PT. Sinar Singkep Sejahtera	Rp 35.151.788	1. Pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut.  2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut (denda reklamasi)
264	KM Bintang Samudra Jaya	SP 1	Melakukan kegiatan penangkapan ikan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang dimilikinya serta menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
			(SIPI) yang masa berlakunya telah habis atau tidak berlaku lagi
265	KM PRIMA MAKMUR 88	SP 1	Melakukan kegiatan penangkapan ikan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang dimilikinya serta menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masa berlakunya telah habis atau tidak berlaku lagi
266	KM. BINTANG TERANG I	SP 1	Melakukan kegiatan penangkapan ikan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang dimilikinya serta menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masa berlakunya telah habis atau tidak berlaku lagi
267	KM. HENDRA JAYA 3	SP 1	Melakukan kegiatan penangkapan ikan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang dimilikinya serta menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masa berlakunya telah habis atau tidak berlaku lagi
268	KM. MANDIRI 88	SP 1	Melakukan kegiatan penangkapan ikan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang dimilikinya serta menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masa berlakunya telah habis atau tidak berlaku lagi

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
269	KM. HUO YAN 1	SP 1	Melakukan kegiatan penangkapan ikan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang dimilikinya serta menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masa berlakunya telah habis atau tidak berlaku lagi
270	KM. MEKAR INDAH 2	SP 1	Melakukan kegiatan penangkapan ikan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang dimilikinya serta menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masa berlakunya telah habis atau tidak berlaku lagi
271	KM. ASIA JAYA	SP 1	Melakukan kegiatan penangkapan ikan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang dimilikinya serta menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masa berlakunya telah habis atau tidak berlaku lagi
272	KM. RANGSANG ABADI JAYA	SP 1	Melakukan kegiatan penangkapan ikan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang dimilikinya serta menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masa berlakunya telah habis atau tidak berlaku lagi
273	KM. SUMBER PERKASA 89	SP 1	Melakukan kegiatan penangkapan ikan aktivitas yang tidak sesuai

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
			dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang dimilikinya serta menggunakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang masa berlakunya telah habis atau tidak berlaku lagi
274	KM NOJA HARAPAN	SP 1	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha
275	KM CAHAYA SINJAI	SP 1	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha
276	KM Geraldo 1	SP 1	Melakukan pelanggaran penangkapan tidak memenuhi perijinan Berusaha, yaitu menggunakan alat tangkap Jaring Hela Ikan Berkantong tidak sesuai dengan spesifikasi alat tangkap yang tertera pada Perizinan Berusaha dimiliki;
277	KM PUTRA ALDI 04	SP 1	Melakukan pelanggaran penangkapan tidak memenuhi perijinan Berusaha, yaitu menggunakan alat tangkap Jaring Hela Ikan Berkantong tidak sesuai dengan spesifikasi alat tangkap yang tertera pada Perizinan Berusaha dimiliki;
<b>Total Denda</b>			<b>Rp 2.163.445.633</b>

Indikator ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan indeks sebesar 1,00 namun tetap tercapai 100% pada tahun 2025. Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang dikenakan sanksi administrative adalah dampak dari meningkatnya keaktifan pengawasan di tahun 2025.

Evaluasi dan analisis pada **IKU10 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan** diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 7 (Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan)**, yaitu:

**10) INDEKS PEMERIKSAAN HASIL ANALISIS PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU12	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80	73,59	91,99
		2024	80	80	100,00
		<b>2025</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>100,00</b>

Capaian indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Batam sebesar 100 % yang mana diperoleh dari target indeks pada 2025 adalah 81 (delapan puluh satu) dan tercapai 81 (delapan puluh satu). Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, maka pada tahun 2025 ini terdapat peningkatan indeks sebesar 1,00 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra.

Hal ini dikarenakan adanya peningkatan hasil tindak lanjut SPKP untuk kapal dengan domisili di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam. Untuk kapal yang belum dilakukan tindak lanjut merupakan kapal yang berada di luar wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam namun kapal perikanan yang dioperasikan memiliki izin Pelabuhan Pangkalan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam, sehingga akan dilaksanakan tindak lanjut ketika kapal melaporkan kedatangan di Satwas/Wilker/UPT Pangkalan PSDKP Batam.

Tercapainya indikator ini dikarenakan sudah dilaksanakannya tindak lanjut terhadap 136 (seratus tiga puluh enam) unit kapal perikanan Indonesia yang diindikasikan melakukan pelanggaran sepanjang tahun 2025. Adapun detailnya adalah sebagai berikut : 2 (dua) unit kapal dilakukan surat peamanggilan, 3 (tiga) unit kapal dalam tahap permintaan keterangan, 79 (tujuh puluh sembilan) kapal yang dikategorikan tidak melakukan pelanggaran setelah dilaksanakan evaluasi oleh tim dari Tim kerja Penanganan Pelanggaran dan Tim kerja Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan, 46 (empat puluh enam) unit kapal yang telah dikeluarkan Surat Peringatan I (SP 1), dan 6 (enam) kapal telah dikeluarkan Surat Peringatan II (SP 2).

No	PELANGGARAN	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)	DALAMPROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BAP	BUKAN PELANGGARAN	S P1	S P2	DENDA
1	TRANSSHIPMENT	5	0	5	0	0	0	4	1	0
2	PELABUHAN PANGKALAN	11	0	11	0	0	6	4	1	0
3	DPI	13	0	13	0	0	8	5	0	0
4	JALUR (<12NM)	90	2	88	2	2	54	26	4	0
5	ZONA KONSERVASI	19	0	19	0	1	11	7	0	0
6	Total	136	0	136	2	3	79	46	6	0

Pagu anggaran 2025 untuk pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan masuk dalam anggaran pengenaan sanksi administratif mendapat pagu sebesar Rp 300.800.000,- sebelum anggaran direvisi dan dipangkas terkait kebijakan penghematan anggaran dari pusat dan setelah direvisi terkait penghematan anggaran pagunya berubah menjadi Rp 120.294.000,- dan telah terealisasi sejumlah **Rp 119,191,054,- atau sekitar 99,09 %**. Terdapat sisa anggaran sejumlah Rp 1.102.946,- yang terdiri dari sisa anggaran konsumsi dan sisa anggaran perjalanan dinas evaluasi pengenaan sanksi administratif.

Evaluasi dan analisis pada **IKU11 Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan** diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 8 (Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan)** yaitu:

#### 11) INDEKS PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IKU14	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	93	97,78	105,14
		2024	93	100	107,53
		<b>2025</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>106,38</b>

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, maka pada tahun 2025 tidak terdapat peningkatan atau penurunan indeks, masih tetap dengan capaian 100 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra. Hal ini dikarenakan seluruh kasus TPKP pada tahun 2024 dan 2025 telah selesai tahap II.

Pengukuran capaian Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan pada tahun 2025 yaitu 106,38 % dengan target 94 dan tercapai 100.

Indikator ini merupakan perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Capaian ini membandingkan antara jumlah kasus di tahun berjalan yang telah selesai ditangani. Tercapainnya indikator ini dikarenakan kasus di Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 telah menangani 5 (lima) kasus Tindak Pidana Perikanan (TPP), 1 (satu) kasus sementara dalam proses persidangan dan 4 (empat) kasus lagi sudah inkrah. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 mendapat pagu anggaran pengenaan sanksi pidana sebesar Rp 116.375.000,- dan setelah adanya program efisiensi dari pusat, anggaran sanksi pidana berubah menjadi Rp 93.324.000,-. Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi anggaran dari penanganan Tindak Pidana kelautan dan Perikanan pada mata anggaran 2351 sebesar Rp 92.174.460,- atau 98,77%. Terdapat sisa anggaran sejumlah Rp 1.149.540,- yang terdiri dari sisa anggaran belanja bahan dan sisa anggaran perjalanan dinas dalam rangka tindak lanjut penyidikan TPKP. Karena terbatasnya anggaran penyidikan di akun 2351, kami mendapat tambahan anggaran penyidikan dari akun 2350 (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) sejumlah 4 (empat) kasus dengan total anggaran Rp 285.393.000,- dan telah terealisasi sejumlah **Rp 284.691.510,- atau 99,75 %**. Terdapat sisa anggaran sejumlah Rp 701.490,- yang terdiri dari sisa anggaran belanja bahan.

Detail Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang ditangani PPNS Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Nama Tersangka	Nama Kapal	Pelanggaran	Keterangan
1.	LEI YONG	KM. SUMBER JAYA 1990	Melakukan usaha perikanan berupa penangkapan ikan di Perairan Karang Hawkins/Karang Telo Laut Bangka WPPNRI 711 tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dengan menggunakan alat tangkap jenis Muroami yang dilarang dioperasikan di seluruh WPPNRI serta melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen surat persetujuan berlayar (SPB)	Inkrah

No	Nama Tersangka	Nama Kapal	Pelanggaran	Keterangan
2.	NGO BINH DANG	KM. 936 TS Alias KG 93682 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut Natuna Utara, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap Jaring Tarik Trawl yang dilarang dioperasikan diseluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya	Inkrah

No	Nama Tersangka	Nama Kapal	Pelanggaran	Keterangan
3.	CAO VAN PHUONG	KG 95762 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut Natuna Utara, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap Jaring Pair Trawl yang dilarang dioperasikan diseluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya	Inkrah

No	Nama Tersangka	Nama Kapal	Pelanggaran	Keterangan
4.	WAI YAN OO	KM. PKFA 9586	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Perairan Selat Malaka, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap Jaring Trawl yang dilarang dioperasikan diseluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya	Inkrah

No	Nama Tersangka	Nama Kapal	Pelanggaran	Keterangan
5.	NGUYEN VAN DAU	HP 9213 TS Alias KG 90816 TS	Melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut Natuna Utara, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia berupa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap Jaring Pair Trawl yang dilarang dioperasikan diseluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya	Proses Sidang

Evaluasi dan analisis pada IK12, IK13, IK14, IK15, IK16, IK17, IK18, IK19, IK20, IK21, IK22 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 09 (Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan)** yaitu:

## Evaluasi dan analisis pada IK12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA)

lingkup Pangkalan PSDKP Batam, yaitu:

### 12) NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKA) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BATAM

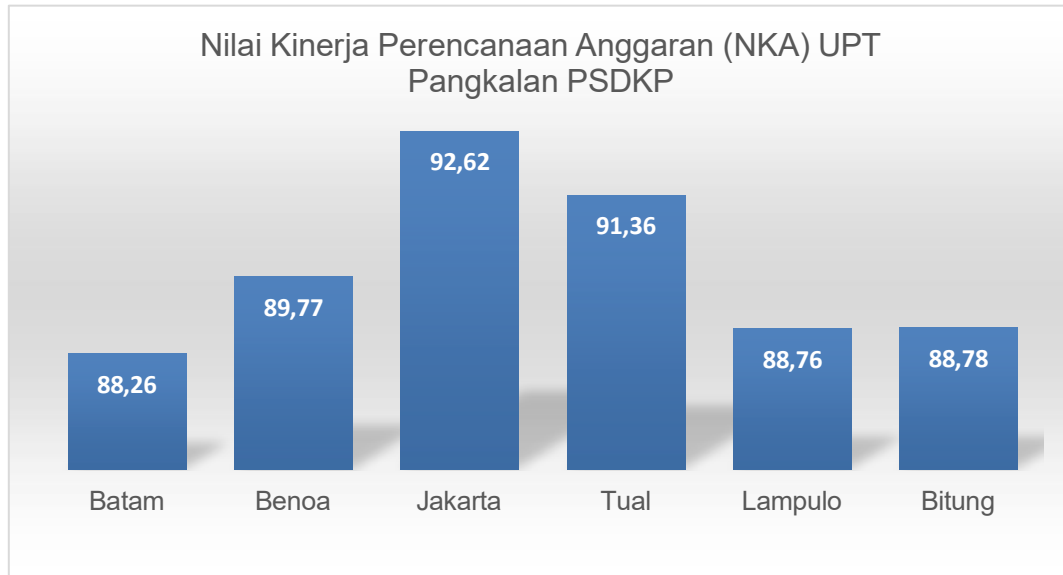
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	82	95	120,00
		<b>2025</b>	<b>71,5</b>	<b>88,26</b>	<b>120,00</b>

Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah ukuran efektivitas dan kualitas proses penyusunan anggaran, yang mencakup aspek akurasi, ketepatan, relevansi tujuan, efisiensi, partisipasi, dan kepatuhan aturan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 71,5 dan tercapai 88,26 atau tercapai 120%. Indikator ini merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan terget yang telah direncanakan sebelumnya. Tercapaiannya indikator ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu serta pelaksanaan perencanaan anggaran.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaiannya sama yaitu 120% namun targetnya turun menjadi Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 71,5 dan capainnya menjadi 88,26. Indikator ini baru ditargetkan ke UPT pada tahun 2024 yang mana juga pada periode akhir renstra. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu. Untuk rincian NKA dapat dilihat pada gambar berikut.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
26	032.05.325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	88,26	98,19	91,67	36,35	

Pada tahun 2025 pagu anggaran untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah Rp. 0,- karena adanya efisiensi. Sedangkan untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Apabila dibandingkan dengan capaian Pangkalan PSDKP Lampulo, Bena, Bitung dan Tual, capaian Pangkalan PSDKP Batam paling rendah karena target perencanaan pada Pangkalan PSDKP Batam kurang tepat. Hal ini menjadi perhatian khusus atau perbaikan di tahun 2026. Hal yang harus dilakukan adalah memantapkan perencanaan kegiatan yang melibatkan ketua tim kerja. Pelaksanaan dilakukan monitoring dan evaluasi secara perbulan maksimal per triwulan.

Evaluasi dan analisis pada **IK13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam**, yaitu:

### **13) INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATKER LINGKUP PANGKALAN PSDKP BATAM (NILAI)**

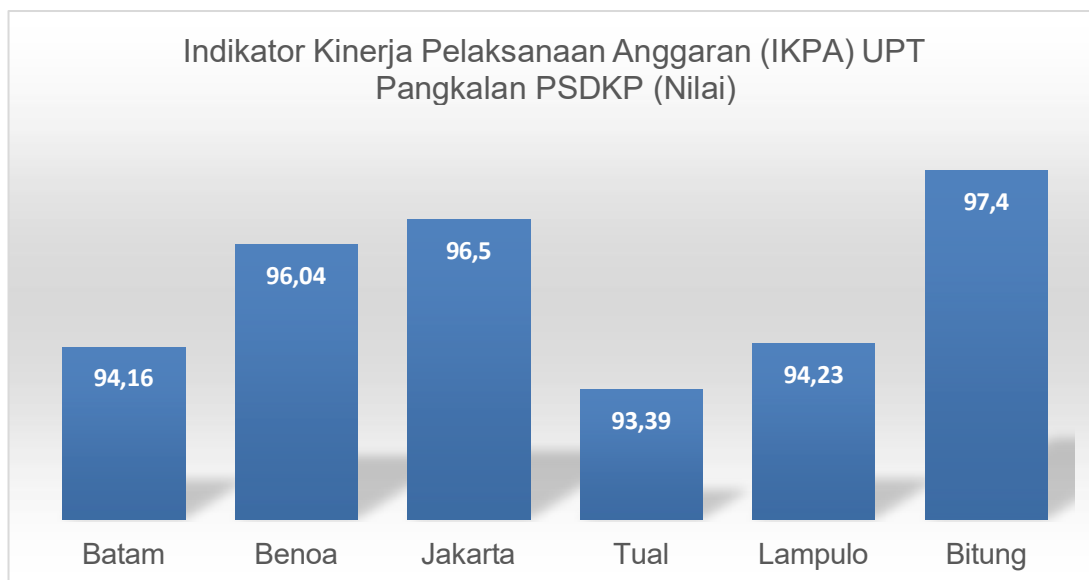
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	2021	89	97,08	109,08
		2022	89	96,09	107,97
		2023	93,75	91,59	97,70
		2024	93,76	96,36	102,77
		<b>2025</b>	<b>92</b>	<b>94,16</b>	<b>102,35</b>

Target Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam adalah 92 dan tercapai 94,16. Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada fitur Monev PA aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. adapun indikatornya yaitu <sup>(1)</sup> Revisi DIPA, <sup>(2)</sup> Deviasi DIPA <sup>(3)</sup> Pengelolaan UP, <sup>(4)</sup> LPj Bendahara, <sup>(5)</sup> Data Kontrak, <sup>(6)</sup> Penyelesaian Tagihan, <sup>(7)</sup> Penyerapan Anggaran Tahun 2025 <sup>(8)</sup> Retur SP2D, <sup>(9)</sup> Perencanaan Kas, <sup>(10)</sup> Pengembalian SPM, <sup>(11)</sup> Dispensasi SPM dan <sup>(12)</sup> Pagu Minus dengan rincian sebagai berikut.

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
104	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	88.89	95.03	80.00	100.00	88.24	100.00	94.16	100%	0.00	94.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.01	8.00	10.00	8.82	25.00				
					Nilai Aspek	94.45		90.82				100.00				

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian tahun 2025 terdapat penurunan sebesar 0,42 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi dan buka blokir di bulan November 2025. Selain itu juga terpenuhinya seluruh target output sehingga capaian output Pangkalan PSDKP Batam mendapat nilai 100. Adapun anggaran tahun 2025 untuk kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 21.450.000,- serta terealisasi sebesar **Rp.**

**21.448.034,- atau 99.99%** dari pagu efektif. Sedangkan untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Jakarta, Bena, Tual, Bitung, Lampulo, capaian Pangkalan PSDKP Batam paling rendah. Hal ini dikarenakan kualitas pelaksanaan anggaran belanja kontraktual masih rendah, sehingga mempengaruhi nilai total IKPA. Tahun 2026, perlu dilakukan peningkatan nilai IKPA dengan memperbaiki pelaksanaan kontraktual, seperti pembelian BBM untuk kapal pengawas dan pengadaan barang/jasa.

Evaluasi dan analisis pada **IK14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam**, yaitu:

**14) INDEKS PROFESIONALITAS ASN UNIT KERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BATAM**

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK14	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2021	73	79,03	108,27
		2022	77	80,43	103,89
		2023	78	89,04	114,15
		2024	82	87,9	107,20

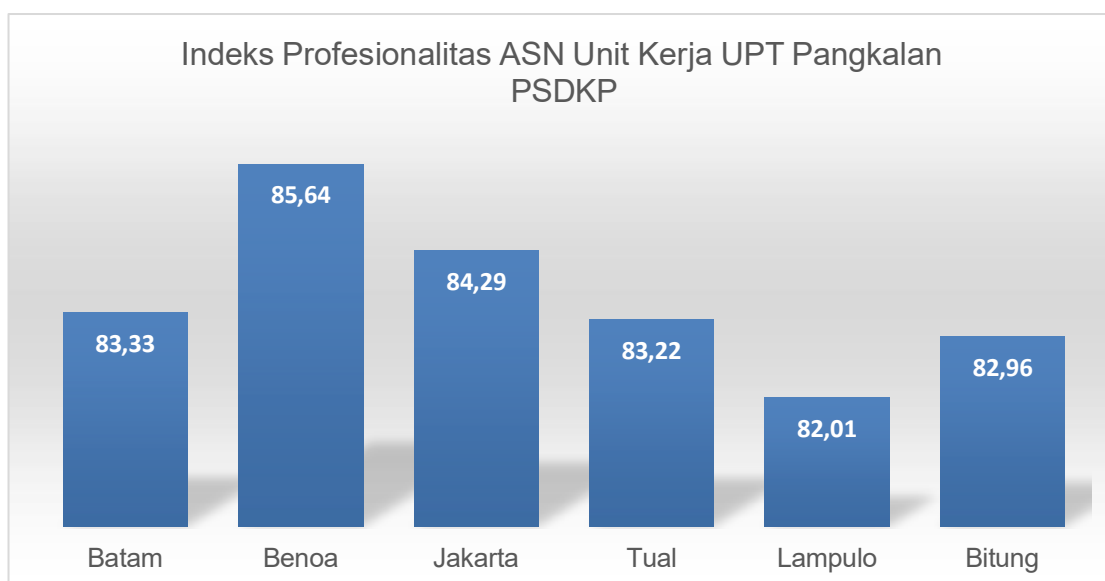
		<b>2025</b>	<b>81</b>	<b>83,33</b>	<b>102,88</b>
--	--	-------------	-----------	--------------	---------------

Target Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam tahun 2025 adalah 81 dan tercapai 83,33 atau 102,88. Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu <sup>(1)</sup> Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, <sup>(2)</sup> Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat teknis bagi pejabat fungsional umum, Diklat 20 JP atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), <sup>(3)</sup> Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan <sup>(4)</sup> Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat selisih indeks sebesar 3,57, sebelumnya 87,9 menjadi 83,33 yang juga menjadi capaian pada akhir periode renstra. Penurunan ini disebabkan belum fahamnya semua pegawai terkait penghitungan IP ASN dan komponen-komponen penyusunnya. Selain itu, pegawai mengupload sertifikat pelatihan di triwulan IV 2025 yang mana berpotensi tidak dilakukan updating oleh operator My ASN. Untuk meningkatkan IP ASN tahun 2026 ini, Pangkalan PSDKP Batam akan mengadakan sosialisasi pemenuhan IP ASN ke semua ASN pada bulan Februari 2026 dan pegawai melakukan upload atau update pelatihan di My ASN paling lambat triwulan III 2026. Pegawai dapat mengikuti diklat atau seminar secara online melalui e melia KKP maupun platform lainnya.

Adapun anggaran tahun 2025 untuk Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu manajemen SDM sebesar Rp. 39.074.000,- serta terealisasi sebesar **Rp. 39.074.000,-** atau sebesar **100%** dari pagu

efektif. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



IP ASN Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Lampulo, Tual, dan Bitung. Hal ini menunjukkan pegawai Pangkalan PSDKP Batam Sebagian besar telah mengikuti pelatihan maupun bimtek secara *online* maupun *offline*. Namun perlu dilakukan peningkatan nilai IP ASN tahun 2026.

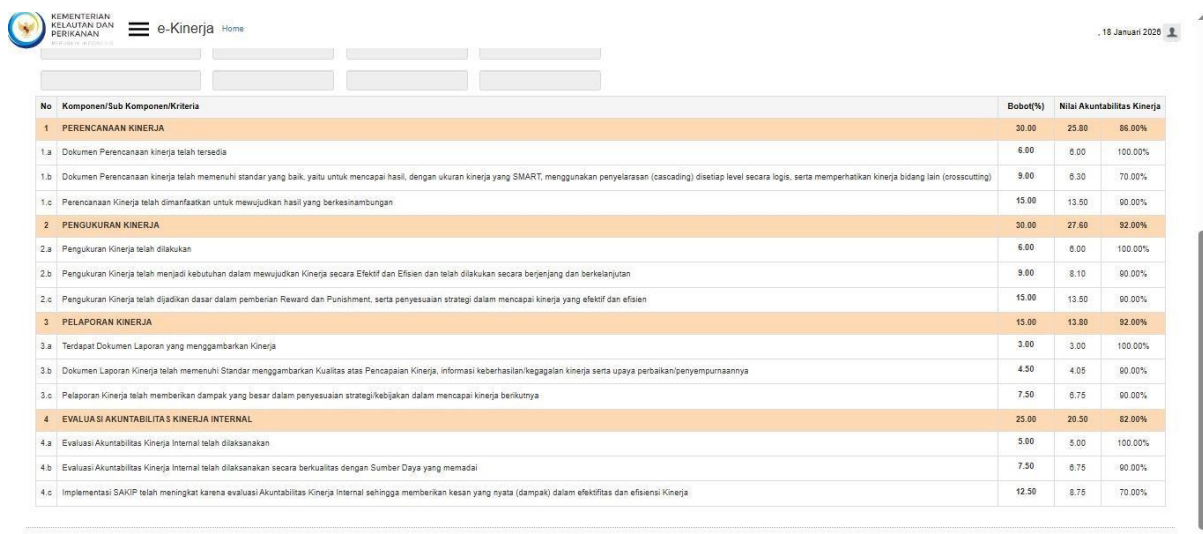
Evaluasi dan analisis pada **IK15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)**, yaitu:

#### 15) PENILAIAN MANDIRI SAKIP SATKER PANGKALAN PSDKP BATAM (NILAI)

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Batam	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	80,5	81,25	100,93
		2024	84	85,2	101,43
		<b>2025</b>	<b>86</b>	<b>90</b>	<b>104,65</b>

Target Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2026 yaitu 86 dan tercapai 90 atau 104,65%. SAKIP adalah instrumen yang digunakan

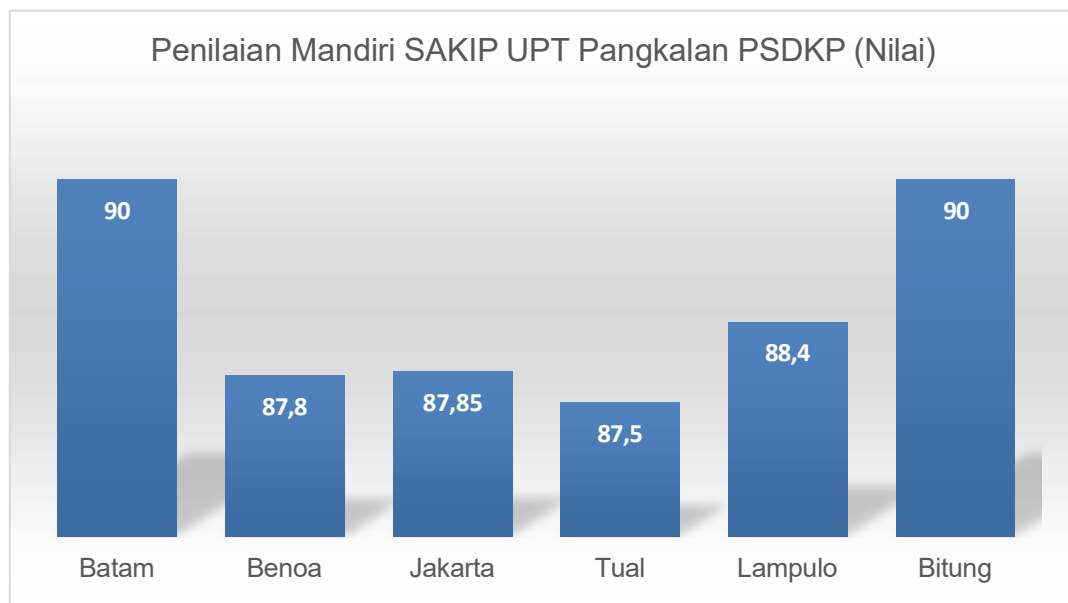
instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Untuk rincian nilai sebagai berikut.



No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot(%)	Nilai	Akuntabilitas Kinerja
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>	<b>25,80</b>	<b>86,00%</b>
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6,00	100,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyaliran (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,30	70,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50	90,00%
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>	<b>27,60</b>	<b>92,00%</b>
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6,00	100,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjejang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	13,50	90,00%
<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15,00</b>	<b>13,80</b>	<b>92,00%</b>
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	3,00	100,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	4,05	90,00%
3.c	Laporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	90,00%
<b>4</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25,00</b>	<b>20,50</b>	<b>82,00%</b>
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	5,00	100,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8,75	70,00%

Terhadap hasil evaluasi tersebut maka SAKIP di Pangkalan PSDKP Batam telah berpredikat Baik. Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya pendampingan dari tim Monev Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP dan penilaian oleh Inspektorat II. Selain itu, Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan pemenuhan dokumen dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja tahun 2024 dan 2025. Harapannya, pada penilaian SAKIP tahun 2026, nilai SAKIP Pangkalan PSDKP Batam dapat meningkat minimal sama. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebelumnya 85,2 maka pada tahun 2025 menjadi 90 atau terdapat peningkatan nilai sebesar 4,8 dimana juga sebagai capaian pada akhir periode renstra.

Anggaran untuk pengelolaan kinerja organisasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 0,- karena semua terkena blokir efisiensi. Sedangkan untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Nilai SAKIP Pangkalan PSDKP Batam sama dengan Pangkalan PSDKP Bitung dan di atas Pangkalan PSDKP Benoa, Jakarta, Tual, dan Lampulo. Seluruh Pangkalan lingkup Ditjen. PSDKP telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria A. Hal ini dikarenakan pemenuhan dokumen pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi telah tersedia.

Evaluasi dan analisis pada **IK16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)**, yaitu:

**16) PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN BERBASIS MANAJEMEN RISIKO LINGKUP PANGKALAN PSDKP BATAM (%)**

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	100	100	100,00
		2024	100	100	100,00

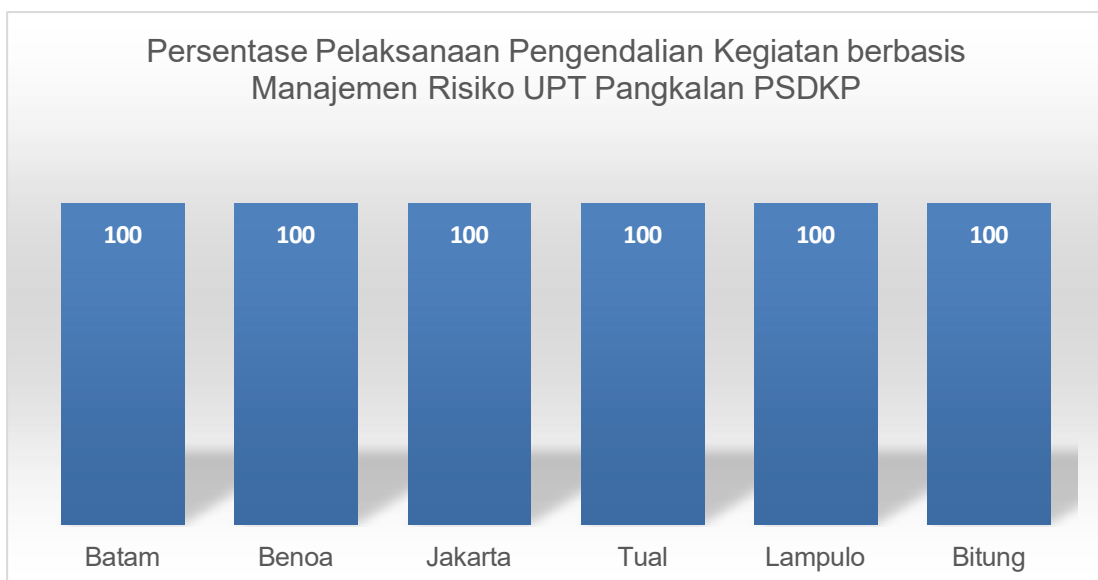
		<b>2025</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>105,00</b>
--	--	-------------	------------	------------	---------------

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 100% dan tercapai 100%. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Tercapainya indikator ini dikarenakan telah dilakukan pengendalian mitigasi melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan setiap triwulan pada pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Kemudian adanya pendampingan dari tim Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP dalam

monitoring serta evaluasi form pengendalian pada setiap UPT PSDKP. Indikator ini mulai ditargetkan pada tahun 2023 dengan capaian sampai akhir periode renstra sama yaitu 100% pada tahun 2025. Adapun pagu anggaran pengelolaan keuangan sebesar Rp. 21.450.000,- serta terealisasi **Rp. 21.448.034,- atau 99,99%** dari pagu efektif.

Capaian indikator ini pada seluruh Pangkalan PSDKP sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pada kegiatan yang memiliki risiko besar telah dilakukan mitigasi sejak awal. Sehingga pada saat pelaksanaan dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Evaluasi dan analisis pada **IK17 Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)**, yaitu:

**17) PRESENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BATAM YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN**

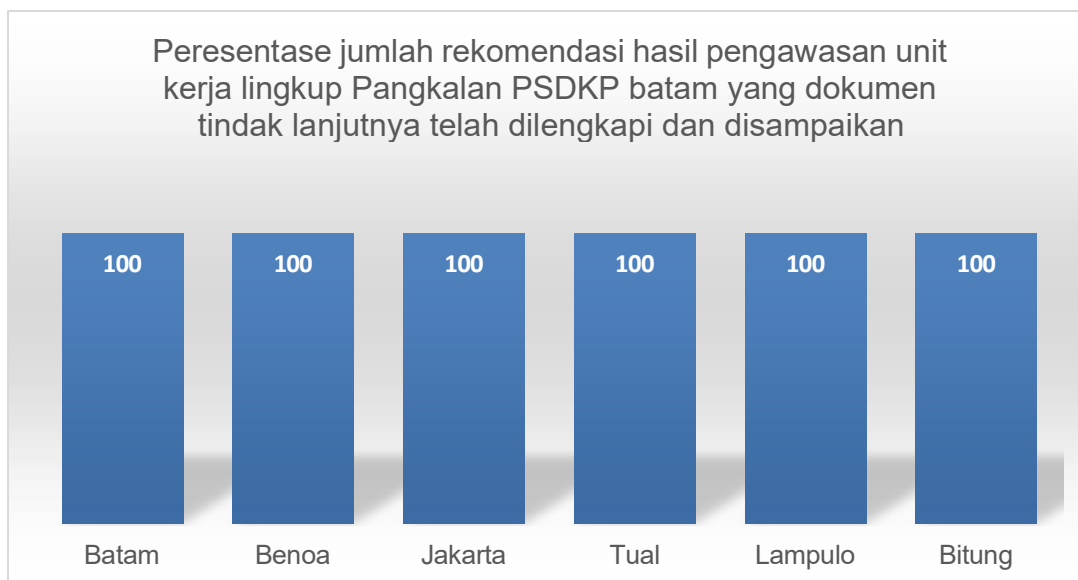
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK17	Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	2021	-	-	-
		2022	70	100	120,00
		2023	75	100	120,00
		2024	80	100	120,00
		<b>2025</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>120,00</b>

Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ditargetkan 95% dan tercapai 100%. Hal ini dikarenakan seluruh hasil evaluasi dari Itjen telah di tindaklanjuti Pangkalan PSDKP Batam serta pendampingan tim Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP dalam tindak lanjut hasil pengawasan ini. Jumlah rekomendasi itjen tahun 2025 ada 12 rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti semua oleh Pangkalan PSDKP Batam. Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Pada tahun 2024 dan tahun 2025 capaian indikator ini sama yaitu 100% Dimana juga sebagai capaian akhir periode renstra. Seluruh rekomendasi hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditindaklanjuti dan disampaikan. Tahun 2025 audit yang dilaksanakan adalah terkait penerapan *blue economi* di Pangkalan PSDKP Batam. Berdasarkan data dari Inspektorat Jenderal KKP, Pangkalan PSDKP Batam telah nihil temuan.

Pada tahun 2025 pagu anggaran untuk indikator ini. Adapun pagu anggaran pengelolaan keuangan sebesar Rp. 21.450.000,- serta terealisasi **Rp. 21.448.034,-**

atau **99,99%** dari pagu efektif. Sedangkan untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Capaian indikator ini di Pangkalan PSDKP Batam sama dengan capaian UPT Pangkalan PSDKP lainnya. Hal ini dikarenakan seluruh rekomendasi tindak lanjut Itjen di Pangkalan PSDKP Batam seluruhnya telah dilaksanakan.

Evaluasi dan analisis pada **IK18 Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam**, yaitu:

**18) NILAI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PUBLIK UNIT KERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BATAM**

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK18	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2021	80	91,40	114,25
		2022	80	88,93	111,16
		2023	80	89,00	111,25
		2024	80	87,92	109,90
		<b>2025</b>	<b>80</b>	<b>92,99</b>	<b>105,07</b>

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam dilakukan survey pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan baik

yang ada di UPT Pangkalan PSDKP Batam maupun Satuan Pengawas. Diharapkan terhadap kegiatan ini adalah adanya evaluasi untuk meningkatkan serta meminimalisir kekurangan pada pelayanan yang ada. Mulai triwulan III 2025, ada 2 (dua) layanan yang dilakukan penilaian kepuasan masyarakat, yaitu pelayanan penerbitan dokumen surat laik operasi (SLO) dan Hasil pemeriksaan kapal kedatangan (HPKD). Untuk mengukur tingkat kepuasan tersebut dilakukan survey pada triwulan IV 2025 ini.

Penerima layanan memberikan survey melalui link yang dihubungkan ke web Susan KKP. Pada web Susan KKP terdapat penyesuaian 9 (Sembilan) unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam yaitu:

1. Kesesuaian persyaratan;
2. Kemudahan prosedur;
3. Kesesuaian jangka waktu penyelesaian;
4. Kesesuaian biaya;
5. Kesesuaian produk;
6. Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi;
7. Kemudahan dalam penggunaan fitur;
8. Layanan konsultasi dan pengaduan;
9. Kualitas isi/konten .

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Pangkalan PSDKP Batam triwulan IV yang dijadikan penilaian tahun 2025 adalah 92.99 dari target 80. Dengan indeks 92,99 menandakan bahwa pelayanan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan pengawas perikanan serta petugas pelayanan telah mengikuti pelatihan Budaya Pelayanan Prima, menerapkan

SOP pelayanan serta adanya pendampingan dari Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP dalam pengelolaan survey sehingga kualitas pelayanan dapat maksimal dengan rincian sebagai berikut.

Detail Nilai SKM Per Unsur Triwulan IV Tahun 2025 Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	3,70	3,71	3,69	3,94	3,68	3,68	3,65	3,69	3,69
<b>Kategori</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>92,86 (A) SANGAT BAIK</b>								

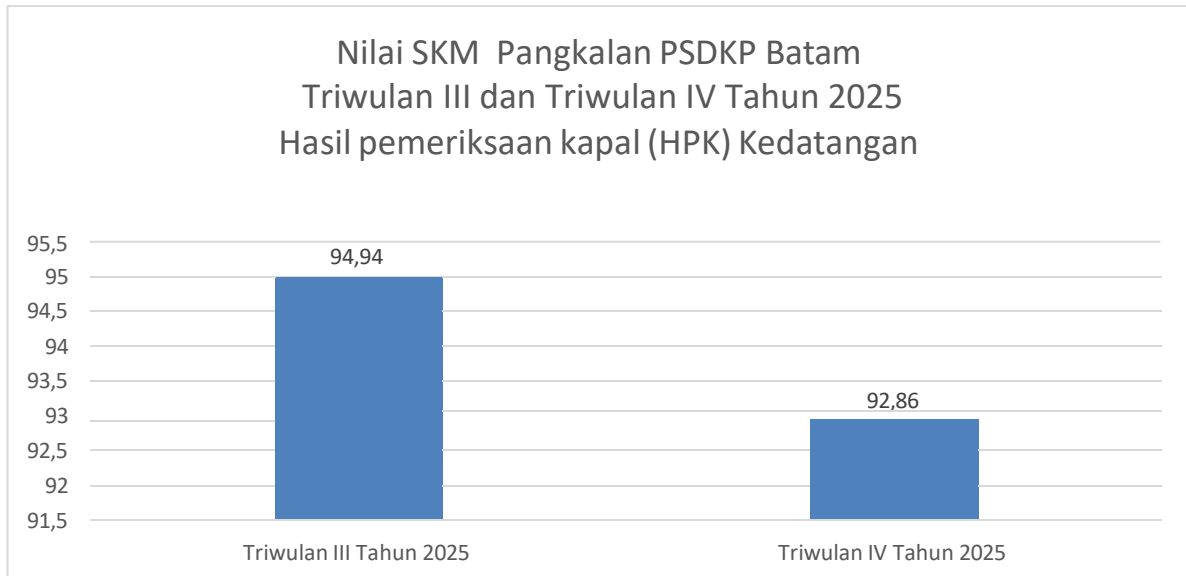
Detail Nilai SKM Per Unsur Triwulan IV Tahun 2025 Standar Laik Operasi (SLO)

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	3,74	3,71	3,72	3,90	3,69	3,70	3,67	3,72	3,68
<b>Kategori</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>93,14 (A) SANGAT BAIK</b>								

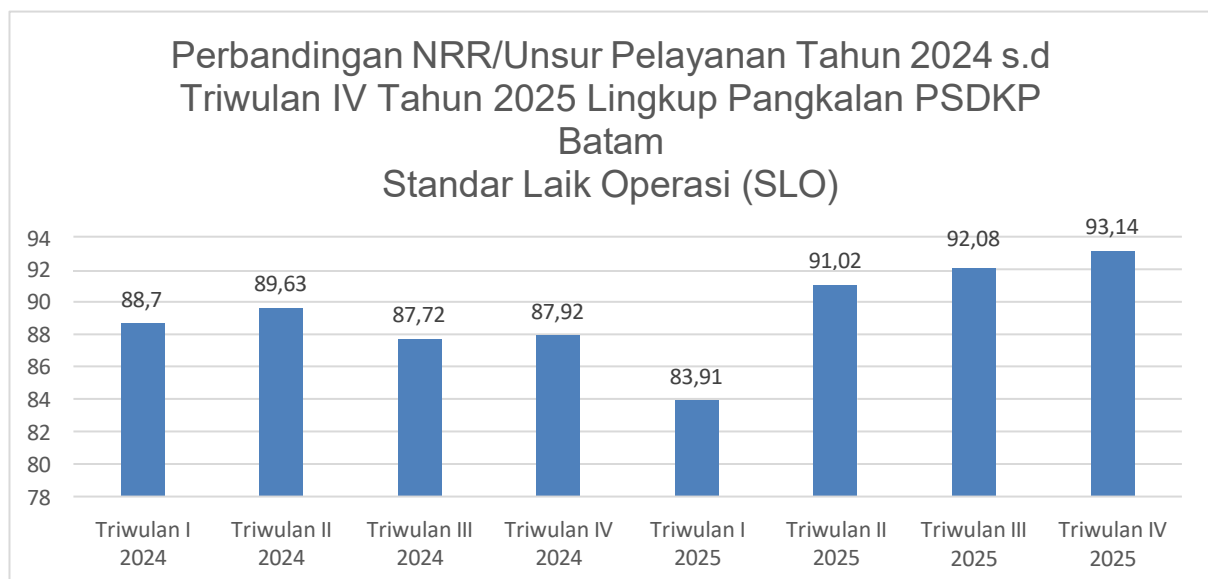
Dua Unsur layanan pada Layanan Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan mendapatkan nilai terendah dengan angka 3,65 pada unsur **kemudahan dalam penggunaan fitur** dan 3,68 pada unsur **kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi**. Masukan dari

pengguna layanan bahwa terkadang sistem yg harus diperbaiki karna sering gangguan sehingga menyebabkan keterlambatan pada penerbitan dokumen.

Dua Unsur layanan pada Layanan Standar Laik Operasi (SLO) mendapatkan nilai terendah dengan angka 3,67 pada unsur **kemudahan dalam penggunaan**



**fitur** pada aplikasi sistem layanan dan **kualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan dan 3,68 pada unsur **kualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan;



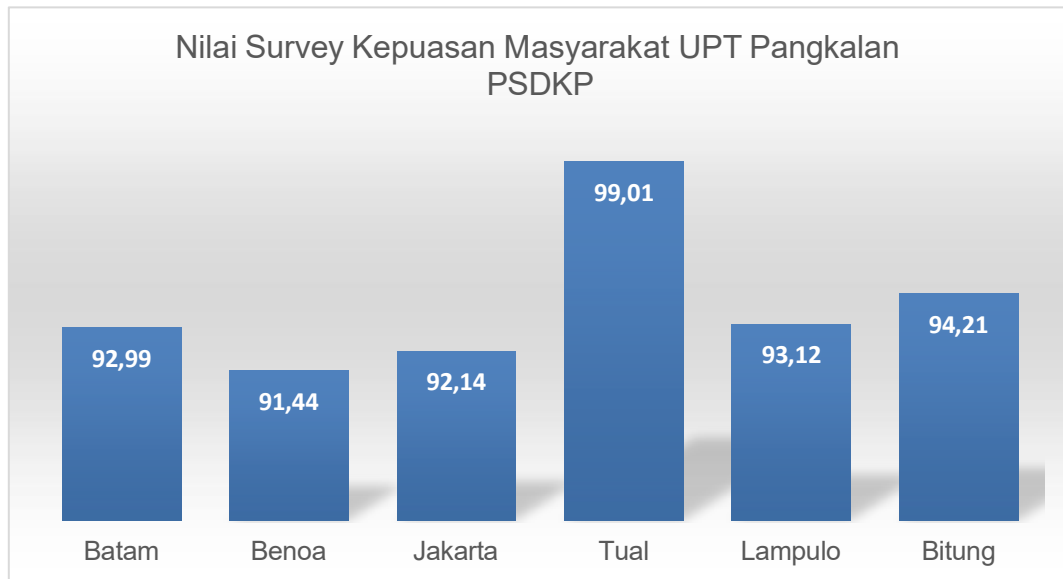
Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV 2025, nilai SKM layanan SLO cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan pemberi

layanan sudah memahami tujuan dari survey dan maksud dari masing-masing pertanyaan serta petugas melakukan perbaikan pelayanan. Untuk SKM pelayanan HPK Kedatangan triwulan IV 2025 mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan peningkatan layanan.

Namun demikian, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan mendatang perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan SLO sesuai SOP yang ada;
2. Responsife terhadap pertanyaan atau keluhan dari pengguna layanan;
3. Petugas/Pengawas perikanan tetap menjelaskan maksud dan tujuan survey kepuasan Masyarakat terhadap penerima layanan sebelum memberikan penilaian;
4. Petugas/Pengawas perikanan tetap menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dalam SKM sehingga pengguna layanan memberikan penilaian dengan objektif dan benar.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat selisih indeks sebesar 5,02 pada tahun 2025 yang juga menjadi capaian periode akhir renstra. Hal ini dikarenakan petugas layanan mengikuti pelatihan pelayanan prima, menerapkan SOP, dan menjelaskan maksud dan tujuan dari survey ke penerima layanan. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah acuan untuk peningkatan pelayanan di tahun berikutnya. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Capain indikator Pangkalan PSDKP Batam masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian Pangkalan PSDKP Benoa dan Jakarta. Pelayanan yang baik dan prima dilaksanakan oleh petugas Pangkalan PSDKP Batam memberikan dampak yang positif terhadap penilaian dari pengguna layanan.

Evaluasi dan analisis pada **IK19 Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam**, yaitu:

**19) NILAI MINIMAL YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBANGUNAN UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) LINGKUP PANGKALAN PSDKP BATAM**

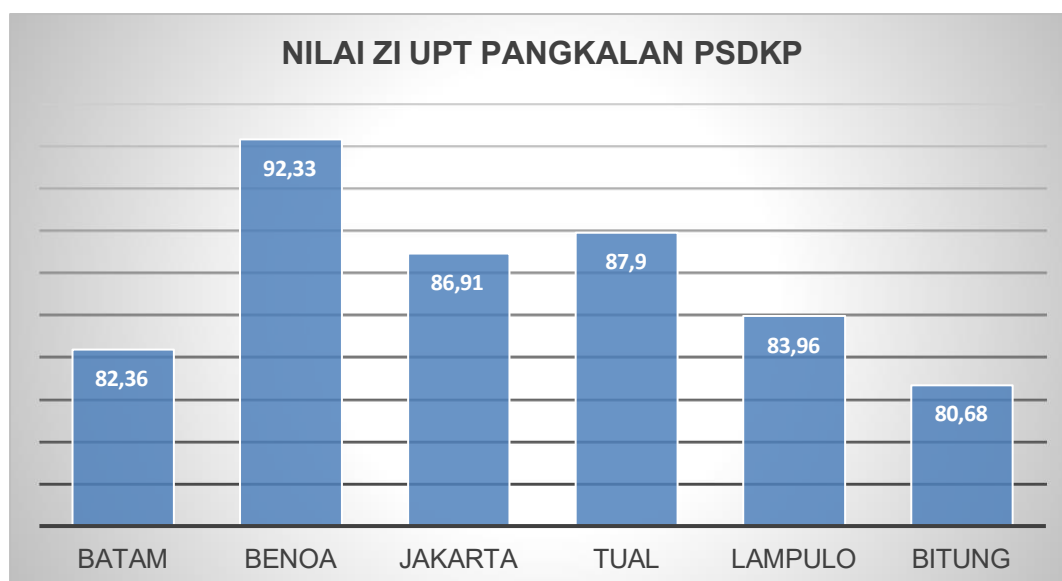
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK19	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2021	75	78,41	104,55
		2022	75	80,58	107,44
		2023	75	90,90	120,00
		2024	75	88,98	118,64
		<b>2025</b>	<b>80</b>	<b>82,36</b>	<b>102,95</b>

Target Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 adalah 80 dan tercapai 82,36. Pelaksanaan WBK berdasarkan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tercapainya indikator ini karena seluruh pegawai Pangkalan PSDKP Batam telah menerapkan nilai-nilai Integritas dalam pelaksanaan pekerjaan baik bidang administrasi maupun teknis. Selain itu adanya pendampingan dari Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP dalam pemenuhan dokumen Zona Integritas. Untuk rincian nilai sebagai berikut.

WBK									
PANGKALAN PSDKP BATAM									
Area Perubahan				Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Nilai Minimum
<b>A. PENGUNGKIT</b>				<b>60.00</b>					
1	MANAJEMEN PERUBAHAN			8.00	2.82	2.75	5.57	69.59%	OK
2	PENATAAN TATALAKSANA			7.00	2.22	2.00	4.23	60.36%	OK
3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR			10.00	3.82	4.25	8.07	80.70%	OK
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS			10.00	4.84	2.51	7.35	73.49%	OK
5	PENGUATAN PENGAWASAN			15.00	4.76	6.88	11.63	77.54%	OK
6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			10.00	4.39	3.76	8.15	81.53%	OK
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>							<b>44.99</b>	<b>74.99%</b>	<b>OK</b>
<b>B. HASIL</b>				<b>40</b>					
<b>I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL</b>				<b>22.5</b>			<b>19.91</b>	<b>88.50%</b>	<b>OK</b>
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)			17.50			17.41	99.50%	OK
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya			5.00			2.50	50.00%	OK
<b>II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA</b>				<b>17.5</b>			<b>17.46</b>	<b>99.75%</b>	<b>OK</b>
-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)			17.50			17.46	99.75%	OK
<b>TOTAL HASIL</b>							<b>37.37</b>	<b>93.42%</b>	<b>OK</b>
<b>NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS</b>							<b>82.36</b>		<b>OK</b>

Jika dibandingkan tahun 2024, terdapat penurunan 6,62 pada tahun 2025 yang juga menjadi capaian pada akhir periode renstra. Adanya selisih ini dikarenakan masih belum optimalnya pemenuhan dokumen pada area khususnya area manajemen

perubahan dan penataan tata laksana. Untuk meningkatkan nilai ZI tahun 2026, dibuat strategi penguatan SDM di kedua area yang nilainya masih minim.



Apabila dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya, maka capaian Pangkalan PSDKP Batam masih di atas Pangkalan PSDKP Bitung namun dibawah Pangkalan PSDKP Bena, Jakarta, Tual, dan Lampulo. Keempat pangkalan tersebut dinilai oleh Sesditjen PSDKP namun Pangkalan PSDKP Batam dan Bitung dinilai oleh Inspektorat V. Pangkalan PSDKP Batam perlu meningkatkan implementasi zona integritas 2026.

Evaluasi dan analisis pada **IK20 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP**, yaitu:

## 20) NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP

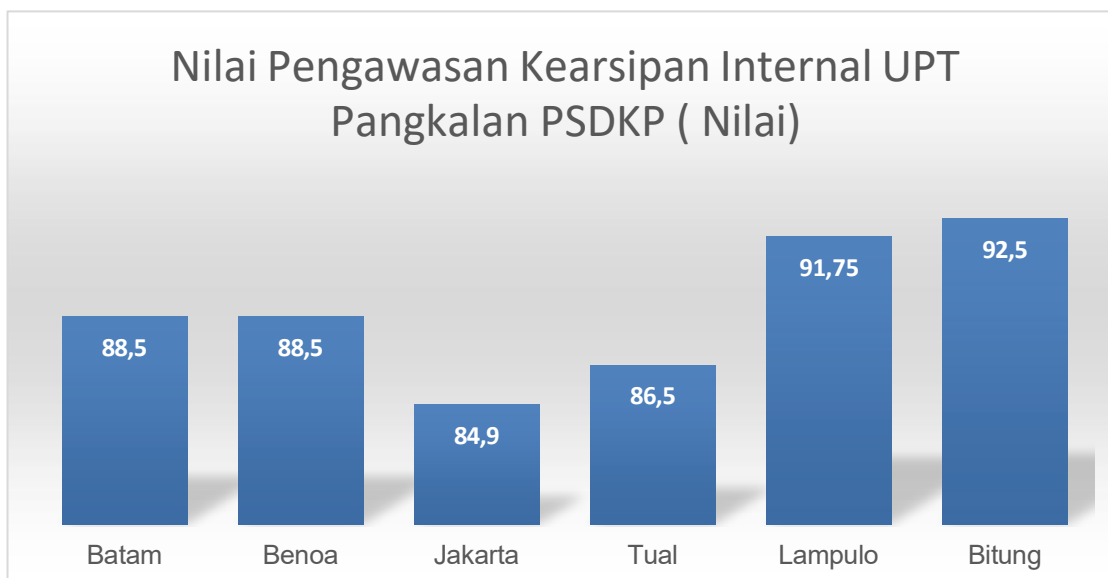
Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK20	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	70	80,67	115,24
		<b>2025</b>	<b>70</b>	<b>88,50</b>	<b>110,63</b>

Target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP yaitu 70 dan menjadi target tahunan serta tercapai 88,5. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Adanya pendampingan dari tim Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP terkait pengelolaan kearsipan juga mendukung dalam pencapaian target indikator ini. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, ada peningkatan 7,8 yang menandakan pengelolaan arsip di Pangkalan PSDKP Batam makin baik. Kendala yang dihadapi adalah belum ada pegawai dengan jabatan arsiparis di Pangkalan PSDKP Batam, meskipun sudah ditawarkan ke semua pegawai namun tidak ada yang mau mendaftar jabatan arsiparis.

Adapun anggaran tahun 2025 untuk Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan persuratan Pangkalan PSDKP Batam Rp. 30.876.000,- dan belum terealisasi karena semua anggaran diblokir efisiensi. Sedangkan perbandingan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya sebagai berikut.



Apabila dibandingkan dengan UPT Pangkalan PSDKP lainnya, maka capaian Pangkalan PSDKP Batam masih di atas Pangkalan PSDKP Jakarta dan sama dengan Pangkalan PSDKP Bena. Nilai ini merupakan hasil penilaian ataupun audit dari tim pengawasan kearsipan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Evaluasi dan analisis pada **IK21 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam (nilai)**, yaitu:

#### **21) NILAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG DITERAPKAN PANGKALAN PSDKP BATAM**

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK22	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	2021	-	-	-
		2022	1	1	100,00
		2023	1	1	100,00
		2024	1	1	100,00
		<b>2025</b>	<b>77</b>	<b>82</b>	<b>106,49</b>

Target Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam (nilai) merupakan perubahan indikator kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam. Perubahan tersebut terjadi pada triwulan IV

2025. Target nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 adalah 77 dan tercapai 82. Tidak bisa dibandingkan karena perbedaan indikator kinerja.

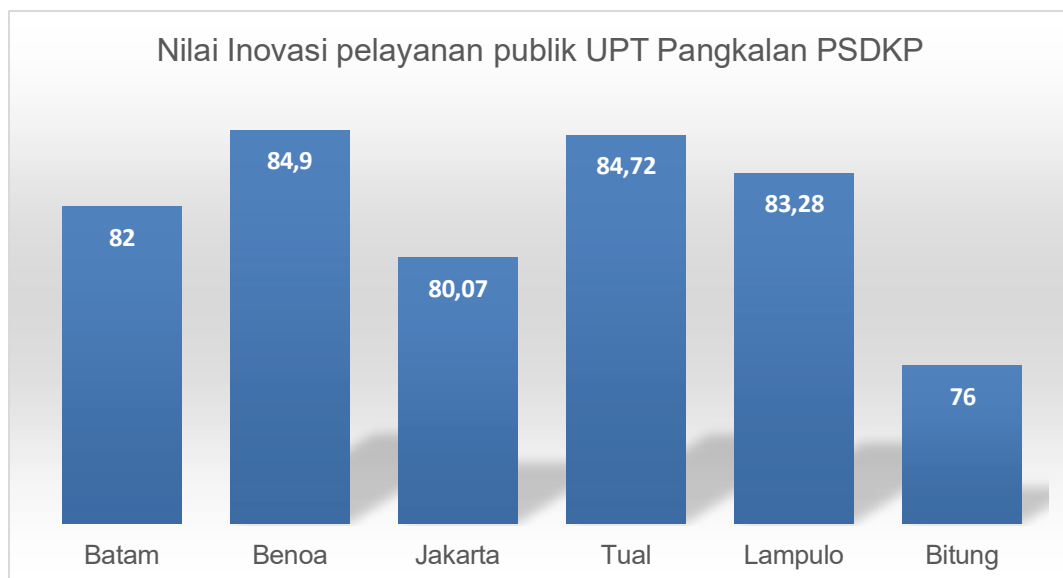
Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan.

Judul inovasi Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 adalah GAHAR SPKP (Cegah Pelanggaran SPKP). Inovasi tersebut Inovasi GAHAR SPKP dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memberikan klarifikasi sebelum kapal nya masuk dalam LIP maupun sebelum penerbitan rekomendasi bongkar dengan catatan, sehingga dengan adanya klarifikasi di awal, kapal-kapal mereka dapat dipertimbangkan kembali sebelum dinyatakan terindikasi melanggar yang kemudian masuk dalam LIP dan/atau diberikan rekomendasi bongkar dengan catatan, sehingga diharapkan proses klarifikasi sebagai tindak lanjut yang dipersyaratkan, yang dalam tahapannya menghabiskan waktu pelaku usaha dan pengawas perikanan serta biaya bagi pelaku usaha dan unit kerja bisa diminimalisir.

Inovasi GAHAR SPKP bersifat unik karena dapat menyelesaikan tanpa harus menggunakan aplikasi yang berbayar dan sulit dikembangkan, serta menawarkan kemudahan, dimana pelaku usaha dapat melakukan klarifikasi secara mandiri sebelum terbitnya LIP dan penerbitan rekomendasi bongkar. Melalui pelaporan mandiri, pelaku usaha juga didorong untuk memantau ketaatan kapal nya, dimana selama ini kondisinya masih sangat minim. Selain itu, inovasi GAHAR SPKP sangat mudah digunakan serta merupakan hal yang baru.

Pangkalan PSDKP Batam mendapatkan urutan atau juara ke-5 kategori UPT. Juara pertama adalah Pangkalan PSDKP Benoa dengan nama inovasi STRIKE

(Sistem Tracking dan Pemantauan Kapal). Untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan lainnya sebagai berikut.



Evaluasi dan analisis pada **IK22 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam**, yaitu:

## 22) NILAI IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA KERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BATAM

Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Capaian	%
Kode	Uraian				
IK21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2021	-	-	-
		2022	21	23,16	110,29
		2023	21	28,18	120,00
		2024	70	81,38	116,26
		<b>2025</b>	<b>70</b>	<b>78,70</b>	<b>112,43</b>

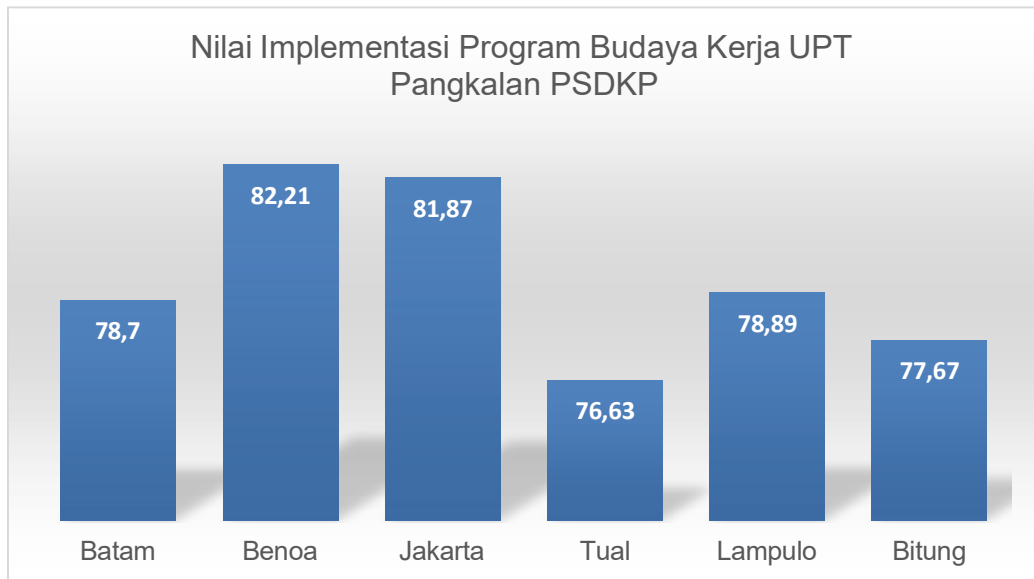
Target Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 70 dan tercapai 78,70. Tercapainya indikator ini karena terlaksananya serta pemenuhan dokumen dalam budaya kerja. Implementasi program-program budaya yaitu 5 menit sebelum jadwal, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, upayakan data

terkini, organisasikan rapat, catat, aksi, arsipkan, tegakan aturan dengan akuntabel dan transparan, belanjakan anggaran secara realistis, akuntabel dan Amanah, ASN PSDKP produktif kerja, menyelesaikan tugas dengan tepat, hormat, motivasi dan inisiatif, gelorakan Gerakan hemat energi telah diterapkan di Pangkalan PSDKP Batam. Untuk hasil kriteria budaya kerja Pangkalan PSDKP Batam dengan rincian sebagai berikut.

No	KRITERIA	NILAI
1	Tim Satker	4,67
2	Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU)	4,5
3	Lima Menit Sebelum Jadwal	4,175
4	Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5 R)	8
5	Upayakan Data Terkini (UPDATE)	6
6	Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA)	6
7	Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT)	6,7
8	Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA)	10
9	ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK)	6
10	Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP)	7,65
11	Hormati, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS)	10
12	Gerorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green)	5
Jumlah		78,70

Penurunan paling besar adalah Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU). Untuk meningkatkan nilai budaya kerja Pangkalan PSDKP Batam 2026 akan dimatangkan lagi inovasi yang akan dilombakan 2026 dan mendorong pegawai mengikuti sumbang sarang.

Capaian indikator ini pada Pangkalan PSDKP Batam lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Bitung dan Tual dan Benoa. Untuk perbandingan dengan UPT Pangkalan lainnya sebagai berikut.



### 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2022 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hasil dari penghitungan efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 terbilang efisien.



Efisiensi tersebut dikarenakan banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan seluruhnya dengan penyerapan anggaran yang efisien. Pada tahun 2025 ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Menindaklanjuti efisiensi anggaran tersebut banyak hal yang dilakukan di Pangkalan PSDKP Batam yaitu pembatasan penggunaan Listrik, jaldis yang selektif, penggunaan kendaraan dinas yang selektif, dan pengaturan perjalanan dinas atau transportasi lokal untuk kegiatan pengawasan. Selain itu, kegiatan pengawasan yang menjadi *core* utama Pangkalan PSDKP Batam tetap terlaksana dan memenuhi ekspektasi atau rencana aksi yang sudah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks kinerja pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan masing-masing 100% artinya dengan anggaran terkena efisiensi kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai target bahkan melebihi target tahunan yang sudah ditentukan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagian besar dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pelaku usaha dalam satu surat perintah tugas (SPT) sehingga capaian output dapat mencapai target dengan penggunaan anggaran yang efektif hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja pemeriksaan pelaku usaha kelautan maupun perikanan yang tercapai 100 %.

### **3.4 Akuntabilitas Keuangan**

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025 sebesar Rp. 35.007.807.000,- yang mana ada anggaran blokir PNBPN 40% sebesar Rp. 1.507.307.000,- sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp. 33.500.500.000,-

. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan serta program dukungan manajemen. Pada tahun 2025 realisasi anggaran sebesar **Rp. 33.488.956.289,-** atau **95,66%** dari pagu efektif. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3.** Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025

No	Kode	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
<b>Pengelolaan Kelautan dan Perikanan</b>					
1	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	14.513.239.000	13,004,710,215	89,61
2	2351	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	213,618,000	211,365,514	98,95
3	2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	759,855,000	756,056,218	99,50
4	2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	0	0	100
<b>Dukungan Manajemen</b>					
5	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	19,521,095,000	19,516,824,342	99,95
<b>TOTAL</b>			<b>35,007,807,000</b>	<b>33,488,956,289</b>	<b>95,66</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **5.1 KESIMPULAN**

1. Hasil capaian kinerja sasaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 seluruhnya mencapai target yang diperjanjikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **103,00** dengan predikat **BAIK** serta realisasi anggaran sebesar **Rp. 33.488.956.289,-** atau **95,66%**. Hal tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan sehingga sebagian besar kegiatan yang mencapai target dengan perencanaan kinerja dan anggaran yang baik serta pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan sumber daya manusia yang memumpuni. Selain itu juga adanya koordinasi maupun pendampingan dari Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP serta kerja sama dengan instansi terkait.

## 5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025, sebagai upaya peningkatan capaian kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Berlakunya KUHAP baru tahun 2025 berpotensi terjadinya kendala dalam proses penyidikan	PPNS Perikanan mengikuti sosialisasi KUHAP baru tahun 2025

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditiensdkp@kkp.go.id](mailto:ditiensdkp@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samuel Sandi Rundupadang  
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Semuel Sandi Rundupadang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	2 Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		3 Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4 Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		5 Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
4	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	7 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		8 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
5	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	9 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	10 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		12 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	13 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	71,5
		15 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	92

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	16 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	81
	17 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	86
	18 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
	19 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
	20 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	88,5
	21 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80
	22 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80
	23 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1
	24 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

**Data Anggaran:**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	14.684.931.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	467.175.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.041.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	200.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	21.956.682.000
<b>Total Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025</b>		<b>39.350.325.000</b>

Jakarta, 19 Maret 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA  
Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Semuel Sandi Rundupadang



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
UMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:ditjenpsdkp@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samuel Sandi Rundupadang  
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 November 2025

PIHAK KEDUA  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA  
Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Pung Nugroho Saksono

  
↑ Samuel Sandi Rundupadang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	2 Indeks operasi kapal pengawas	92
		3 Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	92
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4 Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	80
4	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	5 Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		6 Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
5	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	7 Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	82
6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	8 Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	82
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9 Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	81
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Batam	71,5
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam	92
		14 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Batam	81
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Batam	86

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Batam	100
	17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
	18 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	80
	19 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Batam	80
	20 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Batam	75
	21 Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam	77
	22 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

**Data Anggaran:**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	14.684.931.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	467.175.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.041.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	200.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	21.956.682.000
<b>Total Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025</b>		<b>39.350.325.000</b>

Jakarta, 15 November 2025

**PIHAK KEDUA**  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Pung Nugroho Saksono

  
Semuel Sandi Rundupadang



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

# SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

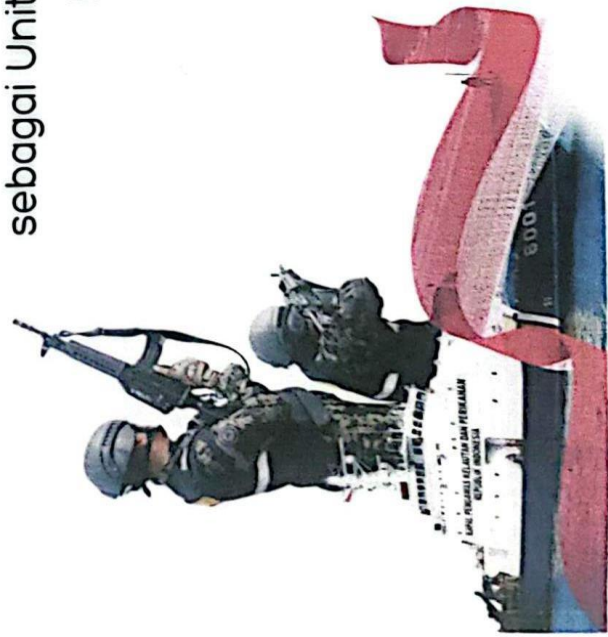
## Pangkalan PSDKP Batam

sebagai Unit Kerja Terbaik III atas Pengelolaan Media Sosial  
Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

Jakarta, 5 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PSDKP

PUNG NUGROHO SAKSONO





KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN



# SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Nomor : 1169/DJPSDKP/KP.540/XII/2025

Diberikan Kepada:

**Pangkalan PSDKP Batam**

Sebagai :

**Inovator**

Lomba Inovasi Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2025, dengan Judul Inovasi  
**GAHAR SPKP (Cegah Pelanggaran SPKP)**

Jakarta, 22 Desember 2025  
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Dr. PUNG NUGROHO SAKSONO A.Pi, M.M.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Piagam Penghargaan

NOMOR B 367/MEN-KP/III/2025

Penghargaan diberikan kepada:

**Pangkalan PSDKP Batam**

sebagai unit organisasi berpredikat

**INFORMATIF**

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik  
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Jakarta, 6 Maret 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono